

DAFTAR ISI

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2013.

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

BAB II LATAR BELAKANG

4. Perkembangan Lingkungan Strategis
5. Kondisi saat ini
6. Identifikasi Masalah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

7. Tujuan
8. Sasaran Pembangunan Pertahanan Negara

BAB IV KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN

9. Kebijakan
10. Program dan Kegiatan
11. Prioritas Pembangunan

BAB V ANGGARAN

12. Kebutuhan
13. Dukungan
14. *Trilateral Meeting* (Rapat Tiga Pihak) Tahun 2013
15. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013
16. Kebutuhan Tambahan
17. Aplikasi Rencana Kerja

BAB VI PENUTUP

18. Penutup

I. DAFTAR SUBLAMPIRAN:

- A ANALISIS STRATEGIS.**
- B. DATA REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TAHUN 2013.**
- C. PERGESERAN PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS KEMHAN DAN TNI TAHUN 2013.**
- D. KOMPARASI KHUSUS ANGGARAN TAHUN 2012 DENGAN RENCANA KEBUTUHAN DAN DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2013.**
- E. APLIKASI RENJA HANNEG TAHUN 2013 UO KEMHAN DAN TNI :**

1. FORMULIR-1

- VISI, MISI, SASARAN KEGIATAN DAN
DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS

2. FORMULIR-2

- A. UMUM**
- B. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- C. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN**
 - 1) INDIKATOR KINERJAKEGIATAN DAN TARGET**
 - 2) SUMBER PENDANAAN**
 - 3) PENDANAAN PHLN ATAU PDN TAHUN 2013**

3. FORMULIR-3

- NEW INITIATIVES

4. PENDUKUNG

- KEMENTERIAN
 - 1) REKAPITULASI UNIT ORGANISASI**
 - 2) REKAPITULASI PROGRAM**
 - 3) RINCIAN KEGIATAN**

II. DAFTAR SUBLAMPIRAN KHUSUS :

- A. DAFTAR REKAPITULASI ALUTSISTA TNI.**
- B. KEMAMPUAN.**
- C. GELAR.**
- D. RENCANA DAN PENETAPAN PENGADAAN ALUTSISTA TNI MELALUI PDN DAN RM TAHUN 2010-2014.**

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA KERJA
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2013

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2013

RENCANA KERJA
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Pembangunan Nasional Tahun 2013 memiliki tema “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Sedangkan pembangunan pertahanan negara sebagai subsistem dari pembangunan bidang Hankam dengan tema khusus “Percepatan Pencapaian MEF yang Didukung Peningkatan Kontribusi Industri Dalam Negeri serta Peningkatan Pelayanan Keamanan Nasional melalui Profesionalisme Aparat dan Kualitas Kebijakan Keamanan”.

Selaras dengan tema tersebut, arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan negara tahun 2013 yaitu melanjutkan peningkatan kemampuan pertahanan menuju *Minimum Essential Force* (MEF), pemberdayaan industri pertahanan (pemberdayaan industri pertahanan nasional/BUMNIP dan BUMS), peningkatan rasa aman dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

- b. Keluaran utama yang diharapkan dalam pembangunan pertahanan negara diantaranya : percepatan pencapaian MEF, peningkatan peran industri dalam negeri. Selain itu, arah pembangunan bidang Hankam yang esensial dan berdimensi inter kementerian, lembaga negara serta berkorelasi dengan prioritas pembangunan nasional yakni reformasi birokrasi dan tata kelola, *right sizing*, *zero growth of personnel*, pengelolaan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik dan berperan serta terhadap mitigasi bencana. Penyelenggaraannya dirumuskan melalui rencana aksi diantaranya melalui perumusan inisiatif baru yaitu penggelaran operasi gabungan, pengadaan Alutsista TNI dan lain-lain.
- c. Pembangunan Postur Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/24/M/XI/2007 tentang Postur Pertahanan Negara membutuhkan dukungan anggaran antara 1,8-2,1% PDB. Dengan asumsi PDB Tahun 2012 sebesar Rp 8.542,6 triliun, maka kebutuhan anggaran tersebut sebesar Rp 153,77 sampai dengan Rp 179,39 triliun. Sedangkan dalam

dokumen Renstra Hanneg Tahun 2010-2014, *resources envelope* pertahanan negara untuk tahun 2013 sebesar Rp 64,29 triliun.

Sementara itu dalam Rapat Panprogar Tahun 2013 yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Pertahanan Nomor: B/264/II/2012 tanggal 28 Februari 2012, kebutuhan anggaran pertahanan negara tahun 2013 sebesar Rp 126,65 triliun.

Namun demikian, sesuai surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Nomor: 0096/M.PPN/03/2012 dan Nomor: S-214/MK.02/ 03/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, pagu indikatif pertahanan negara ditetapkan sebesar Rp 76,53 triliun. Besaran ini setara dengan 0,89% PDB atau 14,14% dari pagu indikatif nasional, atau 60,43% dari kebutuhan pembangunan Postur Pertahanan Negara Tahun 2010-2014. Dalam pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) Kemhan dan TNI, Kemen PPN/Bappenas serta Kemenkeu, menyepakati pergeseran antarprogram dan kegiatan prioritas beserta kelaikan anggaran dari masing-masing UO guna menajamkan pencapaian sasaran pembangunan secara utuh dan menyeluruh dengan tidak mengubah besaran pagu indikatif. Program dan kegiatan prioritas tersebut terdiri atas 17 program dan 44 kegiatan dengan kebutuhan anggaran semula sebesar Rp 25.719,41 miliar menjadi Rp 28.014,32 miliar.

- d. Perencanaan penggunaan belanja operasional diatur berdasarkan kebijakan tidak ada kenaikan (*flat policy*) dan belum mengakomodasi kenaikan gaji, ULP, uang makan, namun sudah memperhitungkan pemberian gaji ke 13. Disamping itu dalam pengelolaan pinjaman luar negeri/kredit ekspor harus dilampiri pernyataan kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri (Pernyataan Penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rencana Pencapaian *Output* Pelaksanaan PLN).
2. Maksud dan Tujuan. Penyusunan naskah Renja ini dimaksudkan untuk mengatur arah kebijakan, program dan kegiatan serta prioritas pembangunan pertahanan negara tahun 2013, dengan tujuan agar penyusunan rencana kerja selaras dengan Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 dan searah dengan prioritas pembangunan nasional; serta menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2013 di lingkungan Kemhan dan TNI.
 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Rencana Kerja Pertahanan Negara (Renja Hanneg) Tahun 2013 mencakup latar belakang, tujuan, sasaran,

kebijakan, program, kegiatan dan prioritas pembangunan pertahanan negara tahun 2013, disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang.
- c. Tujuan dan Sasaran.
- d. Kebijakan, Program, Kegiatan dan Prioritas Pembangunan.
- e. Anggaran.
- f. Penutup.

BAB II LATAR BELAKANG

4. Perkembangan Lingkungan Strategis.

- a. Berbagai aspek perkembangan lingkungan strategis merupakan faktor yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong menguatnya kerja sama antar-negara dalam mengatasi berbagai tantangan dan ancaman yang berpotensi memacu persaingan antar-negara, dalam dimensi ekonomi, politik maupun pertahanan.
- b. Potensi Kerja Sama. Kebijakan kerja sama pertahanan dengan negara sahabat diantaranya meliputi pertukaran intelijen, latihan bersama, pendidikan, kerja sama industri pertahanan diantaranya di bidang persenjataan (transfer teknologi, *offset*, produksi bersama), *peace keeping* di bawah bendera PBB, kerja sama pengamanan perbatasan negara, kelautan dan lain-lain.
- c. Kemungkinan Ancaman. Kompleksitas permasalahan dan keamanan seringkali timbul bersamaan dengan munculnya isu-isu global seperti HAM, demokratisasi, lingkungan hidup, *good governance* dan terorisme. Penggunaan kombinasi *soft power* dan *hard power* melalui pengerahan militer cenderung digunakan oleh negara-negara tertentu untuk memaksakan kepentingannya terhadap negara lain. Disamping itu faktor non negara dapat berpengaruh terhadap keamanan nasional suatu negara yang berdimensi ancaman militer dan non militer maupun gabungan secara simultan. Ditinjau dari sumber, bentuk, eskalasi dan spektrum ancaman dan lain-lain, kemungkinan ataupun prediksi terhadap timbulnya ancaman yang berdimensi aktual dan potensial diperkirakan meliputi: *blockade* laut, spionase, pelanggaran wilayah, intervensi militer, terorisme, sparatisme, kegiatan ragam ilegal, bencana alam, konflik komunal, *cyber crime* dan lain sebagainya.

d. **Identifikasi Timbulnya Ancaman.** Identifikasi kemungkinan timbulnya ancaman ditinjau dari faktor negara dan non negara sebagai berikut :

1) **Ancaman militer dan ancaman non militer dari aktor negara.**

a) **Amerika Serikat.**

(1) **Ancaman militer** : blokade laut, spionase, pelanggaran wilayah dan intervensi militer.

(2) **Ancaman non militer** : embargo, Iptek, *cyber attack*, penurunan moralitas dan inter- vensi politik.

b) **China.**

(1) **Ancaman militer** : spionase dan konflik perbatasan dalam jangka panjang.

(2) **Ancaman non militer** : *cyber attack* dan dominasi perdagangan- an/industri dan Iptek.

c) **Australia.**

(1) **Ancaman militer** : blokade laut, spionase dan pelanggaran wilayah.

(2) **Ancaman non militer** : embargo, Iptek, *cyber attack* dan intervensi politik.

d) **Jepang.**

(1) **Ancaman militer** : spionase.

(2) **Ancaman non militer** : Iptek, intervensi poli- tik, dominasi industri dan *cyber attack*.

e) **India.**

(1) **Ancaman militer** : spionase dan pelang- garan wilayah.

(2) **Ancaman non militer** : dominasi perdagangan dan *cyber attack*.

f) **Singapura.**

(1) **Ancaman militer** : pelanggaran wilayah dan spionase.

(2) **Ancaman non militer** : *cyber attack*, penyelun- dupan barang, eks-

ploitasi sumber daya alam dan propaganda.

- g) **Malaysia.**
 - (1) Ancaman militer : spionase, pelanggaran wilayah dan konflik militer terbatas.
 - (2) Ancaman non militer : *cyber attack* dan propaganda.
- h) **Vietnam, Filipina dan Kamboja.**
 - Ancaman militer : spionase dan pelanggaran wilayah.
- i) **Thailand, Myanmar dan Laos.**
 - Ancaman militer : spionase.
- j) **Rusia.**
 - (1) Ancaman militer : spionase.
 - (2) Ancaman non militer : embargo dan *cyber attack*.
- k) **Korea Selatan.**
 - (1) Ancaman militer : spionase.
 - (2) Ancaman non militer : *cyber attack*, Iptek dan embargo.
- 2) **Ancaman militer dari aktor non negara.**
 - a) Terorisme.
 - b) Separatisme.
 - c) Konflik komunal.
 - d) Perdagangan dan penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak.
 - e) Perompakan dan pembajakan.
 - f) Penebangan dan penyelundupan kayu (*illegal logging*).
 - g) Penyelundupan dan perdagangan ilegal (*smuggling and illicit trade*).
 - h) Perdagangan obat-obatan terlarang (*drugs trafficking*)
 - i) Perdagangan manusia (*human trafficking*).
 - j) Kejahatan dunia maya (*cyber crime*).
 - k) Pencucian uang (*money laundryng*).
 - l) Bencana alam (*natural disaster*).
 - m) Kerusakan lingkungan hidup.
 - n) Ketergantungan pangan.
 - o) Ketergantungan energi.
 - p) Penyakit/hama baru.
 - q) Radikalisme/ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila.
 - r) Konflik vertikal.

- s) Ancaman ketahanan ekonomi.
 - 3) Deskripsi potensi kerja sama dan kemungkinan ancaman secara komprehensif (analisis strategis), sebagaimana tercantum dalam Sublampiran A dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Kondisi Saat ini.
- a. Kekuatan:
 - 1) Organisasi.
 - a) Kementerian Pertahanan (Kemhan). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kedudukan dan Tugas Wakil Menteri Pertahanan:
 - (1) Menteri Pertahanan
 - (2) Wakil Menteri.
 - (3) Sekretariat Jenderal.
 - (4) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.
 - (5) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.
 - (6) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.
 - (7) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.
 - (8) Inspektorat Jenderal.
 - (9) Badan Penelitian dan Pengembangan.
 - (10) Badan Pendidikan dan Pelatihan.
 - (11) Badan Sarana Pertahanan.
 - (12) Staf Ahli.
 - (13) Pusat Keuangan.
 - (14) Pusat Data dan Informasi.
 - (15) Pusat Komunikasi Publik.
 - (16) Pusat Rehabilitasi dan
 - (17) Pelaksana Tugas Pertahanan Negara di daerah.
 - b) TNI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI:
 - (1) Organisasi Markas Besar TNI terdiri atas:
 - (a) Unsur Pimpinan (Panglima TNI).

- (b) Unsur pembantu Pimpinan (Staf Umum TNI, Itjen TNI, Staf Ahli Panglima TNI, Srenum TNI, Sintel TNI, Sops TNI, Spers TNI, Slog TNI, Ster TNI, Skomleks TNI dan Staf Khusus Polisi Militer).
 - (c) Unsur pelayanan (Satkomlek TNI, Pusdalops TNI, Setum TNI dan Denma Mabes TNI).
 - (d) Badan Pelaksana Pusat (Sesko TNI, Kodiklat TNI, Akademi TNI, Bais TNI, Paspampres, Babinkum TNI, Puspen TNI, Puskes TNI, Babek TNI, Pusbintal TNI, Pusku TNI, Pusjarah TNI, Pusinfohata TNI, PMPP, Pusjianstra TNI, PRCPB, PPRC, dan Kogartap).
 - (e) Komando Utama TNI (Kohanudnas, Kostrad, Kopassus, Kodam, Komando Armada, Kolinlamil, dan Koopsau).
- (2) Organisasi Markas Besar TNI AD terdiri atas:
- (a) Unsur Pimpinan (Kasad dan Wakasad)
 - (b) Unsur pembantu Pimpinan (Itjen TNI AD, Staf Ahli Kasad, Srena TNI AD, Spam TNI AD, Sops TNI AD, Spers TNI AD, Slog TNI AD, dan Ster TNI AD).
 - (c) Unsur pelayanan (Puskodal TNI AD, Setum TNI AD dan Denma Mabesad).
 - (d) Badan Pelaksana Pusat (Pussenif, Pussenkav, Pussenarmed, Pussen- arhanud, Pusnerbad, Puspomad, Pusterad, Pusintelad, 8 Direktorat, 7 Dinas, Akmil, Sekoad, dan Secapa AD)
 - (e) Komando Utama Pembinaan (Kostrad, Kodiklad, Kodam, dan Kopassus).
- (3) Organisasi Markas Besar TNI AL terdiri atas:
- (a) Unsur Pimpinan (Kasal dan Wakasal)
 - (b) Unsur pembantu Pimpinan (Itjen TNI AL, Staf Ahli Kasal, Srena TNI AL, Spam TNI AL, Sops TNI AL, Spers TNI AL, dan Slog TNI AL).
 - (c) Unsur pelayanan (Puskodal TNI AL, Setum TNI AL dan Denma Mabesal).

- (d) Badan Pelaksana Pusat (20 Dinas, Puspenerbal, Puspom TNI AL, Akademi TNI AL dan Sesko TNI AL).
 - (e) Komando Utama Pembinaan (Komando Armada, Kolinlamil, Korps Marinir, dan Kobangdikal).
- (4) Organisasi Markas Besar TNI AU terdiri atas:
 - (a) Unsur Pimpinan (Kasau dan Wakasau).
 - (b) Unsur pembantu Pimpinan (Itjen TNI AU, Staf Ahli Kasau, Srena TNI AU, Spam TNI AU, Sops TNI AU, Spers TNI AU dan Slog TNI AU).
 - (c) Unsur pelayanan (Puskodal TNI AU, Setum TNI AU dan Denma Mabasau).
 - (d) Badan Pelaksana Pusat (20 Dinas, Lakespra, Puspom TNI AU, Akademi TNI AU dan Seskoau).
 - (e) Komando Utama Pembinaan (Koopsau, Kodikau, Koharmatau, dan Korps Pasukan Khas).
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM). Kekuatan SDM sebanyak 481.479 orang, terdiri atas prajurit TNI 417.265 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 64.214 orang. Data SDM sebagaimana tercantum dalam Sublampiran B dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 3) Alutsista/Materiil. Data Alutsista/materiil tercantum dalam Sublampiran khusus dari Lampiran yang merupakan bagian terpisah dari Peraturan Menteri ini.
- 4) Peranti lunak. Manajemen pertahanan negara diselenggarakan berdasarkan legislasi dan regulasi yang berlaku secara universal dari strata kebijakan, strategi maupun pembinaan. Selanjutnya penyelenggaraan pertahanan negara yang berdimensi operasional diatur melalui regulasi yang memiliki tataran teknis, taktis, administratif militeristik. Regulasi pertahanan negara tersebut dikelompokkan menjadi produk strategis (doktrin, postur, rencana strategis, buku putih, MEF) dan buku petunjuk lainnya sesuai dengan stratifikasi yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI. Peranti lunak ini senantiasa memerlukan kaji ulang (*strategic defence review*/SDR) dalam rangka menyesuaikan secara realistis terhadap perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.

- 5) Komponen cadangan dan komponen pendukung. Legalitas pembentukan dan pembinaan Komcad dan Komduk masih terkendala belum adanya legislasi dan regulasi, namun faktualitas senantiasa dilakukan persiapan pembentukannya diantaranya melalui pembinaan bela negara.
- b. Kemampuan. Rincian kemampuan Hanmil tercantum dalam Sublampiran khusus dari Lampiran yang merupakan bagian terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Sedangkan kemampuan pertahanan nirmiliter berada di masing-masing Kementerian/Lembaga selain Kemhan dan TNI.

c. Gelar.

- 1) Gelar kekuatan TNI AD terdiri atas kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan dan kekuatan pendukung. Kekuatan terpusat TNI AD adalah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang mencakup Satuan Tempur (Satpur), Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur) Dan Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin), serta Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang mencakup Parako, Sandha dan Gultor. Sedangkan gelar kekuatan kewilayahan terdiri atas 13 Kodam, dan gelar kekuatan satuan pendukung mencakup Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Kodiklat).
- 2) Gelar kekuatan TNI AL diselenggarakan dalam kerangka Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang pelaksanaannya mengikuti pola Strategi Pertahanan Maritim Indonesia dalam gelar yang bersifat penyebaran kekuatan dan pengerahan kekuatan untuk tujuan penindakan, yang merupakan gelar permanen, mencakup satuan-satuan armada, pangkalan dan marinir.
- 3) Gelar kekuatan TNI AU diselenggarakan dalam struktur komando operasi udara dan komando pertahanan udara nasional yang meliputi unsur-unsur kekuatan pertahanan udara (Hanud), pemukul udara, dan pendukung.
- 4) Uraian gelar pertahanan militer lebih rinci, termasuk gelar pasukan di wilayah perbatasan dan misi perdamaian dunia sebanyak 1850 personel (Libanon = 1461, Kongo = 192, Haiti = 168, Sudan Selatan = 2, Darfur = 3, Libya = 2, Liberia = 1, Suriah = 11 dan Filipina Selatan 10 personel) tercantum dalam Sublampiran khusus yang terpisah dari Peraturan Menteri ini.
- 5) Sedangkan kekuatan pertahanan nirmiliter berada di masing-masing K/L, dimana komponen cadangan ditujukan untuk menghasilkan *efek deterrence* yang bersifat lokal/kedaerahan. Sedangkan komponen pendukung tidak digelar seperti komponen pertahanan yang lain. Komponen pendukung

disiapkan pada saat negara membutuhkan atau dalam keadaan bahaya.

d. Anggaran.

- 1) Kebutuhan anggaran pertahanan berdasarkan Postur Pertahanan Negara (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/24/M/XII/2007) adalah sebesar 1,8%-2,1% PDB/ Rp 8.542,6 triliun = Rp 153,77-Rp 179,39 triliun.
- 2) Berdasarkan Renstra Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010), ketersediaan anggaran (*resource envelope*) Tahun 2013 adalah sebesar Rp 64.292,37 miliar, sedangkan pagu indikatif sebesar Rp 76.538,50 miliar setara/ekivalen 119,04%.
- 3) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum Alutsista TNI Tahun 2010-2014, rencana dukungan anggaran paling banyak sebesar Rp 57,00 triliun. Realisasi dukungan anggaran dari tahun 2010-2013 mencapai Rp 23,00 triliun, sehingga masih membutuhkan tambahan dukungan sebesar \pm Rp 34,00 triliun.
- 4) Mengacu hasil Panprogar Tahun 2013, rencana kebutuhan tahunan adalah sebesar Rp 126.654,96 miliar, sedangkan pagu indikatif sebesar Rp 76.538,50 miliar, setara/ekivalen 60,43%.

6. Identifikasi Masalah.

- a. Kesenjangan Postur Ideal dan Kondisi Saat Ini. Meningkatnya ancaman pertahanan negara dari kekuatan militer negara lain maupun ancaman dalam bentuk baru (*non-traditional threat*) memerlukan pengembangan postur dan struktur pertahanan. Namun dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan dibangun adalah pada skala MEF. Dengan jumlah Alutsista TNI yang masih kurang, tingkat kesiapan Alutsista TNI yang rata-rata baru mencapai 65,13% pada tahun 2011, serta sebagian besar Alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar karena usia teknisnya yang sudah tua dan ketertinggalan teknologi, pencapaian MEF tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, paling tidak membutuhkan 3 (tiga) tahapan Renstra.
- b. Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan (terluar). Masih tingginya gangguan keamanan di wilayah perbatasan pada saat ini tidak terlepas akibat masih terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan wilayah perbatasan. Di samping itu, perbedaan kesejahteraan dengan negara tetangga juga menjadi salah satu pemicu munculnya pelintas batas ilegal yang berujung pada

pencurian sumber daya alam, perpindahan patok perbatasan, atau menurunnya rasa cinta tanah air. Sampai dengan akhir tahun 2014, sarana wilayah perbatasan yang akan dibangun sebanyak 96 pos pertahanan darat dan 11 pos pulau terdepan (terluar), sehingga totalnya menjadi 295 pos pertahanan darat dan 23 pos pulau terdepan (terluar). Namun sampai akhir tahun 2012 baru terbangun 27 pos pertahanan darat (9 pos tahun 2010, 2 pos tahun 2011 dan 16 pos tahun 2012) di wilayah Kodam VI/MLW, Kodam XII/TPR dan Kodam XVII/Cen. Dengan demikian totalnya mencapai 224 dari total kebutuhan minimal sebanyak 395 pos pertahanan.

- c. **Industri Pertahanan.** Besarnya komponen impor masih menjadi kendala dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian ketika ada goncangan perekonomian global atau menjadi alat penekan untuk mengikuti *mainstream*-nya. Hal lain yang saat ini mendesak adalah industri bahan baku pendorong (*propellant*) yang sangat dibutuhkan dalam industri amunisi, roket, maupun Rudal yang kebutuhannya cukup besar.
- d. **Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional.** Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos keamanan mengakibatkan masih banyaknya area-area kosong (*blank spot*) yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Akibatnya di wilayah laut yurisdiksi nasional, intensitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditangani oleh negara. Kondisi ini juga terkait dengan intensitas operasi yang sangat terbatas baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Banyaknya instansi yang memiliki kewenangan dalam usaha menjaga dan mengawasi wilayah laut Indonesia menuntut koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Sementara itu, di masa depan ancaman dan gangguan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional diperkirakan akan terus berkembang dan akan semakin meningkat dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang dikuasai oleh operator kapal laut ilegal. Apabila hal tersebut tidak mampu diimbangi, maka tindak pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan liar dan pembalakan liar diperkirakan akan semakin marak dan lebih sulit diatasi.
- e. **Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan ALKI.** Berdasarkan data *International Maritime Bureau* (IMB) pada tahun 2011, sampai dengan bulan September telah terjadi serangan bajak laut sebanyak 352 kali, di mana 199 terjadi di Somalia, dan 41 terjadi di Selat Malaka. Kondisi ini menyebabkan dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif

berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka dan tiga jalur ALKI adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kelalaian dan kelemahan dalam pengamanannya, memiliki konsekuensi masuknya pasukan asing untuk turut mengamankannya sebagaimana diterapkan di perairan Somalia.

- f. **Terorisme. Penegakan hukum secara tegas dalam pemberantasan terorisme nampaknya belum dapat menyurutkan aktivitas terorisme. Aksi-aksi teror seperti bom buku, bom bunuh diri di tempat-tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya dikhawatirkan masih akan terus terjadi. Tingginya tingkat kekecewaan dan keputusan turut mempengaruhi suburnya aksi terorisme. Kenyataannya pelaku tidak lagi hanya berasal dari kalangan pendidikan keagamaan atau keterbatasan ekonomi, tetapi banyak tersangka justru berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Di sisi lain, adanya gerakan atau Ormas keagamaan yang bersifat eksklusif dan radikal memberikan ruang untuk perekrutan pelaku teror baru. Namun dengan bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat semakin meningkat bahwa terorisme adalah musuh bersama dan bukan sebagai masalah persinggungan keagamaan. Berkaitan dengan hal ini, disamping penegakan hukum terus dilakukan, peran BNPT perlu ditingkatkan agar anasir-anasir radikal terorisme dapat ditekan sedemikian rupa sehingga negara terbebas dari aksi-aksi terorisme.**
- g. **Deteksi Dini yang Masih Belum Memadai. Berbagai kasus gangguan keamanan dalam negeri, terutama yang terjadi di Papua, Aceh, Maluku, aksi terorisme, masalah perbatasan, dan masalah-masalah gangguan keamanan lainnya menunjukkan bahwa sistem deteksi dini belum secara optimal mendukung keamanan dalam negeri yang kondusif. Pemerintah dianggap telah kecolongan pada Kongres Rakyat Papua III yang menimbulkan korban. Demikian juga aksi-aksi anarkis pada pelaksanaan Pilkada Aceh, aksi-aksi terorisme yang semakin variatif, dan serentetan unjuk rasa yang berujung bentrok menunjukkan data dan informasi intelijen yang dikumpulkan belum optimal mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan dalam negeri. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat mungkin dapat disalahgunakan dan berpotensi mengancam keamanan nasional, perlu ditandingi dan diantisipasi dengan upaya modernisasi sistem deteksi dini, sehingga keputusan strategis yang dihasilkan dapat meredam atau menghilangkan potensi gangguan keamanan dalam negeri.**
- h. **Keamanan Informasi Negara Masih Lemah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, menjadikan perlunya dilakukan peningkatan sinergitas kemampuan fungsi intelijen di semua K/L sebagai penyelenggara**

intelijen negara (BIN, Intelijen TNI, Intel Polri, Intel Kejaksaan dan Intel K/L Pemerintah non Kementerian), melalui kerja sama untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini dari berbagai bentuk dan sifat ancaman.

Disamping itu diperlukan penguatan kinerja Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi dan Informasi, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP) di lingkungan Kemhan dan TNI.

- i. Kesenjangan Kapasitas Lembaga Penyusun Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara. Penyelenggaraan perumusan kebijakan Keamanan Nasional dilaksanakan untuk mendukung upaya peningkatan kemampuan ketahanan nasional dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Namun demikian, penyelenggaraan perumusan kebijakan Keamanan Nasional belum terharmonisasi atau terintegrasi dengan optimal karena belum disepakati dan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional. Oleh karena itu, untuk menyongsong diundangkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diharapkan terjadi pada tahun 2012, diperlukan upaya revitalisasi dan transformasi menuju pembentukan Dewan Keamanan Nasional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

7. Tujuan. Renja Hanneg Tahun 2013 ditekankan pada peningkatan profesionalitas yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kesejahteraan serta meningkatkan peran Indonesia dalam menciptakan keamanan maupun perdamaian dunia.
8. Sasaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2013.
 - a. Terwujudnya postur dan struktur Pertahanan rata-rata sebesar 30% dari kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan diharapkan memiliki efek penggentar bagi upaya-upaya mengganggu kedaulatan dan kewibawaan NKRI.
 - b. Terbangunnya 14 pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat dan terbangunnya 1 pos pertahanan baru di pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya.
 - c. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kelengkapan Alutsista TNI sebesar 16,73% akuisisi Alutsista TNI tahun 2013, dan terlaksananya kerja sama pengembangan teknologi dengan

- Perguruan Tinggi, dunia usaha, maupun industri pertahanan luar negeri.
- d. Tercapainya penurunan gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia termasuk di Selat Malaka.
 - e. Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.
 - f. Terlaksananya pemantauan dan pendeteksian ancaman gangguan keamanan nasional.
 - g. Terlaksananya perlindungan informasi negara melalui perluasan jaring komunikasi sandi nasional di darat, laut maupun udara.
 - h. Terlaksananya transformasi penentu kebijakan ketahanan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu.

BAB IV

KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

9. Kebijakan. Kebijakan pembangunan pertahanan negara yang termasuk dalam prioritas pembangunan bidang Hankam Tahun 2013, ditekankan kepada :
- a. Percepatan pencapaian MEF melalui modernisasi dan penggantian Alutsista yang umur teknisnya sudah tua untuk meningkatkan profesionalisme dan keselamatan prajurit.
 - b. Peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit diantaranya melalui pemberian insentif kepemilikan rumah, tunjangan khusus operasi.
 - c. Akselerasi penuntasan dasar hukum pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung.
 - d. Percepatan pembangunan pos pertahanan negara di wilayah perbatasan darat dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran personelnnya.
 - e. Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional untuk memperkuat agenda kemandirian pertahanan melalui peningkatan pengadaan Alutsista dan non Alutsista TNI, dan secara simultan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan pertahanan.
 - f. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian.

- g. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.
- h. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- i. Meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

10. Program dan Kegiatan.

- a. Penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2013 dimanifestasikan melalui 26 program dan 195 kegiatan, dengan rincian:
 - 1) UO Kemhan : 10 program, 57 kegiatan
 - 2) UO Mabes TNI : 4 program, 30 kegiatan
 - 3) UO TNI AD : 4 program, 41 kegiatan
 - 4) UO TNI AL : 4 program, 35 kegiatan
 - 5) UO TNI AU : 4 program, 32 kegiatan
- b. Berdasarkan arah kebijakan yang berdimensi nasional, inter kementerian serta di lingkungan Kemhan dan TNI, maka program dan kegiatan prioritas pembangunan pertahanan negara, dirancang untuk melanjutkan rumusan kebijakan strategis dan implementatif, serta mengakomodasi kemungkinan adanya inisiatif baru. Rencana aksi dalam program dan kegiatan diarahkan untuk penguatan profesionalitas dengan titik berat intensifikasi rencana aksi operasi pengamanan wilayah perbatasan darat/laut/udara, latihan, penggunaan kekuatan pertahanan integratif, modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Sarpras pertahanan, kerja sama pertahanan dan lain-lain.

- 11. Prioritas Pembangunan.** Program dan kegiatan prioritas sesuai Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2013, yang telah diselaraskan pada pertemuan tiga pihak meliputi 17 program dan 44 kegiatan dengan uraian sebagaimana dapat dilihat pada Sublampiran C (kolom 3) dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V ANGGARAN

12. **Kebutuhan.** Rencana kebutuhan anggaran pembangunan pertahanan negara tahun 2013 yang diajukan Kemhan dan TNI melalui surat Menteri Pertahanan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B/264/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang revisi rancangan awal pembangunan pertahanan negara tahun 2013 sebesar **Rp 126.654,96 miliar**, dengan rincian per Unit Organisasi:

- a. Kemhan Rp 19.141,71 M
- b. Mabes TNI Rp 9.563,60 M
- c. TNI AD Rp 63.690,57 M
- d. TNI AL Rp 19.755,51 M
- e. TNI AU Rp 14.503,57 M

Rincian per program dapat dilihat pada Sublampiran D dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dalam rancangan awal yang diajukan tersebut tidak disebutkan sumber pendanaannya. Dalam perkembangannya, pengajuan kebutuhan anggaran mengalami beberapa kali penyesuaian sebagaimana tercantum pada Pasal 14 dan Pasal 16 dari Peraturan Menteri ini.

13. **Dukungan.** Berdasarkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Tahun 2013 anggaran pertahanan negara sebesar **RKP Rp 76.538,50 miliar**.

- a. Rincian dari anggaran tersebut adalah:

1) Per UO

- a) Kemhan Rp 22.475,60 M
- b) Mabes TNI Rp 5.900,43 M
- c) TNI AD Rp 30.851,67 M
- d) TNI AL Rp 9.284,90 M
- e) TNI AU Rp 8.025,90 M

2) Per program:

- a) UO Kemhan: Rp 22.475,60 M
 - (1) Dukungan Manaj & Laknis lainnya Kemhan Rp 934,12 M
 - (2) Kat Sarpras Aparatur Kemhan Rp 18.247,45 M
 - (3) Waskat akuntabilitas

| | | | |
|------|--|----|-------------|
| | aparatur Kemhan | Rp | 20,63 M |
| (4) | Litbang Kemhan | Rp | 1.134,01 M |
| (5) | Diklat aparatur Kemhan/TNI | Rp | 152,07 M |
| (6) | Strategi pertahanan | Rp | 57,57 M |
| (7) | Perencanaan umum & Gar Han | Rp | 32,54 M |
| (8) | Bang Teknologi & Indhan | Rp | 1.400,00 M |
| (9) | Potensi pertahanan | Rp | 37.02 M |
| (10) | Kekuatan pertahanan | Rp | 460.19 M |
| b) | UO Mabes TNI: | Rp | 5.900,43 M |
| (1) | P'gar Manaj & Opsnal Integratif | Rp | 3.111,84 M |
| (2) | Gun Kuat Han Integratif | Rp | 1.789,12 M |
| (3) | Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Integratif | Rp | 689.95 M |
| (4) | Kat Prof prajurit Integratif | Rp | 309,52 M |
| c) | UO TNI AD: | Rp | 30.851,67 M |
| (1) | P'gar Manaj & Opsnal Matra Darat | Rp | 27.082,41 M |
| (2) | Duk kesiapan Matra Darat | Rp | 427,89 M |
| (3) | Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Darat | Rp | 2.478,94 M |
| (4) | Kat Prof prajurit Matra Darat | Rp | 862,43 M |
| d) | UO TNI AL: | Rp | 9.284,90 M |
| (1) | P'gar Manaj & Opsnal Matra Laut | Rp | 6.815,98 M |
| (2) | Duk kesiapan Matra Laut | Rp | 763,86 M |
| (3) | Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Laut | Rp | 1.385,22 M |
| (4) | Kat Prof prajurit Matra Laut | Rp | 319,84 M |
| e) | UO TNI AU: | Rp | 8.025,90 M |
| (1) | P'gar Manaj & Opsnal Matra Udara | Rp | 3.743,12 M |
| (2) | Duk kesiapan Matra Udara | Rp | 415,98 M |

(3) Modernisasi Alutsista/non

Alutsista/Sarpras Matra Udara Rp 3.593,38 M

(4) Kat Prof prajurit Matra Udara Rp 273,42 M

b. Sumber pendanaan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

- 1) Alokasi PDN adalah sebesar Rp 600,00 miliar, yaitu pada sebagian dari Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan). Rincian rencana penggunaan alokasi PDN dalam program Bangtekindhan adalah sebagaimana tercantum dalam Sublampiran khusus yang merupakan bagian terpisah dari Peraturan Menteri ini.
- 2) Alokasi PHLN adalah sebesar Rp 12.753,29 miliar, yaitu pada sebagian dari Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kemhan. Alokasi PHLN ini akan di rinci penggunaannya dalam dokumen RKA-K/L dengan mempedomani penetapan dari Kementerian Keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.

c. Catatan penting yang tercantum dalam surat Menteri PPN/Ka Bappenas tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2013 adalah:

1) Penyusunan Renja K/L memprioritaskan:

- a) Program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum dalam RKP Tahun 2013.
- b) Inisiatif baru yang terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta arahan Presiden lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 meliputi:
 - (1) *Master plan* percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
 - (2) *Master plan* program percepatan penanggulangan kemiskinan Indonesia (MP3KI) dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan.
 - (3) *Ease of doing business* untuk memperbaiki iklim investasi dan usaha serta meningkatkan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi, penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda.

- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - (5) Persiapan Pemilu 2014 serta memperbaiki kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi.
 - (6) Peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan ketersediaan minyak dan gas bumi.
 - (7) Percepatan pembangunan MEF.
 - (8) Pembangunan kawasan timur Indonesia daerah perbatasan dan daerah tertinggal.
 - c) Kebutuhan anggaran belanja pegawai dan operasional.
 - d) Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri.
 - e) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi years*).
 - f) Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembatasan Penyusunan Renja K/L.
- a) Perjalanan dinas dalam dan luar negeri.
 - b) Rapat dan konsinyering di luar kantor.
 - c) Honorarium tim.
 - d) Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tugas dan fungsi K/L (antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan).
 - f) Pengadaan kendaraan bermotor (kecuali pengadaan kendaraan fungsional seperti ambulans untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh, dan kendaraan penggantian kendaraan rusak berat).
14. *Trilateral Meeting* (Rapat Tiga Pihak) Tahun 2013. *Trilateral Meeting* diselenggarakan pada tanggal 12 April 2012 di Ditjen Renhan Kemhan untuk membahas program, kegiatan, dan besaran anggaran dalam Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP tahun 2013. Dokumen *Trilateral Meeting* ditandatangani para pihak dan perwakilan UO. Beberapa perubahan hasil kesepakatan adalah:
- a. Distribusi dari alokasi anggaran Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan sebesar Rp 1.400,00 miliar adalah:

| | |
|-------------------------|-------------|
| 1) Sumber pendanaan PDN | Rp 600,00 M |
| (1) UO Mabes TNI | Rp 150,00 M |

| | | | |
|-----|-------------------------------|----|----------|
| (2) | UO TNI AD | Rp | 150,00 M |
| (3) | UO TNI AL | Rp | 150,00 M |
| (4) | UO TNI AU | Rp | 150,00 M |
| 2) | Sumber pendanaan Rupiah Murni | Rp | 800,00 M |
| (1) | UO Mabes TNI | Rp | 142,58 M |
| (2) | UO TNI AD | Rp | 414,49 M |
| (3) | UO TNI AL | Rp | 184,13 M |
| (4) | UO TNI AU | Rp | 58,80 M |

- b. Alokasi untuk kegiatan prioritas pertahanan negara yang dalam pagu indikatif sebesar Rp 25.719,40 miliar berubah menjadi sebesar Rp 28.014,32 miliar.

Uraian secara lengkap berkenaan dengan rencana dan kesepakatan perubahan/pergeseran program/kegiatan prioritas adalah sebagaimana tercantum dalam Sublampiran C dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

15. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013.

- a. Besaran anggaran pertahanan negara dalam RKP Tahun 2013 tidak mengalami perubahan sebesar Rp 76.538,50 miliar, namun menetapkan alokasi anggaran untuk program-program prioritas sebagai berikut:

| | Program | Semula | Menjadi |
|----|---|----------------|----------------|
| a. | Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana Prasarana Matra Darat | Rp. 1.760,00 M | Rp. 1.860,00 M |
| b. | Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana Prasarana Matra Udara. | Rp. 2.000,00 M | Rp. 3.002,00 M |

Perbandingan antara proses rencana kebutuhan dan dukungan anggaran tahun 2013 dengan anggaran tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Sublampiran D dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- b. Penambahan pada alokasi anggaran prioritas ini (tanpa mengubah alokasi anggaran keseluruhan) mengurangi alokasi anggaran untuk pemeliharaan/perawatan Alutsista yang akan berdampak terhadap kesiapan Alutsista. Dampak akan dialami, terutama oleh TNI AU berupa penurunan kesiapan pesawat secara signifikan mengingat berkurangnya anggaran untuk pemeliharaan/perawatan Alutsista

sebesar Rp. 1.002,00 miliar.

- c. Pembangunan MEF tahun 2013 masih memerlukan penyelarasan seperlunya sehubungan dengan adanya penambahan dan atau pergeseran kebijakan fokus prioritas sasaran program/kegiatan/rencana aksi, yang berimplikasi terhadap rincian anggaran.

16. Kebutuhan Tambahan.

- a. Guna mencegah pengurangan kesiapan Alutsista pada tahun 2013, diajukan tambahan anggaran sebesar Rp 17.002,78 miliar melalui Surat Menhan kepada Men PPN/Kepala Bappenas Nomor: B/912/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.

- b. Diajukan pula kebutuhan anggaran terhadap sasaran prioritas tahun 2013 yang belum terdukung dalam alokasi Pagu Indikatif Kemhan/TNI tahun 2013, sebesar Rp 4.524,77 miliar meliputi:

- | | | |
|--|----|------------|
| 1) Pengadaan Helikopter (NAS-332C1) VVIP | | |
| sebanyak 2 unit | Rp | 460,00 M |
| 2) Penggelaran Operasi gabungan | Rp | 80,19 M |
| 3) Pembangunan gedung Unhan di Sentul | Rp | 312,53 M |
| 4) Hibah pesawat C-130 H sebanyak 4 unit | Rp | 440,00 M |
| 5) <i>Up grading (falcon star)</i> F-16 sebanyak | | |
| 10 unit | Rp | 270,00 M |
| 6) Pembangunan <i>platform</i> KCR 60 M Lanjutan | Rp | 169,78 M |
| 7) Pengadaan Heli Angkut Bell-412 Tahap II | | |
| Lanjutan | Rp | 88,93 M |
| 8) Pengadaan Kapal Bantu Cair Minyak | | |
| Lanjutan | Rp | 107,50 M |
| 9) Pengadaan APS (Brigif Mekanis) sebanyak | | |
| 20 unit | Rp | 210,00 M |
| 10) Perlengkapan Satuan Armed | Rp | 63,67 M |
| a) Pengadaan Radar <i>fire finder</i> dan Alkap | | |
| Serta kendaraan sebanyak 2 unit | Rp | 27,87 M |
| b) Pengadaan Sta Meteo dan Alkap serta | | |
| kendaraan sebanyak 2 unit | Rp | 26,80 M |
| c) Pengadaan Sta Relay dan Alkap serta | | |
| kendaraan sebanyak 6 unit | Rp | 9,00 M |
| 11) Sarpras pendukung Alutsista | Rp | 2.322,17 M |

| | | | |
|----|--------|----|------------|
| a) | TNI AD | Rp | 1.500,00 M |
| b) | TNI AL | Rp | 647,25 M |
| c) | TNI AU | Rp | 174,92 M |

17. Aplikasi Rencana Kerja. Dokumen Renja Hanneg Tahun 2013 dilengkapi dengan aplikasi pertahanan negara tahun anggaran 2013 Kemhan dan TNI, meliputi:

- a. Formulir 1 memuat : Visi, Misi, Sasaran Kegiatan dan Daftar Kegiatan Prioritas.
- b. Formulir 2 memuat : Umum, Hasil/*Outcome* Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Kegiatan dan Sumber Pendanaan.
- c. Formulir 3 memuat : Inisiatif Baru.
- d. Pendukung Kementerian memuat : Rekapitulasi Unit Organisasi, Rekapitulasi Program dan Rincian Kegiatan Perprogram.

Tabulasi/matrikulasi aplikasi tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENUTUP

18. Dokumen Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2013 merupakan rencana kebutuhan tahunan dan jabaran dari Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 serta RKP Tahun 2013.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

SUBLAMPIRAN A

ANALISIS STRATEGIS

SUBLAMPIRAN A DARI LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2013

ANALISIS STRATEGIS

1. Umum.

Perkembangan lingkungan strategis internasional sangat dipengaruhi oleh interaksi negara-negara besar di dunia termasuk diantaranya Amerika Serikat, China, Rusia, India, Jepang dan Uni Eropa. Dalam mengejar kepentingan nasionalnya, terutama kebutuhan sumber daya alam dan lebih khusus lagi energi, sering terjadi benturan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul ketegangan dan bahkan terjadi konflik. Eksploitasi sumber daya oleh negara-negara tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap keseimbangan alam sehingga rawan terjadi bencana alam. Di sisi lain arogansi negara-negara besar telah menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah sehingga timbul rasa tidak puas. Kondisi ini mendorong terjadinya perlawanan dari pihak lemah yang merasa dirugikan sehingga timbul perang yang tidak seimbang (konflik asimetris) dan salah satunya adalah terorisme.

Dampak positif dari globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong menguatnya kerja sama antarnegara dalam mengatasi berbagai tantangan dan ancaman. Namun demikian kondisi ini juga berpotensi memacu persaingan antar negara, baik dalam dimensi ekonomi, politik maupun pertahanan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka manusia semakin banyak berinteraksi melalui dunia maya. Ketergantungan manusia terhadap dunia maya (internet/komputer) menjadikan dunia maya sebagai sumber ancaman baru (*cyber threat*). Akibatnya ancaman terhadap suatu negara menjadi semakin kompleks, tidak hanya dalam bentuk ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang bersifat asimetris.

Dalam rangka menghadapi ancaman asimetris yang memiliki sifat, non-konvensional, tidak mengenal front, dan sangat luas, maka kekuatan *soft power* lebih dikedepankan. Namun pada kenyataannya penerapan kekuatan *soft power* tidak akan efektif tanpa didukung oleh kekuatan *hard power*. Menyadari bahwa kemampuan *hard power* tetap menjadi penentu dalam menghadapi ancaman simetris maupun ancaman asimetris, maka semua negara di dunia terus meningkatkan kemampuan militernya. Data belanja militer AS turun pada tahun 2012 dan rencana tahun 2013 dengan penarikan pasukan dari Irak dan Afghanistan.

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi geografi sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam, namun karena posisinya sebagai negara

berkembang dengan segala keterbatasan yang dimiliki akan sangat rawan terhadap dampak persaingan negara-negara besar. Akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi maka Indonesia harus menghadapi berbagai ancaman baik dari luar, dari dalam maupun ancaman yang merupakan gabungan dari luar dan dari dalam negeri.

Dalam kondisi seperti ini, pembangunan kekuatan militer konvensional harus menjadi prioritas bagi Indonesia untuk dapat disinergikan dengan kemampuan soft power sehingga memiliki daya tangkal yang memadai.

2. Perkembangan Lingkungan Strategis.

a. Lingkungan Strategis Global.

- 1) Globalisasi dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah menyentuh pada seluruh aspek kehidupan termasuk, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga masalah pertahanan dan keamanan sehingga membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia baik ditingkat individu, kelompok masyarakat maupun negara. Fenomena ini membawa dampak positif maupun negatif yang sangat signifikan terhadap perkembangan lingkungan strategis. Kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, disamping memudahkan interaksi antar negara juga menghadirkan tantangan multidimensional yaitu munculnya ancaman baru melalui dunia maya (*cyber space*) yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Ancaman dunia maya (*cyber threat*) dapat bermotif kepentingan individu, kelompok maupun negara, yang sulit diantisipasi karena sifatnya yang *unconventional*, tidak mengenal front dan sasarannya sangat luas.
- 2) Persaingan antara AS dan China. Di tingkat global harus diakui bahwa persaingan AS-China sudah semakin tajam dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik dunia saat ini. Perkembangan ekonomi China yang sangat pesat dengan cadangan devisa mencapai 3.3 trilyun dolar Amerika, memungkinkan negara tersebut untuk melakukan investasi di banyak kawasan di dunia. Investasi China di negara-negara dunia lebih berorientasi pada bidang ekonomi ketimbang politik sehingga banyak memperoleh sambutan baik. Di lain pihak AS memberikan bantuan kepada negara lain selalu memiliki tujuan politik (demokratisasi dan HAM) sehingga banyak negara kurang simpati. Dibidang teknologi militer, China telah mencapai beberapa kemajuan termasuk diantaranya : penerbangan antariksa dengan awak dan tanpa awak telah memposisikan China sebagai negara ketiga setelah AS dan Rusia dalam misi ruang angkasa, satelit komunikasi terpadu (GPS versi China), peluncuran kapal induk China

pertama, teknologi Rudal balistik berjarak 2700 km, teknologi Rudal pembunuh kapal induk “*carrier-killer*” dan pesawat tempur siluman J-20 Chengdu. Keadaan ini sangat menjadi kekhawatiran AS dalam usaha mempertahankan posisinya sebagai kekuatan tunggal dunia (*single power*).

Dalam rangka mempertahankan hegemoninya, AS terus berusaha membendung pengaruh China di seluruh belahan dunia. Kekhawatiran AS terhadap pertumbuhan ekonomi China yang cenderung terus berkembang dan diperkirakan pada Tahun 2050 China akan menduduki peringkat pertama dunia baik secara ekonomi maupun militer telah mendorong kebijakan politik luar negeri AS untuk menerapkan *strategy containment*. Kerja sama militer pada tingkat bilateral maupun multilateral terus ditingkatkan diikuti dengan pengembangan kekuatan dan penambahan Komando Tempur di Afrika (US Africom) yang dirancang untuk mengimbangi pengaruh China di kawasan tersebut.

Sementara di kawasan Amerika Latin, penempatan pasukan AS di Colombia adalah dirancang untuk menciptakan ketegangan antara Colombia dengan Venezuela untuk memberikan justifikasi kehadiran militernya di kawasan, sekaligus dapat memantau dari dekat perkembangan Venezuela yang memiliki hubungan dekat dengan China. Masih berkaitan dengan kawasan Amerika Latin bahwa, kunjungan Presiden Obama ke Brasil memiliki tujuan antara lain untuk melobi Brasil agar tidak melakukan hubungan dagang dengan China.

Di kawasan Pasifik Selatan, AS telah meningkatkan kerja sama militernya dengan Australia yang ditandai dengan kunjungan Presiden Barack Obama dan sekaligus mengumumkan dibukanya pangkalan Marinir AS di Darwin pada bulan November 2011. Dr Rod Lyon dari *Australian Strategic Policy Institute* (ASPI) mengatakan bahwa kehadiran Marinir AS di Darwin adalah sebagai jawaban atas permintaan publik dan pemerintah Australia untuk merespon terhadap munculnya kekuatan baru di Asia. Dalam Buku Putih Australia menyatakan bahwa ancaman Australia yang aktual saat ini adalah China, berarti sudah semakin jelas bahwa Darwin Arrangement di design untuk menghadapi China. Kehadiran Hillary Clinton ke Myanmar, negara yang selama ini memiliki hubungan sangat dekat dengan China, merupakan pertanda meningkatnya hubungan bilateral AS-Myanmar. Perkembangan demokrasi Myanmar akan membuat negara tersebut semakin dekat dengan AS, dan berarti melemahnya pengaruh China. Menurunnya kepercayaan di Myanmar akan mengancam kepentingan China yang 20% energinya masuk melalui Myanmar.

Dari arah barat, AS terus berusaha mendekati India dan meningkatkan kerja sama militer termasuk menawarkan bantuan F-22 namun ditolak oleh India dengan alasan bahwa sudah terlebih dahulu memesan T-50 dari Rusia. Untuk meratakan jalan agar hubungan AS-India menjadi lebih mulus, Australia menawarkan untuk membuka kembali ekspor uranium ke India yang selama ini dihentikan, namun sekali lagi India menolak tawaran ekspor uranium dari Australia tersebut. Dalam hal ini India kelihatannya menunjukkan sikap netral dan tetap menjaga jarak dengan AS, walaupun sebenarnya hubungan India-China sendiri kurang begitu mesra karena masih adanya masalah perbatasan yang belum tuntas.

Di kawasan Asia Tenggara, AS melakukan hal yang sama dengan terus memelihara dan meningkatkan kerja samanya dengan negara-negara ASEAN antara lain; dengan Philipina (*revitalisasi Subic Bay*), Vietnam, Thailand dan Singapura (rencana menempatkan *Littoral Combat Ship*). Sedangkan di kawasan Asia Timur, AS tetap memperkuat kerja sama bilateralnya dengan Jepang dan Korea Selatan yang sudah dikenal sebagai sekutu dekatnya. Di Asia Tengah, dalam rangka mengimbangi keberadaan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) maka AS tetap akan mempertahankan keberadaan pangkalan militernya di Kirgizstan yaitu pangkalan yang semula digunakan untuk menghadapi perang di Afghanistan, berupaya mendapatkan akses atau kemudahan fasilitas untuk mendukung operasi militer di kawasan sekitarnya, dan memperkuat kehadiran pengaruhnya dengan membangun *military training center* di berbagai negara di Asia Tengah.

- 3) **Perekonomian Global.** Kondisi perekonomian global saat masih sangat dipengaruhi oleh keadaan menurunnya perekonomian Amerika dan Uni Eropa yang diawali dengan krisis utang di beberapa negara Eropa dan juga Amerika sendiri. Analisis ekonomi mengatakan bahwa tahun 2012 krisis tersebut masih berlangsung dan justru akan meluas ke Asia. *Uncertainty and instability in international financial, currency and commodity markets, coupled with doubts about the direction of monetary policy in some developed countries (US and Europe) could present considerable risks for the developing world.* Di awal Tahun 2012, krisis ini sudah dirasakan oleh China dan India yang keduanya mengalami penurunan ekonomi sangat signifikan. Menurunnya perekonomian negara-negara besar tersebut akan berdampak pada menurunnya permintaan komoditas ekspor dari negara-negara berkembang.
- 4) **Perubahan Iklim.** Dampak pemanasan global telah memunculkan fenomena perubahan iklim, mulai dari kenaikan

permukaan laut, cuaca ekstrim, penyakit baru, degradasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada terjadinya bencana alam. Lebih jauh fenomena cuaca ekstrim juga menyebabkan gagal panen yang berakibat pada menurunnya produksi pangan dunia. Kenaikan permukaan laut akan mengakibatkan hilangnya pulau-pulau kecil dan terjadi perubahan batas teritorial negara berpotensi menjadi sumber konflik. Dihadapkan dengan keadaan masih lambannya upaya global dalam menangani masalah pemanasan global, maka dampak perubahan iklim masih sangat berpotensi menimbulkan ancaman bagi manusia dimasa yang akan datang.

- 5) Keterbatasan Energi. Ledakan pertumbuhan penduduk dunia, laju perkembangan industri dan semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan energi dunia yang cenderung tidak terpenuhi. Selain faktor produksi yang semakin berkurang, ketersediaan minyak juga dipengaruhi oleh faktor lain termasuk gangguan transportasi, keadaan iklim, permainan spekulasi, dan terjadinya konflik dikawasan penghasil minyak yang dapat mengganggu produksi. Dengan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, ke depan diperkirakan minyak dan gas bumi, menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan. Hal yang sangat menimbulkan kekhawatiran dimasa mendatang adalah, ketika produksi minyak dan gas bumi jauh berada dibawah kebutuhan dunia, maka persaingan untuk memperebutan komoditi tersebut berpotensi menjadi penyebab konflik.
- 6) Isu Keamanan Non-Tradisional. Ancaman keamanan non-tradisional akan tetap menjadi ancaman nyata, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki sistem pengamanan/pengawasan cenderung masih lemah akibat rendahnya tingkat penguasaan teknologi. Ancaman dalam bentuk terorisme, penyelundupan senjata dan obat-obatan, penyelundupan manusia, dan pembajakan bersenjata tetap menjadi sumber gangguan keamanan internasional.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan pelaku kejahatan internasional memperlengkapi dirinya dengan sarana/alat berteknologi tinggi, serta memanfaatkan dunia maya sebagai medan operasinya sehingga sulit dihadapi. Isu keamanan non-tradisional lainnya yang menonjol adalah upaya non-proliferasi senjata pemusnah massal (WMD) yang ditempatkan sebagai salah satu isu krusial dalam permasalahan keamanan global. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga agar

senjata tersebut tidak jatuh ketangan pihak yang tidak dikehendaki, terutama kelompok teroris internasional.

b. Lingkungan Strategis Regional.

1) Kawasan Amerika. Dinamika politik dan keamanan di kawasan Amerika tetap dominan dipengaruhi oleh kebijakan AS yang merupakan kekuatan tunggal dunia saat ini. AS terus berusaha mengontrol perkembangan Brasil sebagai kekuatan baru (*emerging power*), dan tetap berusaha membendung meluasnya pengaruh China yang terus berusaha meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan beberapa negara di kawasan terutama Brasil, Venezuela dan Argentina. Perkembangan lain yang lebih menarik di kawasan Amerika di samping meningkatnya kehadiran China, adalah menguatnya hubungan Rusia dan Iran terhadap Venezuela dan Argentina. Kondisi ini akan mendorong kebijakan luar negeri AS untuk lebih fokus dan tetap memelihara kehadirannya di Amerika Latin dengan menempatkan pasukannya di Colombia.

2) Kawasan Eropa. Krisis utang yang terjadi di beberapa negara Eropa terus meluas dan mempengaruhi perekonomian Uni Eropa secara keseluruhan termasuk negara ekonomi kuat seperti Italia, Jerman dan Perancis. Kondisi ini menurut para pengamat ekonomi masih akan terus berlanjut pada tahun 2012 dan bahkan akan berpengaruh terhadap negara diluar kawasan. Penilaian ini diperkuat oleh pernyataan Perdana Menteri Inggris David Cameron bahwa tahun 2012 akan merupakan tahun paling berat. Akibat keterpurukan ekonomi Inggris telah melakukan pemotongan anggaran militer dan pengurangan personel militer mencapai 10.000 orang. Tindakan Inggris ini akan diikuti oleh negara-negara Eropa yang lain sehingga beban yang ditanggung oleh Inggris untuk mendukung operasi militer di Afghanistan menjadi semakin berat.

Potensi Rusia sebagai pemasok utama minyak dan gas bumi telah menjadikan negara tersebut bernilai sangat penting bagi perkembangan ekonomi Eropa. Kondisi ketergantungan tersebut mendorong perubahan sikap dan pendekatan Eropa, baik dalam tingkat Uni Eropa maupun NATO, dimana Rusia yang semula dianggap sebagai lawan saat ini Rusia lebih dianggap sebagai mitra baik secara ekonomi maupun militer. Namun perkembangan terakhir di selat Hormuz kewajiban Uni Eropa untuk mendukung kebijakan AS mengembargo minyak Iran akan memberatkan perekonomian Eropa mengingat 18% kebutuhan minyaknya disuplai oleh Iran.

3) Kawasan Afrika. Situasi keamanan di Afrika masih tetap diwarnai oleh kekerasan politik yang cenderung meningkat dalam bentuk kudeta, konflik bersenjata dan perang saudara,

seperti yang terjadi di Kongo, Lybia, Mesir, Sudan, Somalia dan Nigeria.

Perkembangan terbaru, fenomena menguatnya tuntutan pergantian rezim (*regime change*) di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang dimulai dari Tunisia telah meluas (*domino effect*) ke berbagai negara lain, seperti Aljazair, Yaman, Bahrain, Mesir, Algeria, Libya, Arab Saudi, Suriah, Maroko, dan kemungkinan besar masih terus meluas ke kawasan lain.

Upaya global mengatasi gangguan keamanan maritim di kawasan sekitar perairan Teluk Aden telah memaksa kelompok pembajak dan perompak mengalihkan wilayah operasinya ke arah timur Samudera Hindia. Aksi-aksi perompakan tersebut diperkirakan akan terus menjadi ancaman keamanan di masa mendatang, karena kemampuan pemerintah Somalia (*failed state*) untuk mengontrol wilayah tersebut sangat lemah. Keadaan ini telah dimanfaatkan oleh kelompok teroris lokal yang berafiliasi dengan Al Qaeda untuk mengembangkan aksinya dan terus menimbulkan gangguan keamanan di laut. Kasus sabotase, penculikan, pembunuhan terhadap warga asing, serta percobaan peledakan bom bunuh diri dan bom mobil seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Aljazair, Mauritania, Mali, Niger dan Maroko, merupakan indikasi menguatnya kekuatan dan penyebaran aktivitas terorisme di kawasan.

4) Kawasan Asia dan Australia.

- a) Sub-Kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara adalah tempatnya negara-negara yang hampir semuanya memiliki permasalahan batas wilayah yang masih belum dapat diselesaikan dan masih berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik. Sebagian besar negara-negara di kawasan masih memfokuskan perhatiannya pada masalah dalam negeri, menghadapi ancaman internal termasuk terorisme, separatisme, penyelundupan dan konflik komunal. Merebaknya isu perbatasan di kawasan Laut China Selatan atas kepulauan Spratly dan Paracel yang diklaim oleh China, Taiwan dan empat negara ASEAN, yaitu Vietnam, Malaysia, Philipina, serta Brunei masih belum dapat dituntaskan. Upaya ASEAN melalui kerja sama bilateral dan multilateral dalam kerangka ASEAN+China untuk mengatasi permasalahan tersebut berjalan sangat lambat.

Rivalitas AS-China di kawasan Laut China Selatan semakin menarik untuk dicermati. Bagi China, Laut China Selatan adalah sangat penting karena disamping menurut perkiraan memiliki deposit energi 28 milyar

barel minyak dan 266 trilyun kaki kubik gas, hampir 80% minyak China terutama dari Timur Tengah masuk melalui Laut China Selatan.

Lagipula untuk bisa menjadi *Great Power*, China harus memiliki akses laut, dan Laut China Selatan adalah satu-satunya yang paling mungkin dikuasai. Oleh sebab itu sampai kapanpun China akan tetap mengklaim Laut China Selatan dengan segala upayanya. Sikap agresif China ini memancing reaksi *claimant states* lainnya yaitu Vietnam, Philipina, Malaysia dan Brunei sehingga timbul ketegangan di kawasan.

Ketegangan di Laut China Selatan yang adalah jalur penting pelayaran internasional, telah mendorong *user states* lain terutama AS dan sekutunya untuk hadir dengan kekuatan militer. Bagi AS, pergeseran kekuatan militernya (*shifting of power*) ke wilayah Asia Pasifik, disamping untuk merespon agresifitas China, AS memandang kawasan Asia Pasifik sebagai wilayah tradisional penting pada masa lalu, sekarang dan masa mendatang. Oleh sebab itu penempatan Marinir di Darwin merupakan bagian dari siklus rotasional penempatan kekuatan untuk menghadapi ancaman sesuai hasil penilaian situasi global atas dasar kepentingan AS.

Beberapa pengamat memprediksi bahwa perang AS-China di Laut China Selatan memiliki probabilitas kecil. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Obama pada waktu berkunjung ke Australia, bahwa terhadap kegelisahan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Obama memastikan AS tidak ingin berkonfrontasi dengan China, melainkan akan terus berkompetisi sekaligus bekerja sama (*competition + cooperation*). Namun pendapat lain mengatakan bahwa konflik yang sangat mungkin terjadi di Laut China Selatan adalah perang antara China melawan Vietnam yang mendapat dukungan AS. Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat dari semua *claimant states*, hanya Vietnam yang memiliki kepentingan dengan masalah kedaulatan negara, sedangkan *claimant states* yang lain hanya berkaitan dengan klaim wilayah ekonomi.

Meningkatnya ketegangan AS-China di Laut China Selatan dipastikan akan berdampak pada integritas ASEAN. Negara-negara ASEAN akan terpolarisasi dan terpecah menjadi tiga yaitu kelompok dibawah pengaruh AS, kelompok dibawah pengaruh China dan kelompok netral. Perpecahan ASEAN juga akan disebabkan oleh

adanya perlombaan senjata (*armed race*) diantara negara-negara ASEAN sesuai dengan latar belakang negara yang menjadi pengaruhnya. Isu sensitif lain terutama masalah perbatasan antar negara yang belum selesai (*unresolved border issues*) bisa memperburuk hubungan diantara negara-negara ASEAN. Dengan demikian maka konsep ASEAN *Political Security Community* yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2015 dikhawatirkan sulit dicapai dan bahkan mungkin gagal.

Karena posisinya yang merupakan jalur laut vital, keamanan Selat Malaka menjadi sangat penting dan tidak pernah surut dari perhatian negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan terutama AS, Jepang, China, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut berusaha ikut campur dalam menjaga keamanan dan berusaha melibatkan kekuatan militernya dengan dalih pengamanan jalur navigasi internasional. Namun Indonesia dan Malaysia tetap menolak kehadiran militer asing di Selat Malaka dan berusaha menjamin keamanan jalur pelayaran tersebut dengan meningkatkan kerja sama dalam bentuk patroli laut terkordinasi yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Kedua faktor yaitu belum selesainya klaim perbatasan dan keberadaan jalur internasional di kawasan yang sangat strategis serta lemahnya sistem pengawasan menyebabkan timbulnya kerawanan terhadap kejahatan lintas negara (*transnational crimes*). Faktor lain yang juga perlu diperhitungkan adalah adanya keinginan beberapa negara yang berusaha terus meningkatkan pembangunan militer di kawasan terutama disebabkan oleh adanya ketegangan di Laut China Selatan.

- b) Sub-Kawasan Asia Tengah. Besarnya potensi kandungan minyak dan gas bumi (*proven reserves*) menyebabkan Asia Tengah menjadi arena perebutan pengaruh oleh AS, Rusia, dan China. Negara-negara di kawasan ini membentuk apa yang disebut *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) adalah organisasi untuk memecahkan masalah bersama dalam menghadapi pengaruh AS. Namun faktanya bahwa negara-negara di kawasan ini telah berhasil dipenetrasi oleh AS yang terbukti berhasil mempertahankan keberadaan pangkalan militernya di Kazakhstan dan Kirgizstan dengan dalih untuk menghadapi perang di Afghanistan

- c) **Sub-Kawasan Asia Selatan.** Pasang surut hubungan antara India dan Pakistan masih tetap mewarnai dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Selatan. Pembangunan kekuatan militer oleh kedua negara, termasuk dalam hal senjata nuklir, tidak adanya kemajuan dalam penyelesaian konflik Kashmir, meningkatnya aktivitas kelompok radikal dan aksi terorisme di Pakistan, merupakan faktor krusial yang menjadi penyebab terjadinya instabilitas di kawasan tersebut. AS memandang bahwa perkembangan kekuatan militer India sangat efektif dan dapat dimanfaatkan untuk membendung pengaruh China dari arah barat.
- d) **Sub-Kawasan Asia Barat.** Kekerasan politik, terorisme, pemberontakan bersenjata dan konflik-konflik lain yang mengarah kepada terjadinya kemungkinan perang saudara masih tetap mewarnai situasi keamanan di sub-kawasan Asia Barat. Masalah program nuklir Iran yang sangat kontroversi dan ditentang oleh Barat terus menjadi agenda internasional yang belum menunjukkan kemajuan berarti dan justru memperuncing pertentangan antara Rusia dan China melawan AS dan Uni Eropa. Konflik Arab-Israel masih belum menunjukkan adanya kemajuan dan tetap menjadi sumber ketegangan.
- e) **Sub-Kawasan Asia Timur.** Perkembangan kekuatan ekonomi yang semakin pesat dan kemajuan teknologi militer China yang sangat spektakuler telah menarik perhatian AS dan negara-negara di kawasan Asia Timur terutama Jepang dan Korea Selatan. Masih belum tercapainya usaha perdamaian di Semenanjung Korea termasuk isu nuklir Korea Utara, dan belum teratasinya masalah sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dengan China masih berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik di kawasan.

Arogansi China sebagai negara maju yang perekonomiannya mencapai 13% membawa China sebagai negara yang mendapat perhitungan dari negara AS dan negara maju lainnya. Sehingga campur tangan China didalam mengatasi konflik dunia dan menambah permasalahan besar seperti yang terjadi pada konflik di Laut China Selatan, konflik semenanjung Korea Selatan dan Utara, konflik China dengan Jepang akan membawa permasalahan baru dimasa yang akan datang.
- f) **Sub-Kawasan Australia dan Oseania.** Sebagai sekutu utama AS di kawasan, Australia tetap memainkan peran

yang sangat penting dalam mengendalikan dinamika politik dan ekonomi di kawasan. Namun karena posisinya yang cenderung sebagai “*sheriff*” AS di kawasan Asia Pasifik menyebabkan Australia tidak memiliki sikap yang jelas. Australia selalu menempatkan kepentingan AS di atas kepentingan lain di kawasan dan bahkan demi mendukung *policy* AS rela mengorbankan kepentingan nasionalnya. Di samping itu, Australia sulit untuk menjadi bagian dari Asia, karena Australia adalah “negara barat” di Asia yang memiliki ciri-ciri budaya barat yang sangat berbeda dengan Asia.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam rangka perang melawan terorisme dan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, Australia tetap menerapkan doktrin *pre-emptive strike*, yang tentunya sangat mengancam kedaulatan negara lain di kawasan.

Keberadaan kelompok pelarian separatis Papua di Australia yang memperoleh simpati dari sebagian rakyatnya serta adanya sekelompok negara di kawasan Pasifik Selatan yang masih memberikan dukungan terhadap gerakan separatis di Papua melalui Ikatan *Melanesian Brotherhood* berpengaruh terhadap kenyamanan Indonesia.

Di lain pihak dengan telah dikeluarkannya *Defence Acquisition Policy* Australia yang merancang sedemikian rupa yang dapat meningkatkan kapabilitas angkatan bersenjata dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan prinsip-prinsip pertahanan Australia. Rencana tersebut dituangkan dalam rencanya untuk mengakusisi pesawat tempurnya dari F-111 ke F/A-18E/F Superhornet (hingga 2020) dan seratus unit *Joint Strike Fighter* (JSF) F-35 *Lightning* (hingga 2030) serta kesiapan Australia untuk membangun kapal selam buatan sendiri sejumlah 12 unit (1 skadron) hingga tahun 2012 merupakan contoh konkrit dari implementasi strategi pertahanan Australia ke depan.

c. Lingkungan Strategis Nasional

- 1) Ideologi. Kebebasan kehidupan beragama di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai aksi tindak kekerasan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilindungi oleh Undang-undang, hingga saat ini belum tercapai. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi berupa intimidasi, intoleransi, pelarangan aktifitas keagamaan, pelarangan pendirian tempat ibadah, pembiaran terjadinya pelanggaran, penyesatan aliran keagamaan dan lain sebagainya.

Bahkan tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh seorang kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota yang mengeluarkan SK terkait kebebasan beragama di beberapa daerah. Tercatat ada 18 kebijakan yang dilakukan gubernur yang menyatakan suatu aliran keagamaan sesat dan 13 kebijakan yang diambil oleh bupati/walikota.

Sebagai contoh, Walikota Bogor memilih untuk tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan tetap melarang pembangunan gereja GKI Yasmin di Bogor, padahal sudah memenuhi semua syarat dan bahkan tokoh agama setempat sudah setuju. Kekerasan yang lain adalah, tindakan penyerangan dan pembakaran oleh sekelompok massa terhadap Pondok Miftahulhuda pada tanggal 29 Desember 2011 di Kabupaten Sampang, Madura. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya gerakan radikal di masyarakat yang mengangkat isu-isu SARAT (suku, agama, ras, antar golongan dan tanah) berpotensi memicu terjadinya konflik yang lebih luas. Orang dari suku Jawa yang bekerja di Aceh berbondong-bondong meninggalkan Aceh karena takut menjadi korban penembakan seperti yang terjadi sebelumnya.

- 2) Politik. Perkembangan politik nasional diwarnai dengan terjadinya unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia yang menuntut Reformasi Agraria, penuntasan kasus pertanahan, mendesak pemerintah untuk menghentikan perampasan tanah rakyat dan pengembalian tanah milik rakyat yang dikuasai perusahaan. Konflik perebutan hak atas tanah telah menimbulkan korban jiwa di pihak rakyat, sebagai contoh adalah insiden Mesuji dan Bima, NTB. Aksi unjuk rasa dan protes dari masyarakat adalah merupakan respon terhadap penegakan hukum yang tidak adil dan kurang berpihak kepada rakyat. Menjadi lebih parah ketika aparat Kepolisian dalam merespon masalah tersebut bertindak represif dan brutal serta tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menimbulkan korban.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai penjabaran praktek pemerintahan demokrasi masih banyak mengalami penyimpangan disebabkan oleh belum siapnya infrastruktur dan rendahnya kualitas pemahaman tentang demokrasi sehingga timbul konflik di beberapa daerah. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri bagi daerah telah terjadi banyak penyimpangan. Akibat dari Otda tersebut Pemerintah daerah berlomba untuk mengolah segenap sumber daya di wilayahnya tanpa memperhatikan kondisi masyarakat. Demi mengejar PAD, pemerintah daerah dapat dengan mudah mengeluarkan SK. Akumulasi

kekecewaan rakyat sangat mungkin memicu terjadinya kerusuhan social yang pada sekala besar dapat mengancam keselamatan negara.

- 3) Ekonomi. Resesi ekonomi yang melanda sebagian belahan dunia khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika, berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional Indonesia. Dampak perubahan iklim yang menyebabkan timbulnya cuaca ekstrim mengakibatkan terjadinya curah hujan tinggi, kekeringan, hama tanaman berakibat pada terjadinya gagal panen. Berubahnya lahan pertanian menjadi perumahan penduduk, dan berubahnya fungsi irigasi menjadi persediaan air minum juga menjadi penyebab turunnya produksi pangan. Ketergantungan pangan Indonesia pada negara tertentu (terutama beras, gandum, gula dan kedelai) sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Tahun lalu harga pangan dunia melonjak sangat tinggi sehingga mendorong laju inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat terbukti telah mengakibatkan *social unrest* dan Arab Spring di Afrika Utara dan tentunya hal ini juga bisa terjadi di Indonesia apabila tidak ada antisipasi.

- 4) Sosial Budaya. Globalisasi yang diikuti dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadikan kehidupan manusia sangat tergantung pada internet/komputer. Semua layanan publik termasuk pajak, perbankan, transaksi perdagangan dan hampir semua kehidupan menggunakan media internet. Ketergantungan kepada internet (dunia maya) ini telah menimbulkan suatu bentuk ancaman baru yang disebut dengan ancaman dunia maya.

Kemajuan teknologi dan komunikasi juga mendorong masuknya arus informasi dan nilai-nilai, baik positif maupun negatif dengan cepat sehingga masyarakat menjadi semakin kritis dalam menyikapi setiap masalah yang berkembang. Instabilitas politik, masalah kesenjangan sosial, kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan yang ditayangkan setiap saat di media masa dengan cepat ditangkap dan disimpulkan oleh rakyat sesuai dengan kepentingan masing-masing dan ada kalanya bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Pendapat-pendapat media yang lebih banyak menyudutkan posisi pemerintah dengan cepat direspon oleh masyarakat sehingga rakyat mudah dipengaruhi untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.

Nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berpotensi mendorong berkembangnya sikap intoleransi dikalangan masyarakat sehingga mudah memicu terjadinya konflik komunal yang dapat berkembang menjadi

konflik SARA. Disamping itu pengaruh nilai-nilai asing tersebut juga mendorong berkembangnya sikap hidup konsumerisme di kalangan masyarakat Indonesia.

Hal yang tidak kalah penting adalah masalah tanah. Konflik keagrariaan saat ini adalah konflik laten yang sudah lama dan telah terjadi sebelum kemerdekaan, pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, zaman revolusi, orde lama, orde baru dan zaman reformasi. Pada perkembangan terakhir diketahui bahwa terjadinya konflik agraria disebabkan oleh adanya tumpang-tindih peraturan yang terkait dengan peruntukan dan status kepemilikan. Adapun bentuknya antara lain konflik antar masyarakat, konflik masyarakat dengan pemerintah atau pihak ketiga (perusahaan), klaim tumpang-tindih peruntukan terhadap obyek tanah yang sama oleh kehutanan, pertanian, tambang, dan hak ulayat (adat).

Komplikasi politik dan hukum keagrariaan, *Jungle of Regulation*, Kesenjangan pengaturan pertanahan untuk masyarakat, ketidakselarasan hukum publik dengan hukum perdata ke agrariaan, tumpang tindih dan tarik menarik penanganan konflik agraria serta masih belum memudahinya pengaturan hukum konflik ke agrariaan antar sektor menjadi penyebab utama dalam konflik agraria. Sementara persoalan kehutanan yang ada adalah terjadi keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan.

Letak geogafis Indonesia yang berada di pertemuan antara lempeng Australia dan Asia dan posisinya pada *ring of fires*, mengakibatkan Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Di sisi lain, karena akibat kerusakan lingkungan beberapa wilayah Indonesia sangat rawan bencana alam banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung.

- 5) Pertahanan dan Keamanan. Ide separatis di Indonesia masih eksis terutama di Papua, Ambon dan bahkan di Aceh. Secara militer gerakan separatis sangat lemah dan hampir tidak berpengaruh, namun secara politik manuver-manuver mereka masih sangat efektif. Dengan memanfaatkan mediamasa dan teknologi informasi yang canggih kelompok separatis dapat dengan mudah mengangkat isu-isu lokal menjadi isu internasional. Lepasnya Timor-Timur dan hilangnya Pulau Sipadan/Ligitan adalah bukti kekalahan kita dalam *cyber war* dimana lawan dengan sangat sistimatis dan terstruktur menyampaikan pesan-pesan ke dunia internasional melalui TV, Internet dan media lainnya sehingga terbentuk opini internasional yang menguntungkan lawan dan merugikan kepentingan Indonesia.

Ide separatisme sempat meredup, namun seiring dengan kurangberhasilan pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan penegakan hukum ide separatis mulai diangkat kembali dan dikemas dalam bentuk lain untuk bisa menarik perhatian masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Selama pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan belum mampu meningkatkan kesehatan, pendidikan serta menghargai nilai-nilai demokrasi, HAM dan lingkungan hidup, maka persoalan separatis masih akan tetap menjadi sebuah ancaman.

Terorisme dan Radikalisme akhir-akhir ini telah menjadi isu tidak hanya dalam lingkup nasional bahkan menjadi isu global yang menjadi atensi seluruh negara. Penyebab terjadinya terorisme bersifat multidimensional dan bermuara pada isu sentral ketidakadilan dalam penegakan hukum, kemiskinan, keterbelakangan dan tingkat pendidikan yang rendah, perasaan termarginalisasi sekelompok masyarakat, adanya ideologi-ideologi ekstrim/radikal. Dipahami bahwa terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, resah, panik yang luar biasa terhadap kehidupan umat manusia, kemanusiaan dan atau masyarakat, karena didalamnya sarat dengan kekejaman.

Terorisme erat kaitannya dengan radikalisme. Radikalisme adalah faham yang berbasis pada keyakinan yang mengakar kuat pada kebenaran subjektif terhadap sesuatu ajaran, dogma, dan pemahaman agama tertentu yang terekspresi sebagai fanatisme sempit serta fundamentalisme. Untuk memperjuangkan dan mempertahankannya dilakukan melalui pemaksaan, kekerasan dan kekejaman yang luar biasa. Faktor pendorong radikalisme adalah kekesalan mendalam yang menyakitkan, puncaknya menghasilkan pergulatan antara logika, keyakinan, kekuatan diluar nalar dan tindakan kekerasan serta kekejaman yang diyakini sebagai perintah magis.

Jaringan teroris masih tetap eksis di Indonesia, menunjukkan bahwa rekrutmen dan kaderisasi kelompok teroris secara intensif masih terus berlangsung. Kelompok teroris cukup berhasil dalam merekrut anggota-anggota baru, sehingga berbagai penangkapan belum cukup untuk mematahkan ancaman terorisme di tanah air. Penyebab lain adalah kondisi keterbatasan pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat terutama kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang masih belum memadai. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi teroris untuk mengambil alih peran pemerintah dalam menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan sehingga rakyat bersedia untuk mengikuti ajakan dan loyal kepada organisasi teroris.

Luasnya wilayah yurisdiksi nasional belum diimbangi dengan kekuatan pengamanan dan pengawasan yang memadai akan berpotensi terjadinya berbagai gangguan keamanan baik di darat, laut maupun udara nasional. Belum selesainya sebagian besar permasalahan perbatasan Indonesia dengan wilayah negara tetangga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah dan bisa sangat memungkinkan berkembang menjadi konflik antar negara dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi maka akan terjadi perang. Ketidakpastian hukum di wilayah perbatasan yang masih dinyatakan sengketa menyebabkan lemahnya pengawasan sehingga rawan terhadap kejahatan internasional.

Belum dapat dituntaskannya persoalan batas wilayah dengan sejumlah negara tetangga berpotensi menjadi penyebab terjadi konflik tradisional yang dapat berkembang menjadi konflik antar negara. Indonesia tercatat masih memiliki sengketa perbatasan dengan negara tetangga baik batas wilayah laut maupun batas wilayah daratan yang diperkirakan tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Sementara meningkatnya ketegangan politik di kawasan Laut China Selatan antara AS dengan China akan berimplikasi terhadap keamanan ASEAN termasuk Indonesia.

Penempatan Marinir AS di Darwin, Australia apabila tidak diimbangi dengan sikap proaktif melalui peningkatan kerja sama akan berimplikasi negatif terhadap keamanan Indonesia. Sikap politik Australia yang memiliki hubungan sangat dekat dengan AS, tidak menguntungkan Indonesia, karena hubungan baik antara kedua negara dapat dengan cepat berubah menjadi sebaliknya. Pada tahun 1999 Australia memimpin *INTERFET* masuk ke Timor-Timur dengan segala rencana kontinjensinya, tanpa mempertimbangkan keberadaan *Security Agreement* yang telah disepakati dengan Indonesia pada tahun 1995. Melihat pengalaman tersebut maka kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya bahwa Australia akan menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua.

3. Perkembangan Kekuatan Militer di Sejumlah Negara.

a. Amerika Serikat.

- 1) Anggaran. Dalam dua puluh tahun terakhir anggaran pertahanan AS merupakan yang terbesar di dunia. Setiap tahunnya sejak era perang dingin, rata-rata anggaran pertahanan AS mencapai 45% dari total anggaran pertahanan dunia. Tren ini terus bertahan hingga tahun 2011 dengan

rata-rata persentase dari GDP AS sebesar 4,8%. Namun seiring dengan dampak krisis ekonomi global, dan tekanan dalam negeri untuk menekan defisit anggaran dan hutang AS yang mencapai USD 14 triliun, anggaran pertahanan negara tersebut diperkirakan akan mengalami penyusutan untuk beberapa tahun ke depan.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|--|-----------------------|
| 2008 | 618,9 | |
| 2009 | 668,6 | |
| 2010 | 687,1 | |
| 2011 | 708,3 | (request for FY 2011) |

- 2) **Personel.** Total kekuatan militer AS adalah 1.580.255 personel aktif, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 662.232 personel, Angkatan Laut sebanyak 335,82 personel, Angkatan Udara sebanyak 334.342 personel, Marinir sebanyak 204.261 personel, dan Penjaga Pantai sebanyak 43.598 personel. Sementara itu, personel sipil sebanyak 11.035 orang dan komponen cadangan sebanyak 864.547 orang.
- 3) **Alutsista.** Alutsista AS seluruhnya merupakan produk industri pertahanan domestik, meskipun terdapat sejumlah komponen yang diimpor ataupun merupakan lisensi dari negara-negara Eropa. Industri pertahanan AS masuk dalam kategori *full-spectrum arms producers*.

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 5.850 | |
| Kendaraan Infanteri | 26.089 | |
| Pesawat Tempur | 3.757 | |
| Helikopter | 3.877 | |
| Kapal Selam | 71 | |
| Kapal Perang | 110 | |

Sejumlah program pengadaan Alutsista AS mengalami penyesuaian akibat pengetatan anggaran. Program untuk beberapa tahun ke depan diantaranya adalah :

- a) Percepatan program F-35 JSF.
- b) Penundaan rencana untuk membuat pembom jarak jauh hingga ada kajian tentang urgensi operasional.
- c) Penghentian akuisisi kapal perusak Rudal DDG-1000 hingga tiga kapal dan memperpanjang masa operasional kapal perusak Rudal DDG-51.
- d) Pembatalan program pengembangan satelit transformational.
- e) Penghentian akuisisi pesawat tempur F-22 Raptor dan C-17 Globemaster.
- f) Pengurangan pengoperasian kapal induk dari 11 menjadi 10 pada Tahun 2040.
- g) Pengurangan fitur *multiple kill* dalam program pertahanan anti-Rudal.

b. China.

- 1) Anggaran. Seiring dengan kemajuan mengagumkan perekonomiannya, anggaran pertahanan China meningkat setiap tahunnya. Dalam dua dekade terakhir, anggaran pertahanan China meningkat enam kali lipat, dari USD 17.200 miliar pada tahun 1990 menjadi USD 114.300 milyar. Untuk Tahun 2010 saja, peningkatan anggaran pertahanan China mencapai 7,5% dari tahun sebelumnya. Sejumlah kalangan menilai bahwa jumlah riil anggaran pertahanan China dapat lebih besar dari data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah China.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|--|-----------------------------|
| 2008 | 92,7 | |
| 2009 | 110,1 | |
| 2010 | 114,3 | 2,1 % dari GDP |
| 2011 | 91,5 | (versi pemerintah China) |

- 2) **Personel.** Total kekuatan militer China adalah 2.285.000 personel aktif, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 1.600.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 255.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 330.000 personel, Pasukan Rudal Strategis sebanyak 100.000 personel, dan paramiliter sebanyak 660.000 personel. Sementara itu, personel sipil sebanyak 11.035 orang dan komponen cadangan sebanyak 864.547 orang. Sedangkan kekuatan cadangan China sebanyak 510.000 orang.
- 3) **Alutsista.** Militer China (*People's Liberation Army/PLA*) tengah melaksanakan transformasi secara komprehensif kekuatan militer dalam jumlah besar yang ditujukan untuk perang berkepanjangan (*protracted wars*) di dalam wilayahnya ke kekuatan militer yang mampu bertempur dan memenangkan pertempuran singkat, konflik intensitas tinggi di sekitar wilayahnya terhadap musuh yang memiliki kemampuan teknologi yang jauh lebih canggih dari negara tersebut.

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 7.550 | |
| Kendaraan Infanteri | 4.140 | |
| Pesawat Tempur | 1.653 | |
| Helikopter | 620 | |
| Kapal Selam | 65 | |
| Kapal Perang | 80 | |

Fokus pengembangan postur militer dan pengadaan Alutsista China terkait dengan strategi *anti-access*, *area denial* dan *military power projection*. Saat ini China mulai mampu memproduksi sejumlah Alutsista modern, meskipun belum menguasai aspek produksi Alutsista secara keseluruhan, dalam hal ini sejumlah subsistem masih tergantung dari produk negara lain. Menyadari hal ini, China berupaya meningkatkan penguasaan teknologi dengan *reverse engineering* dan meniru desain Alutsista yang dibeli dari negara lain dibandingkan dengan memulai program pengembangan dari awal. Sejumlah program pengadaan Alutsista China dalam beberapa tahun ke depan adalah :

| JENIS ALUTSISTA | TIPE | KETERANGAN |
|-------------------------|---|---|
| Senjata strategis | Senjata anti-satelit (ASAT); satelit navigasi Beidou-2/Compass; senjata elektromagnetik; penambahan Rudal balistik antarbenua DF-31A, Rudal SLBM JL-2 | Peluncuran satelit navigasi untuk mengurangi ketergantungan militer China pada sistem navigasi GPS milik AS dan GLONASS milik Rusia |
| Kapal induk | 1 Varyag (Shi Lang) | Setelah sebelumnya berencana membeli pesawat tempur Su-33 dari Rusia, China berencana memproduksi sendiri pesawat tempur kapal induk J-15. |
| Kapal selam | 1 <i>Jin Class</i> (kapal selam Rudal balistik) termasuk dengan JL-2 SLBM | Rudal JL-2 dilaporkan masih dalam proses penyempurnaan dan sejumlah ujicoba; dengan penambahan satu kapal ini China akan mengoperasikan 2 kapal selam tipe ini. |
| Kapal perang permukaan | Kapal perusak Rudal Type-052C dan kapal frigat Rudal multimisi Type-054A | Belum diketahui jumlah pengadaan, namun dengan rencana pengoperasian kapal induk, besar kemungkinan tuntutan pengadaan dua jenis kapal ini akan semakin meningkat |
| Sistem pertahanan udara | HQ-9/10 long range SAM | Merupakan produksi dibawah lisensi dari Rudal SAM S-300 buatan Rusia dan pada beberapa varian terdapat peningkatan kemampuan; varian |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | | HHQ-9 dipasang pada tabung peluncur vertikal di sejumlah kapal perusak China. |
| Rudal taktis | Rudal balistik anti-kapal DF-21D | Diperkirakan Rudal ini ditargetkan untuk melawan gugus tugas kapal induk AS di kawasan Pasifik. |
| Sistem C4ISR modern | Sensor di luar angkasa dan peralatan sensor dengan kemampuan mengidentifikasi melampaui garis pandang visual (OTH), pesawat AEW/C KJ 2000 | Diperkirakan pengadaan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi China terhadap aktivitas militer hingga ke kawasan Pasifik Barat. |
| Pesawat tempur | J-10B, J-20 (<i>prototype</i>) | J-20 merupakan pesawat tempur generasi kelima buatan China yang diperkirakan akan sekelas dengan F-22 Raptor; J-10B akan menggunakan radar AESA dan mesin jet buatan China yang mengindikasikan pencapaian kemajuan dalam industri pertahanan China |
| Kendaraan tempur | Varian MBT T-99 | Dikarenakan biaya produksi yang tinggi, diperkirakan dalam waktu dekat tidak diakuisisi dalam jumlah besar |

c. India.

- 1) Anggaran. Merespon perkembangan militer China, India juga secara konsisten meningkatkan besaran anggaran pertahanannya dengan rata-rata persentase sekitar 2,5-3% dari GDP. Untuk Tahun 2011, anggaran pertahanan India meningkat sebesar 11,6% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan adanya percepatan pembelian Alutsista yang telah direncanakan, khususnya pembelian 126 pesawat tempur pada tahun 2011. Sekitar 50% dari anggaran Tahun 2011 dialokasikan untuk pembelian Alutsista baru.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|--|-----------------|
| 2008 | 32,1 | |
| 2009 | 35,8 | |
| 2010 | 34,8 | (2,7% dari GDP) |
| 2011 | 36,3 | (2,8% dari GDP) |

- 2) Personel. Total personel aktif militer India adalah 1.325.000 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 1.129.900 personel, Angkatan Laut sebanyak 58.350 personel, Angkatan Udara sebanyak 127.200 personel. Kekuatan paramiliter India sebanyak 1.300.586 personel. Sedangkan kekuatan cadangannya sebanyak 1.155.000 orang.
- 3) Alutsista. Secara umum India masih tergantung pada pasokan Alutsista luar negeri, khususnya Rusia, meski sudah mendapat lisensi untuk produksi pesawat SU-30, tank T-90 Bishma, dan sudah mampu memproduksi Rudal jarak jauh Brahmos atas kerja sama dengan Rusia.

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 4.047 | |
| Kendaraan Infanteri | 1.882 | |
| Pesawat Tempur | 643 | |
| Helikopter | 336 | |

| | | |
|--------------|----|--|
| Kapal Selam | 17 | |
| Kapal Perang | 20 | |

Dalam pengadaan Alutsista, saat ini India tengah gencar menjalin kerja sama dengan Rusia. Sejumlah program pengadaan Alutsista India untuk beberapa tahun ke depan adalah :

| JENIS ALUTSISTA | TIPE | KETERANGAN |
|-----------------|--|---|
| Kapal induk | 1 Vikramaditya (<i>Admiral Goskhov Class</i>) | Merupakan modifikasi dari kapal induk kelas Kiev buatan Rusia; sedang dikerjakan di Ukraina dan ditargetkan akan diserahkan pada Tahun 2011 |
| Pesawat tempur | 126 unit MRCA (<i>Multy Role Combat Aircraft</i>); T-50 PAKFA (<i>prototype</i>); Su-30 MKI (diproduksi di India dengan lisensi dari Rusia); 45 MiG-29K (varian kapal induk dari MiG-29) | MRCA masih dalam proses penentuan dari kandidat yang mengajukan proposal; T-50 PAKFA merupakan pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan bersama HAL India dan Sukhoi UAC Rusia; sampai dengan Mei 2011 dilaporkan India telah menerima 9 unit MiG-29K |
| Pesawat angkut | Pesawat angkut menengah dengan daya angkut 20 ton | Sedang dikembangkan bersama dengan Rusia |
| | | |
| Helikopter | 80 Mi-17 Hip | |
| Sistem C4ISR | Phalcon AWACS, pesawat nir-awak, 5 unit <i>aerostat</i> | |

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| | <i>programmable radar</i> | |
| Tank dan kendaraan tempur | MBT T-90S Bishma | Merupakan MBT T-90 yang diproduksi di India dibawah lisensi |

d. Rusia.

- 1) Anggaran. Anggaran pertahanan Rusia pada permulaan setelah pecahnya Uni Soviet relatif tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan, bahkan cenderung menurun. Namun sejak tahun 2000, anggaran pertahanan Rusia secara perlahan meningkat, dari USD 25,9 milyar pada tahun 2000 menjadi 52,5 milyar pada tahun 2010. Untuk tahun 2011, anggaran pertahanan Rusia semakin meningkat tajam. Dan untuk satu dekade ke depan, pemerintah Rusia telah mengalokasi anggaran sebesar USD 730 miliar untuk memodernisasi persenjataan kekuatan militernya.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 2008 | 50,9 | |
| 2009 | 53,3 | |
| 2010 | 52,5 | (2,6% dari GDP) |
| 2011 | 63,0 | (2,9% dari GDP) |

- 2) Personel. Total personel aktif militer Rusia adalah 1.027.000 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 360.000 personel, Lintas Udara sebanyak 35.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 142.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 160.000 personel, Pasukan Penangkal Strategis sebanyak 80.000 personel (pasukan pendukung sebanyak 250.000 personel). Kekuatan paramiliter Rusia berjumlah 449.000 personel. Sedangkan kekuatan cadangan Rusia sebanyak 20.000.000 orang.
- 3) Alutsista. Meski telah mampu memenuhi kebutuhan militer secara mandiri, saat ini sejumlah sub-sistem Alutsista buatan Rusia berasal dari luar negeri. Saat ini, Rusia menghadapi krisis Alutsista modern, sehingga tengah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan persentase Alutsista modern menjadi 30 persen pada tahun 2015 dan ditingkatkan menjadi 70 persen pada tahun 2020.

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 23.150 | |
| Kendaraan Infanteri | 27.080 | |
| Pesawat Tempur | 1.935 | |
| Helikopter | 1.526 | |
| Kapal Selam | 66 | |
| Kapal Perang | 57 | |

Sejumlah rencana pengadaan Alutsista Rusia dalam beberapa tahun ke depan sebagai berikut :

| JENIS ALUTSISTA | TIPE | KETERANGAN |
|--------------------------|--|---|
| Kapal perang | 4 LHD Mistral Class | Dalam proses negosiasi; dari empat unit Rusia ingin memproduksi dua unit di Rusia. |
| Senjata strategis | 30 Rudal Balistik Topol; Bulava SLBM; peluncur luar angkasa; 6 satelit | Rudal Balistik Topol dalam proses produksi dan sejumlah unit telah dikirim; Bulava SLBM diperkirakan masih banyak masalah teknis meskipun dalam ujicoba terakhir Rusia mengklaim keberhasilan ujicoba Rudal ini |
| Sistem pertahanan udara | <i>Buk M-3 dan Tor M-2</i> | |
| Pesawat pembom strategis | Peningkatan kemampuan unit pengebom strategis (Tu-95C, Tu-160, Tu- | <i>Upgrade meliputi penambahan kemampuan merilis bom konvensional dan</i> |

| | | |
|------------------|---|---|
| | 22 M3 dan Il-78) | peningkatan jarak jelajah |
| Pesawat tempur | 24 MiG-29SMT, 2 Su-34, 4 Su-30 MK2, 48 Su-35S dan MiG-35C; kerja sama pengembangan pesawat tempur generasi kelima T-50 PAKFA dengan India | 4 Su-30 MK2 awalnya dibuat untuk China, 24 MiG-29SMT sebelumnya untuk ekspor ke Aljazair namun dikembalikan karena cacat produksi |
| Helikopter | Mi-28 <i>Night Hunter</i> dan Ka-52 <i>Alligator</i> | Untuk menggantikan Mi-24 |
| Pesawat angkut | Il-112B dan pesawat angkut menengah | pesawat angkut menengah dengan kapasitas angkut 20 ton tengah dikembangkan Rusia bersama dengan India |
| Kendaraan tempur | 63 MBT T-90 dan 300 Ranpur lapis baja | |

e. **Australia**

- 1) **Anggaran.** Anggaran pertahanan Australia secara perlahan mengalami peningkatan sejak dikeluarkan buku putih pertahanan 2005 (*defence update 2005*) yang menargetkan pembangunan kekuatan pertahanan negara tersebut seiring dengan pesatnya pembangunan kekuatan militer di Asia Pasifik. Dalam buku putih 2009 (*Defending Australia in Asia Pacific Century : Force 2030*), target postur militer Australia mengalami peningkatan.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 17,6 | |
| 2009 | 18,9 | |
| 2010 | 19,7 | |
| 2011 | 22,0 | |

- 2) **Personel.** Total personel aktif militer Australia adalah 54.747 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 27.461 personel, Angkatan Laut sebanyak 13.230 personel, dan Angkatan Udara sebanyak 14.056 personel. Sedangkan kekuatan cadangan Australia sebanyak 19.915 orang.
- 3) **Alutsista.** Hingga tahun 2030, Australia melakukan pembangunan postur militer yang cukup agresif, sebagaimana dituangkan dalam buku putih 2009 (*Defending Australia in Asia Pacific Century : Force 2030*).

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 149 | |
| Kendaraan Infanteri | 1.728 | |
| Pesawat Tempur | 119 | |
| Helikopter | 172 | |
| Kapal Selam | 6 | |
| Kapal Perang | 12 | |

Rencana program pengadaan Alutsista Australia hingga tahun 2030 adalah sebagai berikut :

| JENIS ALUTSISTA | TIPE | KETERANGAN |
|-----------------|---|---|
| Kapal perang | 3 Kapal perusak Rudal kelas <i>Hobart</i> , 4 kapal frigat kelas <i>Adelaide</i> ; 2 LHD kelas <i>Canberra</i> ; LSD kelas <i>Bay</i> ; | Australia mengambil basis dari hull kapal perang buatan Spanyol untuk program pengadaan kapal perang masa depan ini |
| Kapal selam | Peningkatan kemampuan 6 kapal selam Kelas <i>Collins</i> ; | Rencana pengembangan kapal selam baru yang akan dibeli sebanyak 6 unit |
| Pesawat tempur | Turut dalam program pesawat tempur modern multinasional | Australia berencana membeli F-35A <i>Lightning II</i> sebanyak |

| | | |
|---|---|--|
| | <i>Joint Strike Fighter</i> ; 24 <i>F/A-18F Super Hornet</i> | 100 unit; dari pesawat <i>F/A-18F</i> beberapa akan dilengkapi dengan kemampuan perang elektronik |
| Helikopter | 22 <i>AS-665 Tiger</i> ; 40 <i>MRH-90 TTH</i> , 7 <i>CH-47 Chinook</i> | Australia berencana mengganti armada helikopter <i>AL</i> dengan 24 helikopter baru yang dalam kajian antara <i>NH-90 NFH</i> atau <i>MH-60R Seahawk</i> |
| Kendaraan tempur | Upgrade 431 ranpur <i>M113</i> ke varian <i>M113AS3/4</i> | |
| Pesawat angkut dan tanker | 10 pesawat angkut taktis <i>DHC-4 Caribou</i> ; 5 pesawat tanker <i>KC-30A MRTT</i> ; rencana penambahan 2 pesawat angkut <i>C-130J</i> | |
| Pesawat patroli maritim dan peringatan dini | Kemungkinan 8 pesawat <i>MPA P-8 Poseidon</i> ; 6 pesawat <i>AEW/C Boeing 737 Wedgetail</i> | Australia berkontribusi dalam program pengembangan <i>P-8 Poseidon</i> namun belum berkomitmen untuk membeli pesawat ini |

f. Jepang

- 1) Anggaran. Anggaran pertahanan Jepang relatif tidak mengalami perubahan sejak beberapa Tahun terakhir. Seiring dengan pergeseran kebijakan dan postur pasukan bela diri, porsi anggaran meningkat tetapi tidak signifikan. Untuk periode 2011-2015, anggaran pertahanan Jepang telah ditetapkan sebesar 23,49 triliun Yen atau setara dengan USD 281,48 milyar.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|--|------------|
| 2008 | 50,2 | |
| 2009 | 51,0 | |
| 2010 | 51,4 | |
| 2011 | 70,5 | |

- 2) **Personel.** Total personel pasukan bela diri (PBD) Jepang adalah 230.300 orang, yang terdiri atas PBD Darat sebanyak 138.400 personel, PBD Maritim sebanyak 42.400 personel, PBD Udara sebanyak 34.760 personel, dan Paramiliter 12.250. Sedangkan kekuatan cadangan Jepang sebanyak 41.800 orang. Namun akibat tekanan ekonomi, berdasarkan *National Defense Program Guidelines* jumlah PDB Darat akan dikurangi dari 1.000 hingga 154.000 personel. Pengurangan 1.000 personel telah ditetapkan dalam waktu 10 tahun.
- 3) **Alutsista.** Prioritas pengembangan postur militer Jepang diarahkan pada sistem pertahanan udara dan peningkatan *anti-submarine*. Jepang tengah berupaya mengurangi ketergantungannya pada produk Alutsista AS. Saat Jepang telah memiliki kemampuan memproduksi Rudal pertahanan udara jarak jauh SM-3 berdasarkan kerja sama dengan AS.

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 880 | |
| Kendaraan Infanteri | 950 | |
| Pesawat Tempur | 250 | |
| Helikopter | 608 | |
| Kapal Selam | 16 | |
| Kapal Perang | 52 | |

Sejumlah program pengadaan Alutsista Jepang dalam beberapa tahun ke depan adalah sebagai berikut :

| JENIS ALUTSISTA | TIPE | KETERANGAN |
|-----------------|--|--|
| Pesawat tempur | Upgrade F-15J; Mitsubishi ATD-X | ATD-X merupakan prototype pesawat tempur generasi kelima Jepang dan dijadwalkan akan melakukan uji terbang perdana pada Tahun 2014 |
| Pesawat angkut | 30-50 pesawat angkut C-X | Pesawat pertama telah dioperasikan pada Tahun 2010 |
| Kapal perang | 4 kapal perusak Rudal kelas <i>Akizuki</i> ; 2 kapal perusak helikopter 19.500 ton | Kapal perusak Rudal Kelas <i>Akizuki</i> dirancang sebagai pengawal kapal BMD-Aegis; dari spesifikasinya, kapal perusak helikopter Jepang dapat pula diklasifikasikan sebagai Landing Helikopter Dock. |
| Ranpur | Type 10 MBT; Ranpur pengintai berkemampuan Nubika | |

g. Korea Selatan

- 1) Anggaran. Anggaran pertahanan Korea Selatan secara perlahan meningkat dari tahun ke tahun, meskipun persentasi kenaikannya tidak signifikan bila dibandingkan dengan negara tetangganya, Jepang dan China.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 23,1 | |
| 2009 | 24,3 | |
| 2010 | 24,3 | |
| 2011 | 27,0 | |

- 2) **Personel.** Total personel militer aktif Korea Selatan adalah 687.000 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 560.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 68.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 64.000 personel. Kekuatan paramiliter Korea Selatan sebanyak 4.500 orang. Sedangkan kekuatan cadangan Korea Selatan sebanyak 4.500.000 orang. Dalam *South Korean Defense Reform 2020*, kekuatan personel aktif direncanakan akan dikurangi menjadi 500.000.
- 3) **Alutsista.** Berdasarkan rencana reformasi militer hingga tahun 2020, Korea Selatan sedang berupaya meng-*upgrade* sistem persenjataannya, yang dilatarbelakangi pada prioritas menghadapi Korea Utara yang ditempatkan sebagai ancaman mendesak (*imminent threat*). Namun krisis Tahun 2008, menyebabkan sejumlah program terhambat, dan terpaksa mengalami penundaan.

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 2.750 | |
| Kendaraan Infanteri | 2.820 | |
| Pesawat Tempur | 467 | |
| Helikopter | 453 | |
| Kapal Selam | 13 | |
| Kapal Perang | 47 | |

Sejumlah program pengadaan Alutsista Korea Selatan dalam beberapa tahun ke depan adalah sebagai berikut :

| JENIS ALUTSISTA | TIPE | KETERANGAN |
|-------------------------|---|--|
| Pesawat tempur | F-15K; KFX (sedang dalam pengembangan) | Indonesia turut serta dalam program pengembangan KFX dengan berkomitmen membiayai 20 persen dana pengembangan dan membeli 50 pesawat |
| Pesawat peringatan dini | E-X (sedang dalam pengembangan) | |
| Kapal perang | 3 Kapal perusak Rudal kelas <i>Sejong the Great</i> (BMD Capable); 18-24 kapal frigat Rudal kelas <i>Incheon</i> ; 24 kapal cepat Rudal kelas <i>Yoon Youngha</i> | Sebagian kecil dari kapal perang yang disebut telah dioperasikan; sebagian yang lain masih dalam proses pembuatan |
| Kapal selam | 9 Type 214 | |
| Kendaraan tempur | MBT K2; ranpur infanteri 1000 K21 KNIFV | |

h. Malaysia

- 1) Anggaran. Anggaran pertahanan Malaysia relatif mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia merubah rencana anggarannya untuk menyesuaikan dengan langkah pembelian Alutsista yang modern, sehingga jumlah anggaran pertahanan Malaysia lebih besar dari yang dipublikasikan.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|----------------------------------|------------|
| 2008 | 4,1 | |
| 2009 | 3,8 | |

| | | |
|------|------|--|
| 2010 | 3,2 | |
| 2011 | 2,93 | |

- 2) **Personel.** Total personel militer aktif Malaysia adalah 109.000 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 80.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 14.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 15.000 personel. Kekuatan cadangan Malaysia berjumlah 51.600 personel dan Paramiliter sebanyak 244.700. Dalam bidang sumber daya manusia, Malaysia menerapkan kebijakan *all-citizen national defence* yang menggabungkan kekuatan semua elemen negara tersebut.

3) **Alutsista.**

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 74 | |
| Kendaraan Infanteri | 1.193 | |
| Pesawat Tempur | 74 | |
| Helikopter | 69 | |
| Kapal Selam | 2 | |
| Kapal Perang | 12 | |

Dalam program pengadaan Alutsista Malaysia untuk beberapa tahunke depan, direncanakan untuk produksi *Korvet A-100 MEKO* dengan mekanisme transfer teknologi dari Jerman.

i. **Singapura.**

1) **Anggaran.**

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 7,2 | |
| 2009 | 7,7 | |
| 2010 | 7,6 | |
| 2011 | 9,5 | |

- 2) **Personel.** Total personel militer aktif Singapura adalah 72.500 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 50.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 9.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 13.500 personel. Kekuatan paramiliter Singapura sebanyak 93.800 orang. Sedangkan kekuatan cadangan Singapura berjumlah 44.000 personel.
- 3) **Alutsista.**

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 546 | |
| Kendaraan Infanteri | 1.574 | |
| Pesawat Tempur | 104 | |
| Helikopter | 64 | |
| Kapal Selam | 4 | |
| Kapal Perang | 12 | |

Dalam beberapa tahun ke depan, program pengadaan Alutsista Singapura adalah sebagai berikut :

| JENIS ALUTSISTA | TIPE | KETERANGAN |
|-------------------------|-----------------|---|
| Pesawat tempur | 24 F-15SG; F-35 | Merupakan varian F-15E <i>Strike Eagle</i> yang dibuat khusus untuk Singapura; 2 unit telah dioperasikan dan keseluruhan pesawat dijadwalkan telah diterima pada 2012 |
| Pesawat latih tempur | 20 M-346 | Akan menggantikan pesawat A-4SU sebagai pesawat latih tempur |
| Pesawat patroli maritim | P-3C Orion | Pada Desember 2010 RSAF membuat surat permintaan untuk |

| | | |
|--|--|--|
| | | meninjau pesawat P-3C eks US Navy; diperkirakan RSAF membutuhkan antara 4-5 unit pesawat jenis ini |
|--|--|--|

j. Thailand.

1) Anggaran.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 4,1 | |
| 2009 | 4,9 | |
| 2010 | 4,3 | |
| 2011 | 5,1 | |

2) Personel. Total personel militer aktif Thailand adalah 305.860 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 190.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 69.860 personel, Angkatan Udara sebanyak 46.000 personel. Kekuatan paramiliter Thailand sebanyak 113.700 orang. Sedangkan kekuatan cadangan Thailand berjumlah 200.000 personel.

3) Alutsista.

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 848 | |
| Kendaraan Infanteri | 982 | |
| Pesawat Tempur | 186 | |
| Helikopter | 248 | |
| Kapal Selam | --- | |
| Kapal Perang | 20 | |

Dalam beberapa tahun ke depan, program pengadaan Alutsista Thailand adalah sebagai berikut :

| JENIS ALUTSISTA | TIPE | KETERANGAN |
|-----------------|---------------------------------|---|
| Pesawat tempur | 12 JAS-39 <i>Gripen</i> | |
| Pesawat AWAC | 2 unit sistem AEW/C Erieye | Pengoperasian system AEW/C Erieye ini akan menjadikan Thailand negara kedua di Asia Tenggara yang mengoperasikan platform bergerak untuk identifikasi dan pengendalian udara secara terpadu |
| Helikopter | Upgrade 6 S-70 <i>Blackhawk</i> | Peningkatan kemampuan termasuk kemampuan anti-kapal selam |
| Kapal patroli | Tiga kapal patroli 41 meter | |

k. Vietnam

1) Anggaran

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 2,1 | |
| 2009 | 2,4 | |
| 2010 | 2,4 | |
| 2011 | 2,6 | |

- 2) Personel. Total personel militer aktif Vietnam adalah 455.000 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 412.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 13.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 30.000 personel. Sedangkan kekuatan paramiliter Vietnam mencapai 40.000 orang.

3) Alutsista

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 1.935 | |
| Kendaraan Infanteri | 1.780 | |
| Pesawat Tempur | 219 | |
| Helikopter | 87 | |
| Kapal Selam | 2 | |
| Kapal Perang | 11 | |

I. Filipina

1) Anggaran.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 1,3 | |
| 2009 | 1,3 | |
| 2010 | 1,4 | |
| 2011 | 2,3 | |

2) **Personel.** Total personel militer aktif Filipina adalah 120.000 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 80.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 24.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 16.000 personel. Kekuatan paramiliter Filipina mencapai 40.500 orang. Sedangkan kekuatan cadangan Vietnam sebanyak 131.000 orang.

3) Alutsista.

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 65 | |
| Kendaraan Infanteri | 605 | |
| Pesawat Tempur | 30 | |
| Helikopter | 111 | |
| Kapal Selam | --- | |
| Kapal Perang | 1 | |

m. Kamboja

1) Anggaran

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 0,12 | |
| 2009 | 0,19 | |
| 2010 | 0,23 | |
| 2011 | 0,34 | |

- 2) Personel. Total personel militer aktif Laos sebanyak 124.300 orang, yang terdiri dari Angkatan Darat sebanyak 75.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 2.800 personel, Angkatan Udara sebanyak 1.500, Pasukan Provinsional sebanyak 450.000 personel. Paramiliter Laos sebanyak 67.000 personel.

3) Alutsista

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 170 | |
| Kendaraan Infanteri | 260 | |
| Pesawat Tempur | 14 | |
| Helikopter | 34 | |

| | | |
|--------------|-----|--|
| Kapal Selam | --- | |
| Kapal Perang | --- | |

n. Laos

1) Anggaran.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 0,17 | |
| 2009 | 0,18 | |
| 2010 | 0,18 | |
| 2011 | 0,19 | |

2) Personel. Total personel militer aktif Laos sebanyak 29.100 orang, yang terdiri dari Angkatan Darat sebanyak 25.600 personel dan Angkatan Udara sebanyak 3.500 personel. Paramiliter Laos sebanyak 100.000 personel.

3) Alutsista

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----------------------|--------|------------|
| Tank | 35 | |
| Kendaraan Infanteri | 50 | |
| Pesawat Tempur | 22 | |
| Helikopter | 27 | |
| Kapal Selam & Perang | --- | |

o. Myanmar.

1) Anggaran.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------------|
| 2008 | --- | (tidak ada data) |
| 2009 | --- | (tidak ada data) |
| 2010 | --- | (tidak ada data) |
| 2011 | --- | (tidak ada data) |

2) **Personel.** Total personel militer aktif Myanmar sebanyak 406.000 orang, yang terdiri dari Angkatan Darat sebanyak 375.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 16.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 15.000 personel, dan Paramiliter sebanyak 107.250.

3) Alutsista

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 255 | |
| Kendaraan Infanteri | 440 | |
| Pesawat Tempur | 125 | |
| Helikopter | 66 | |
| Kapal Selam | --- | |
| Kapal Perang | 3 | |

p. Brunei

1) Anggaran.

| TAHUN | ANGGARAN PERTAHANAN (MILYAR USD) | KETERANGAN |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 2008 | 0.23 | |
| 2009 | 0.24 | |
| 2010 | 0,25 | |
| 2011 | 0,41 | |

2) Personel. Total personel militer aktif Brunei sebanyak 7.000 orang, yang terdiri dari Angkatan Darat sebanyak 4.900 personel, Angkatan Laut sebanyak 1.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 1.100 personel. Paramiliter sebanyak 2.250 orang, sedangkan kekuatan cadangan sebanyak 700 personel.

3) Alutsista

| ALUTSISTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------------|--------|------------|
| Tank | 20 | |
| Kendaraan Infanteri | 39 | |
| Pesawat Tempur | --- | |
| Helikopter | 44 | |
| Kapal Selam | --- | |
| Kapal Perang | --- | |

4. Potensi Kerja Samadengan Sejumlah Negara-negara :

a. Amerika Serikat.

Sebagai negara adidaya dengan segala keunggulan teknologi militernya, maka menjalin hubungan kerja sama pertahanan dengan AS adalah strategis bagi Indonesia. Saat ini, kerja sama pertahanan AS-Indonesia yang meliputi bidang dialog bilateral, pertukaran intelijen, latihan, pendidikan, dan persenjataan terus meningkat dan memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Dibidang latihan, Indonesia telah beberapa kali mendapatkan kepercayaan dari AS

untuk menjadi penyelenggara bersama latihan multinasional untuk tugas *peace keeping*. Hal yang sering kali membatasi hubungan kerja sama militer dengan AS adalah posisi Indonesia yang tidak termasuk sebagai negara sekutu sehingga tidak semua keinginan Indonesia dapat dipenuhi oleh AS. Pembatasan yang lain adalah, sering munculnya tekanan politik dengan alasan pelanggaran HAM sehingga menyebabkan naik turunnya hubungan bilateral.

b. China.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan selama 30 tahun terakhir, China berpotensi berkembang menjadi kekuatan baru di Asia (*rising power*) yang ke depan diperkirakan mampu menyaingi AS. Kemajuan pesat teknologi militer China, khususnya yang berkaitan dengan Alutsista dan teknologi angkasa merupakan peluang bagus bagi Indonesia karena hal tersebut dapat dijadikan pilihan alternatif dalam meningkatkan kemampuan militer. Disamping untuk dijadikan alternatif pemenuhan Alutsista, kedekatan hubungan dengan China merupakan modal besar bagi Indonesia dalam memelihara hubungan kelak apabila China berhasil menjadi negara terkuat di dunia (*band wagoning*).

c. Rusia.

Rusia merupakan salah satu kekuatan dunia yang masih memiliki pengaruh luas dan memiliki berbagai keunggulan strategis dalam konteks pertahanan-militer. Dari sisi ini, meningkatkan intensitas kerja sama pertahanan dengan Rusia akan membawa keuntungan strategis jangka panjang bagi Indonesia. Saat ini, Rusia merupakan salah satu sumber utama Alutsista Indonesia, dan diperkirakan hal ini akan bertahan hingga beberapa tahun ke depan. Untuk itu, perlu peninjauan kerja sama di bidang teknologi militer/industri pertahanan yang memuat transfer teknologi. Hal ini sangat potensial, China dan India cukup terbuka lebar dapat menikmati kerja sama tersebut dengan Rusia. Dalam prosesnya, perlu dimulai dialog strategis dan peningkatan kerja sama pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kepentingan Indonesia.

d. India.

India merupakan salah satu negara yang mengalami kemajuan cukup pesat, termasuk profil internasionalnya yang disejajarkan dengan China. Dalam bidang pertahanan, negara ini mengalami kemajuan cukup signifikan, dalam hal pembangunan kekuatan dan produksi Alutsista buatan industri pertahanan dalam negeri. Dalam hal ini, kerja sama pertahanan dengan India akan membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia.

Kerja sama pertahanan Indonesia-India relatif masih banyak memiliki potensi untuk ditingkatkan. Dialog strategis dan latihan bersama merupakan area yang sangat berpotensi untuk

dikembangkan dan perlu diprioritaskan. Demikian pula dalam bidang pengadaan Alutsista dan kerja sama industri pertahanan.

e. Jepang.

Kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang relatif belum mencapai taraf maksimal, dibandingkan intensitas hubungan bilateral kedua negara yang sangat erat. Sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik, Jepang mendapat banyak keuntungan dari statusnya sebagai sekutu AS, mulai dari payung keamanan hingga akses ke Alutsista/teknologi canggih AS. Hal inilah yang menjadi daya tarik kerja sama pertahanan dengan Jepang.

Area kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang dalam pengadaan Alutsista tidak dimungkinkan karena negara tersebut tidak diperbolehkan menjual senjatanya yang berasal dari AS. Meski demikian, kerja sama teknis militer dan industri pertahanan sesungguhnya terbuka lebar, mengingat kedekatan hubungan Indonesia dengan Jepang.

f. Perancis.

Perancis merupakan kekuatan utama di kawasan Eropa yang memiliki berbagai keunggulan strategis, termasuk menyangkut pengalaman operasi dan bidang teknologi militer. Penguasaan teknologi Perancis relatif setara dengan AS, yang terlihat dari penyebaran Alutsista buatan negara tersebut yang digunakan oleh berbagai negara. Dari sisi kebijakan kerja sama, Perancis terikat dengan NATO serta memiliki komitmen regional dengan UE. Namun, dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, Perancis terhitung independen, sebagaimana dapat dilihat dari kerja sama Perancis-Rusia yang bermuatan transfer teknologi dalam pengadaan kapal *mistral-class* yang dikritik oleh negara-negara tetangganya maupun oleh AS.

Dari perspektif Indonesia, kerja sama teknologi militer atau industri pertahanan sangat potensial dan perlu diprioritaskan. Hal ini sangat terbuka lebar apabila Indonesia melakukan pengadaan dalam jumlah besar, ataupun mengikuti skema kerja sama yang sudah pernah diterapkan dalam pengadaan dan produksi LPD dengan Korea Selatan,

g. Jerman.

Disamping Perancis, negara Eropa yang dipandang memiliki keunggulan strategis sehingga kerja sama pertahanannya dengan Indonesia perlu diberikan prioritas adalah dengan Jerman. Bagi Indonesia, Jerman merupakan salah satu sumber pengadaan Alutsista yang potensial untuk dikembangkan kerja sama di area teknologi militer dan industri pertahanan.

h. Spanyol.

Spanyol merupakan salah satu kekuatan menonjol di kawasan Eropa, yang telah memiliki keunggulan dibidang penguasaan teknologi militer dan industri pertahanan yang maju. Sepanjang sejarahnya, kerja sama pertahanan Indonesia-Spanyol sudah mencakup dalam area pengadaan Alutsista dan kontribusi Spanyol dalam peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional juga tidak dapat dipungkiri. Dilihat dari kemajuan industri pertahanannya, maka kerja sama serupa, termasuk yang mencakup transfer teknologi sangat potensial

i. Australia.

Serupa dengan Jepang, Australia menikmati berbagai keuntungan dari statusnya sebagai sekutu AS. Keuntungan tersebut mencakup kerja sama pengadaan Alutsista canggih dan modern dari AS. Dalam jangka panjang, penguatan kerja sama pertahanan dengan Australia, tidak lagi dalam perspektif sebagai negara yang bertetangga dengan Indonesia, melainkan dari sisi kemajuan teknologi negara tersebut, sehingga perlu penjagaan untuk kerja sama pengadaan Alutsista dan teknologi militer, meskipun saat ini belum menjadi prioritas

5. Kemungkinan Ancaman.

a. Ancaman dari aktor negara.

1) Amerika Serikat.

Diabad 21 ini, AS diperkirakan masih tetap pada posisinya sebagai kekuatan paling dominan (*dominant power*) sehingga doktrin *pre-emptive strike* sebagai opsi kebijakan luar negeri dan pertahanan AS masih tetap dipertahankan. Dalam hal perang melawan terorisme internasional, berprinsip dengan cara menghancurkan lawan di tempat asalnya sebelum mereka menyerang AS. Ketika kepentingan AS di Indonesia mendapat serangan teroris dan Indonesia dianggap tidak mampu atau tidak ada keinginan untuk melakukan tindakan, maka AS akan melakukan tindakan militer tanpa harus menunggu persetujuan Indonesia sebagaimana yang pernah dilakukan di Pakistan pada saat menghancurkan tempat persembunyian Osama bin Laden.

Keamanan Selat Malaka, keberadaan ALKI Timur-Barat, dan keamanan Laut China Selatan merupakan bagian penting dari usaha pengamanan energi dan sumber daya strategis AS. Dengan adanya AS belum meratifikasi Konvensi Laut Internasional UNCLOS 1982, artinya bahwa negara tersebut belum sepenuhnya mengakui batas wilayah yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Apabila terjadi gangguan keamanan di wilayah tersebut, kemungkinan penggunaan kekuatan militer oleh AS adalah sangat mungkin terjadi, dan ini berarti

pelanggaran kedaulatan bagi Indonesia. Selain itu, AS juga akan melakukan tindakan-tindakan lain seperti, spionase, patroli laut dan pelanggaran wilayah lainnya. Berkaitan dengan masalah konflik di Laut China Selatan, Amerika tidak mungkin akan tinggal diam karena Amerika memiliki kepentingan yang sangat signifikan baik secara ekonomi maupun secara politik. Di sisi lain China tidak mungkin membiarkan Amerika mengintervensi lebih dalam tentang masalah Laut China Selatan karena pada dasarnya baik China maupun Amerika memiliki kepentingan yang sama. Apabila konflik terjadi di kawasan tersebut maka Amerika akan mengoperasionalkan seluruh kekuatan militernya yang sudah disiapkan di beberapa negara di kawasan termasuk yang ada di Darwin, sehingga Indonesia akan menjadi *war theater* dan Amerika dapat dipastikan mengabaikan kedaulatan Indonesia.

Sejumlah isu yang kini masih menjadi perhatian oleh pemerintah AS di Indonesia adalah masalah pelanggaran HAM oleh perwira militer terutama di Timor-Timur, Papua, Aceh dan juga ditempat lain di Indonesia. Kejadian-kejadian yang menurut sudut pandang AS dianggap sebagai pelanggaran HAM, akan digunakan sebagai alat untuk melakukan tekanan politik dan sangat mungkin berkembang menjadi embargo. Walaupun hubungan bilateral antara Indonesia dan AS saat ini dapat dikatakan cukup baik, perubahan sikap dapat terjadi setiap saat. Berdasar kepada pertimbangan tersebut diatas maka kemungkinan ancaman dari AS dapat terjadi dalam bentuk antara lain:

- a) Ancaman militer : blokade laut, spionase, pelanggaran wilayah dan intervensi militer.
- b) Ancaman non militer : embargo, Iptek, *cyber attack*, penurunan moralitas dan intervensi politik.

2) China.

China adalah negara yang sangat luas dan lebih banyak dikelilingi oleh daratan dan hanya sedikit menguasai wilayah lautan dan Laut China Selatan adalah satu-satunya. Posisi China tidak seperti AS yang memiliki dua lautan yaitu kearah barat Samudra Pasifik dan kearah timur Samudra Atlantik yang memungkinkan negara tersebut dengan mudah menguasai dunia. Sejarah membuktikan bahwa kekuatan negara ditentukan oleh keunggulan kekuatannya dilaut. Pada abad kedua Sparta dapat dikalahkan oleh Athena karena Athena memiliki kekuatan laut yang unggul yang mampu melindungi ekonominya sementara Sparta tidak. China memahami kondisi geografinya, dan satu-satunya jalan untuk menjadi negara kuat yang bisa melindungi ekonominya,

mutlak harus menguasai Laut China Selatan yang merupakan satu-satunya akses ke dunia luar melalui laut.

Mengenai masalah Laut China Selatan, sikap China tidak akan pernah mau berkompromi dengan siapapun dan sampai kapanpun. China akan tetap menyatakan klaim atas Laut China Selatan termasuk seluruh pulau-pulau yang ada di dalamnya. Indonesia pada saat ini tidak ada kepentingan dengan konflik di Laut China Selatan, akan tetapi harus diingat bahwa kelak apabila China berhasil menguasai seluruh kawasan Laut China Selatan berarti Indonesia berbatasan langsung dengan China. Dengan belum tuntasnya permasalahan batas wilayah di kepulauan Natuna berarti Natuna sangat dimungkinkan menjadi pemicu konflik antara Indonesia dengan China.

Investasi China di Asia Tenggara termasuk di Indonesia semakin meningkat dan dengan diberlakukannya China ASEAN *Free Trade Area* (CAFTA) akan semakin lebih besar. Bertambah besarnya investasi China telah ditandai dengan membanjirnya barang-barang produk China di Indonesia. Hal ini akan mendorong konsumen Indonesia semakin tergantung dengan produk China yang terkenal lebih murah dibandingkan produk nasional. Semakin tinggi ketergantungan kita terhadap produk China berarti kita sudah menjadi korban perang ekonomi China.

- a) Ancaman militer : spionase dan konflik perbatasan dalam jangka panjang.
- b) Ancaman non militer : *cyber attack* dan dominasi perdagangan/industri dan Iptek.

3) Australia.

Australia adalah bangsa Eropa memiliki budaya barat yang berbeda dengan budaya Asia, akan tetapi Australia secara geografi berada di Asia. Hubungan bilateral dengan Indonesia sangat tidak stabil (*up and down*) dimulai sejak awal kemerdekaan dimana Australia memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Namun beberapa kali sempat naik turun dan menjadi tingkat paling buruk adalah pada saat Australia memimpin INTERFET di Timor-Timur, tahun 1999. Dengan selesainya masalah Timor-Timur, berangsur-angsur hubungan menjadi lebih baik namun dengan dikabulkannya pencari suaka politik 42 orang Papua yang diizinkan tinggal di Australia hubungan kedua negara menjadi kurang harmonis lagi. Dan ke depan masalah Papua akan tetap menjadi isu sensitif dalam menjaga hubungan bilateral Australia-Indonesia.

Dalam menyusun strategi pertahanannya Australia memiliki persepsi bahwa negara tersebut hanya bisa diserang dari arah utara yaitu oleh Indonesia atau oleh kekuatan lain melalui Indonesia. Dan yang tidak kalah penting bahwa lebih dari 70% ekspor Australia menuju ke utara yaitu, China, Jepang dan Korea Selatan, melalui teritorial Indonesia. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila Australia akan selalu ikut campur terhadap situasi keamanan Indonesia sebagaimana pernah disebutkan dalam Buku Putihnya (1994) bahwa keamanan teritorial Indonesia menjadi prioritas kedua setelah keamanan wilayahnya sendiri. Penerapan doktrin *pre-emptive strike* oleh Australia akan memberikan justifikasi untuk mengarahkan kekuatan militernya beroperasi di wilayah Indonesia manakala kepentingannya terganggu dan memperoleh restu dari AS sebagai sekutunya. Indonesia sebagai negara kuat tidak menjadi keinginan Australia, karena dianggap berpotensi mengganggu kepentingan nasionalnya, dan sebaliknya Indonesia yang gagal dan pecah menjadi beberapa negara kecil juga tidak diinginkan, karena hal ini akan mengganggu stabilitas regional dan untuk itu Australia harus membayar mahal, seperti apa yang saat ini dilakukan di Timor Leste, PNG dan Solomon Island. Tidakkah berlebihan kalau kita menganggap bahwa setiap kebijakan pemerintah Australia harus kita cermati lebih dalam, karena setiap kebijakan Australia akan berdampak pada kepentingan Indonesia.

- a) Ancaman militer : blokade laut, spionase dan pelanggaran wilayah.
 - b) Ancaman non militer : embargo, Iptek, *cyber attack* dan intervensi politik.
- 4) Jepang.

Jepang sebagai negara industri maju akan terus berupaya untuk memperoleh kebutuhan bahan baku dan energi demi kelangsungan hidup industrinya. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut Jepang disamping harus mampu mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan,

sekaligus harus mampu mengamankan jalur transportasi dari negara asal menuju ke negaranya. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi yang menjadi incaran Jepang sebagai tempat pemenuhan kebutuhan bahan mentah dan energinya serta geografi wilayah Indonesia merupakan jalur strategis transportasi laut bagi Jepang. Keinginan Jepang bersama-sama dengan AS untuk ingin ikut campur masalah keamanan Selat Malaka adalah bukti bahwa Jepang terfokus terhadap keadaan di Indonesia.

Sebagai sekutu dekat, kebijakan Jepang akan selalu cenderung dipengaruhi oleh sikap politik luar negeri AS,

terutama menyangkut masalah kebijakan tentang keamanan di Asia Pasifik. Jepang tentu tidak menghendaki, Indonesia menjadi negara industri kuat yang mampu menjadi pesaingnya sehingga diharapkan Indonesia tetap menjadi tempat sumber bahan mentah dan sekaligus pasar untuk produk Jepang. Oleh sebab itu Jepang diperkirakan akan terus mempelajari lebih dalam tentang kondisi sosial-politik dan ekonomi Indonesia agar berjalan sesuai kepentingannya.

Jepang beberapa waktu lalu yang dilanda gempa dan tsunami yang berdampak kepada kerugian perekonomian Jepang yang sangat besar sehingga berpengaruh kepada pendapatan ekonomi baik di bidang swasta maupun dalam negeri, sehingga butuh beberapa tahun untuk memulihkan perekonomiannya.

Angkatan Bersenjata Jepang yang lebih dikenal dengan doktrin *Self Defense*, mencoba untuk menghindari angkatan bersenjata pada misi-misi PBB dan sebagai gantinya pemerintah Jepang lebih berperan didalam membantu pendanaan pada setiap operasi yang dilakukan PBB. Sistem pengamanan pemerintahan Jepang yang juga mengandalkan kehadiran pasukan Amerika di Okinawa dan rencana akan dipindahkan ke arah utara dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi permasalahan sendiri ke depan tentang kedekatan AS dengan Jepang didalam mengantisipasi perkembangan kekautan China.

- a) Ancaman militer : spionase.
- b) Ancaman non militer : Iptek, intervensi politik, dominasi industri dan *cyber attack*.

5) India.

Posisi India dalam hal kekuatan militer jauh berada diatas Idonesia, namun dalam sejarah hubungan bilateral keduanya tidak pernah ada ketegangan yang berarti. Ganjalan yang ada adalah masalah perbatasan antara kedua negara yaitu tepatnya dibagian barat wilayah Indonesia yang memiliki batas laut dengan India, yaitu antara kepulauan Andaman dan Pulau Rondo,

namun sejauh ini tidak berpengaruh terhadap hubungan keduanya karena telah terjadi kesepakatan batas wilayah antara Indonesia dengan India. Sikap netral Indonesia terhadap masalah Kasmir adalah suatu keputusan politik yang harus dipertahankan untuk menjaga keharmonisan hubungan bilateral dengan India. Namun tentunya wajar bahwa apabila India juga melakukan penyelidikan tentang kondisi sosial-politik dan ekonomi Indonesia dalam rangka menentukan kebijakan politik.

- a) Ancaman militer : spionase dan pelanggaran wilayah.
- b) Ancaman non militer : dominasi perdagangan dan *cyber attack*.

6) Singapura.

Konflik antarnegara yang paling mungkin terjadi adalah konflik antara dua atau lebih negara yang saling berbatasan atau bertetangga. Indonesia dan Singapura adalah dua negara dengan letak geografisnya saling berbatasan dan masih memiliki sengketa batas wilayah yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Belum selesainya batas wilayah antara Indonesia dan Singapura akan menjadi sumber ketegangan yang setiap saat bisa muncul, yang dapat dipicu oleh masalah lain. Dari segi kekuatan militer Singapura tidak bisa dianggap kecil karena disamping memiliki teknologi militer yang tinggi, Angkatan Bersenjata Singapura memiliki hubungan dekat dengan AS, Inggris dan Australia. Selain itu eksistensi *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) memang tidak ada jaminan bahwa negara-negara tersebut akan membantu Singapura baik secara individu maupun bersama-sama dalam menghadapi ancaman militer, tetapi kedekatan hubungan ini memungkinkan mereka untuk saling bekerja sama dibidang teknologi persenjataan.

Singapura menganggap Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah teritorial sangat luas dengan tingkat pengawasan yang sangat lemah sehingga dapat dieksploitasi untuk kepentingan nasionalnya terutama dari potensi kekayaan laut dan sumber alam lainnya. Selain itu Singapura menganggap Indonesia sebagai partner strategis di dalam mengimbangi hubungan Singapura dengan Malaysia yang kurang harmonis karena sejarahnya lepas dari pemerintah Malaysia, kasus *Pedro Branca* (Pasir Putih), kasus air minum dll.

- a) Ancaman militer : pelanggaran wilayah dan spionase.
- b) Ancaman non militer : *cyber attack*, penyelundupan barang, eksploitasi sumber daya alam dan propaganda.

7) Malaysia.

Malaysia adalah negara yang memiliki batas wilayah darat maupun laut yang belum dapat diselesaikan dan masih berpotensi menjadi penyebab terjadinya ketegangan. Ketegangan politik apabila tidak dapat diselesaikan secara diplomasi maka jalan lain satu-satunya adalah pemaksaan

dengan penggunaan kekuatan militer. Konflik dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran wilayah yang dapat berkembang menjadi serangan militer terbatas. Masih belum tuntasnya masalah batas wilayah daratan terutama di perbatasan Kalimantan dengan Serawak berakibat pada lemahnya pengawasan sehingga lalu lintas orang yang tidak terkontrol sangat rawan terjadinya kejahatan internasional. Celah ini memungkinkan Malaysia untuk melakukan tindakan provokatif untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia di perbatasan dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan spionase.

Tindakan provokatif yang sama juga dilakukan oleh Malaysia terhadap kelompok Aceh Merdeka dimasa lalu dan sampai sekarang pihak pemerintah Malaysia masih memfasilitasi kelompok orang Aceh di Malaysia untuk membicarakan masa depan Aceh (data di Kemendagri). Di bidang ekonomi, pengusaha-pengusaha Malaysia banyak menanamkan modal di Indonesia terutama di sektor perkebunan kelapa sawit berpotensi mengancam produksi kelapa sawit Indonesia.

Sikap arogansi Malaysia terhadap masalah sengketa pulau Ambalat di wilayah Karang Unaran sangat berpotensi sebagai pemicu terjadinya konflik bersenjata antara kedua negara.

- a) Ancaman militer : spionase, pelanggaran wilayah dan konflik militer terbatas.
- b) Ancaman non militer : *cyber attack* dan propaganda.

8) Vietnam.

Berbagai perubahan dan transformasi dari masa perang yang terjadi pada masa penjajahan China, Perancis dan AS menjadikan era kebangkitan Vietnam bersatu terjadi setelah Vietnam berubah nama menjadi Republik Sosialis Vietnam pada tanggal 2 Juli 1976 dan hal ini sangat fenomenal. Selanjutnya Ho Chi Min merupakan sosok yang bisa disebut sebagai arsitek untuk merubah bangsa Vietnam dari *traumatic* perang menjadi semangat untuk pembangunan Vietnam. Semangat nasionalisme Vietnam yang sangat kuat tersebut merupakan modal besar yang tidak dimiliki oleh setiap bangsa. Walaupun pada masa paska perang melawan Amerika Serikat (AS), rakyat Vietnam harus menderita akibat embargo dari AS dan sekutunya sampai Tahun 2002, namun Vietnam tetap mampu menciptakan lapangan pekerjaan besar-besaran, pembukaan lahan baru pertanian, perbaikan teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan pusat pembangkit listrik dan distribusinya, menjadikan Vietnam lebih percaya diri di dunia internasional.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam yang mencapai angka 7,5% akan menjadi pendorong pembangunan militer yang akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonominya. Perkembangan ekonomi yang diikuti dengan naiknya tingkat kesejahteraan rakyatnya akan diikuti oleh naiknya kebutuhan energi, sehingga mendorong Vietnam untuk mencari sumber energi baru. Masih belum terselesaikannya masalah perbatasan laut antara Indonesia-Vietnam tepatnya disebelah utara laut Natuna, yang diyakini kaya akan sumber minyak akan memicu semangat untuk menguasai wilayah tersebut dan berpotensi menjadi sumber konflik.

- Ancaman militer : spionase dan pelanggaran wilayah.

9) Thailand.

Hubungan antara Indonesia dengan Thailand, berdasarkan pengalaman sejarah sejauh ini tidak ada permasalahan yang menonjol. Pembangunan angkatan bersenjata Thailand diarahkan untuk *self defence*, sehingga berdasarkan data-data kekuatan militer dari segi anggaran, personel dan Alutsista maka kecil kemungkinan Thailand menjadi negara agresor. Setiap permasalahan atau konflik yang terjadi dengan Indonesia selalu dapat diselesaikan melalui saluran diplomatik dan perundingan bilateral, sehingga kecil kemungkinan Thailand menjadi suatu ancaman bagi Indonesia.

Secara wilayah Indonesia tidak mempunyai perbatasan dan permasalahan dengan Thailand. Hubungan kedua negara semakin erat dan membaik. Hal ini ditandai dengan keterlibatan Indonesia sebagai keketuaan ASEAN didalam menyelesaikan konflik di perbatasan Thailand dengan Kamboja dan konflik di Thailand Selatan.

- Ancaman militer : spionase.

10) Myanmar.

Hubungan antara Indonesia dengan Myanmar, berdasarkan pengalaman sejarah sejauh ini tidak ada permasalahan yang menonjol. Pembangunan angkatan bersenjata Myanmar diarahkan untuk pertahanan negara, sehingga berdasarkan data-data kekuatan militer dari segi anggaran, personel dan Alutsista maka kecil kemungkinan Myanmar menjadi negara agresor. Setiap permasalahan atau konflik yang terjadi dengan Indonesia selalu dapat diselesaikan melalui saluran diplomatik dan perundingan bilateral, sehingga kecil kemungkinan Myanmar menjadi suatu ancaman bagi Indonesia.

Myanmar dalam konflik Laut China Selatan tidak mempunyai akses langsung terhadap keberadaan Laut China Selatan, namun posisinya sebagai mitra utama terhadap keberadaan

China yang dinilai sangat membantu terhadap perkembangan ekonomi Myanmar memaksakan posisinya untuk berkiblat kepada kepentingan China.

- Ancaman militer : spionase.

11) Filipina.

Permasalahan antara Indonesia dengan Filipina sejauh ini belum ada yang menjurus kepada konflik bersenjata, walaupun masih ada masalah perbatasan di Moro yang belum terselesaikan dengan pihak Indonesia. Dari segi pembangunan dan alokasi anggaran untuk angkatan bersenjata tidak atau belum terlihat adanya upaya untuk melakukan agresi. Dari segi kekuatan militer Indonesia lebih unggul dari Filipina, akan tetapi Filipina memiliki hubungan yang lebih dekat dengan AS yang selama ini menjadi andalanya. Sebagaimana kita saksikan saat ini, AS memberikan dukungan penuh terhadap Filipina dalam sengketa perbatasan melawan China. Kemungkinan ketegangan politik dapat terjadi antara Indonesia dengan Filipina disebabkan oleh maraknya *illegal fishing* di perbatasan laut, namun selama ini dapat diatasi dengan baik.

- Ancaman militer : spionase dan pelanggaran wilayah.

12) Brunei.

Hubungan antara Indonesia dengan Brunei, berdasarkan pengalaman sejarah sejauh ini tidak ada permasalahan yang menonjol. Pembangunan angkatan bersenjata Brunei didukung dengan anggaran memadai dan memanfaatkan bantuan kekuatan militer dari luar, sehingga berdasarkan data-data kekuatan militer dari segi anggaran, personel dan Alutsista maka kecil kemungkinan Brunei menjadi negara agresor. Setiap permasalahan atau konflik yang terjadi dengan Indonesia selalu dapat diselesaikan melalui saluran diplomatik dan perundingan bilateral, sehingga kecil kemungkinan Brunei menjadi suatu ancaman bagi Indonesia.

13) Kamboja.

Permasalahan antara Indonesia dengan Kamboja sejauh ini belum ada yang menjurus kepada konflik bersenjata. Dari segi pembangunan dan alokasi anggaran untuk angkatan bersenjata tidak atau belum terlihat adanya upaya untuk melakukan agresi.

Dari segi kekuatan militer Indonesia lebih unggul dari Kamboja, akan tetapi militer Kamboja saat ini sedang terlibat konflik perbatasan dengan militer Thailand, yang kecil kemungkinannya akan menjadi konflik regional. Berdasarkan

uraian di atas, secara militer Kamboja tidak merupakan suatu ancaman yang membahayakan negara.

- Ancaman militer : spionase dan pelanggaran wilayah.

14) Laos.

Permasalahan antara Indonesia dengan Laos sejauh ini belum ada yang menjurus kepada konflik bersenjata. Dari segi pembangunan dan alokasi anggaran untuk angkatan bersenjata tidak atau belum terlihat adanya upaya untuk melakukan agresi. Dari segi kekuatan militer Indonesia lebih unggul dari Laos. Berdasarkan uraian di atas, secara militer Laos tidak merupakan suatu ancaman yang membahayakan negara.

- Ancaman militer : spionase.

15) Rusia.

Berdasarkan data anggaran pertahanan Rusia pada masa awal setelah pecahnya Uni Soviet relatif tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan, bahkan cenderung menurun. Namun sejak tahun 2000, anggaran pertahanan Rusia mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan keinginannya untuk menandingi kekuatan Amerika Serikat dan China serta untuk mengamankan kepentingan nasionalnya khususnya di dalam perebutan sumber daya alam atau energi. Pembangunan kekuatan bersenjata Rusia cenderung diarahkan kepada negara yang bersifat agresor dan penggunaan kekuatan militer untuk mendukung upaya diplomasi. Untuk tahun 2011, anggaran pertahanan Rusia semakin meningkat tajam. Dan untuk satu dekade ke depan, pemerintah Rusia telah mengalokasi anggaran sebesar USD 730 milyar untuk memodernisasi persenjataan kekuatan militernya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan ancaman yang ditimbulkan Rusia.

Secara langsung Rusia bukan merupakan ancaman bagi Indonesia, namun secara universal keberadaan negara komunis ini akan berdampak kepada pengaruhnya terhadap negara Indonesia dibidang ideologi.

a) Ancaman militer : spionase.

b) Ancaman non militer : embargo dan *cyber attack*.

16) Korea Selatan.

Anggaran pertahanan Korea Selatan secara perlahan meningkat dari tahun ke tahun, meskipun persentasi kenaikannya tidak signifikan bila dibandingkan dengan negara tetangganya, Jepang dan China. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi kekuatan militer China yang secara moral

membantu Korea Utara yang sampai dengan saat ini masih terlibat konflik dengan Korea Selatan, sehingga pembangunan kekuatan militer Korea Selatan juga dalam rangka menghadapi kemungkinan serangan militer Korea Utara.

Total personel militer aktif Korea Selatan adalah 687.000 orang, yang terdiri atas Angkatan Darat sebanyak 560.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 68.000 personel, Angkatan Udara sebanyak 64.000 personel. Kekuatan paramiliter Korea Selatan sebanyak 4.500 orang. Sedangkan kekuatan cadangan Korea Selatan sebanyak 4.500.000 orang. Dari data tersebut di atas terlihat bahwa Korea Selatan serius di dalam antisipasinya menghadapi Korea Utara, yang kemungkinan konflik dengan Korea Utara akan menyeret keterlibatan pihak ketiga.

- a) Ancaman militer : spionase.
- b) Ancaman non militer : *cyber attack*, Iptek dan embargo.

b. Ancaman dari aktor non negara.

1) Terorisme.

Terorisme merupakan ancaman di negeri ini, meskipun Osama bin Ladin sebagai tokoh sentral teroris dunia telah tewas tertembak, namun hal tersebut tidak menjadikan terorisme lenyap dari masih Indonesia. Penyebab terjadinya terorisme bersifat multidimensional dan bermuara pada isu sentral ketidakadilan dalam penegakkan hukum, kemiskinan, keterbelakangan dan tingkat pendidikan yang rendah, perasaan termarginalisasi sekelompok masyarakat, adanya ideologi-ideologi ekstrim/radikal, dan yang lebih penting lagi bahwa proses rekrutmen masih terus berjalan. Masih belum dapat dihancurkannya jaringan terorisme internasional di Indonesia dan masih adanya sikap arogansi negara besar terutama AS yang menjadi penyebab lahirnya terorisme internasional juga menjadi faktor penting terhadap kemungkinan eksisnya terorisme.

Disamping itu, program deradikalisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai bentuk penanggulangan terorisme, belum menunjukkan hasil yang signifikan. Selain beberapa faktor di atas, tumbuh dan berkembangnya terorisme dapat terjadi apabila pemerintah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui penyediaan dan penyiapan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Kondisi ini dapat di manfaatkan oleh LSM atau organisasi tertentu untuk mengambil alih peran pemerintah dalam menyiapkan fasilitas umum/sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masih

menjadi problem besar. Karena rakyat merasa dipenuhi kebutuhannya, maka tidak mustahil mereka akan bergeser loyalitasnya sehingga lebih mengikuti kemauan kelompok lain dan tidak mendengar apa kata pemerintah.

2) **Separatisme.**

Separatisme muncul sebagai efek langsung dari kekecewaan sebagian masyarakat terhadap keputusan-keputusan politik pemerintah yang berkuasa. Permasalahan itulah yang menjadi penyebab munculnya separatis di Papua dimana sebagian warga Papua kecewa dengan keputusan pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda dalam *New York Agreement* yang menetapkan dan mengesahkan hasil Pepera, dan penyebab terakhir adalah kebijakan pemerintah untuk pemekaran dan penerapan otonomi khusus di Papua. Hal yang sama juga berlaku di Maluku dengan RMS-nya, dimana lahirnya RMS juga diakibatkan oleh kekecewaan akibat keputusan politik saat awal kemerdekaan. Sedangkan yang terjadi pada GAM adalah kekecewaan mereka atas keputusan Indonesia yang tidak memberikan status khusus bagi provinsi Aceh untuk memberlakukan Syari'at Islam bagi pemeluknya.

Semula ide separatisme ini sempat meredup dan hampir terlupakan, namun seiring dengan ketidak mampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya,

mewujudkan penegakkan hukum dan peningkatan taraf pendidikan di daerah konflik tersebut, maka oleh sebagian warga masyarakat, ide separatis ini mulai diangkat kembali dan dikemas dalam bentuk internasionalisasi permasalahan. Selama pemerintah belum mampu menghilangkan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan serta menghargai nilai-nilai demokrasi, HAM dan lingkungan hidup, maka persoalan separatis masih akan tetap menjadi sebuah ancaman.

3) **Konflik Komunal.**

Komposisi penduduk Indonesia yang heterogen dan majemuk serta masih berhembusnya isu sensitif suku bangsa, agama, ras dan antar golongan (SARA), adalah merupakan potensi terjadinya konflik komunal. Kondisi yang sangat plural ini, apabila tidak dikelola dengan baik, bahkan pemerintah belum juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan rasa nasionalisme kebangsaan pada warga masyarakat serta bahkan menumbuhkan perasaan sentimen antaretnis dan kecemburuan karena perasaan diperlakukan secara diskriminatif, maka akan menjadi pemicu timbulnya konflik.

4) **Perdagangan dan penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak.**

Kondisi geografis Indonesia dengan garis pantai yang sangat panjang dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, baik di darat maupun di laut, telah membawa konsekuensi bahwa negara ini memiliki potensi kerawanan dalam bidang perdagangan dan penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak.

Hampir seluruh wilayah perbatasan Indonesia diwarnai oleh kerawanan ini, terutama di wilayah perbatasan maritim. Kerawanan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa saat ini pemerintah masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain kelemahan aparat yang masih bisa disuap, regulasi yang belum sempurna dan masih ada celah yang bisa disalahgunakan, keterbatasan pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan dan garis pantai serta masih adanya permintaan terhadap kebutuhan senjata dan Munisi untuk tujuan tertentu.

Aktivitas perdagangan dan penyelundupan senjata, munisi dan bahan peledak ini tidak hanya berdampak pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat saja, melainkan juga dapat berujung pada ancaman pertahanan yang intensitasnya sangat tinggi, seperti terjadi serangan kelompok teroris, pemberontakan bersenjata, dan konflik komunal bersenjata. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan ancaman pertahanan-militer yang bersifat mendesak untuk ditangani secara komprehensif, salah satunya dengan kebijakan pengamanan di daerah perbatasan dan wilayah perairan nasional.

5) Perompakan dan Pembajakan.

Perompakan dan pembajakan masih sangat mungkin terjadi di Indonesia. Kondisi geografi Indonesia yang dikelilingi lautan dan samudra luas sangat memungkinkan hal tersebut terjadi. Konsekuensi sebagai negara maritim tentunya harus memiliki angkatan laut yang kuat dan tangguh. Akan tetapi, kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada saat ini belum memungkinkan untuk melakukan peningkatan kemampuan armada laut seperti yang diharapkan. Sehingga peningkatan kemampuan Angkatan Laut belum dapat dilakukan secara maksimal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah melakukan kerja sama dengan negara tetangga, dalam bentuk patroli bersama dengan negara Malaysia dan Singapore, khususnya di wilayah selat Malaka. Patroli terkoordinasi yang kini dijalankan oleh ketiga negara, relatif berhasil menekan angka perompakan dan pembajakan, akan tetapi bagi Indonesia yang memiliki wilayah perairan terluas dibandingkan Malaysia dan Singapura, serta masih terbatasnya kemampuan pertahanan negara, dalam jangka

pendek hingga panjang akan tetap berhadapan dengan permasalahan ini.

Masalah perompakan dan pembajakan tidak hanya dapat dikategorikan sebagai gangguan keamanan laut semata, melainkan merupakan bentuk ancaman pertahanan bagi Indonesia. Karena apabila Indonesia tidak mampu mengamankan wilayah tersebut, akan mengundang kekuatan militer asing, yang kepentingannya terancam di wilayah tersebut, untuk ikut mengamankan kepentingannya.

6) Penebangan dan Penyelundupan Kayu (*Illegal Logging*).

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan ada beberapa komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, hanya ada di wilayah Indonesia dan tidak ditemukan di negara lain. Dengan kondisi wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga yang sebagian besar terpencil dan terletak di tengah-tengah hutan telah kelompok tertentu untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal. Para pelaku memiliki organisasi yang cukup rapi dan profesional, serta jaringan lintas negara, sehingga sulit untuk diberantas. Serangkaian kegiatan pengawasan dan pengamanan perbatasan telah ditingkatkan, namun diperkirakan aktivitas ini masih marak terjadi.

Kejahatan ini sangat merugikan Indonesia tidak hanya dari segi ekonomi (pendapatan negara dan daerah), melainkan juga dari segi politik (tekanan negara-negara besar seperti Amerika dan anggota UE, serta LSM-LSM lingkungan hidup internasional).

Kejahatan ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan ancaman bagi keamanan nasional karena memiliki dampak dan implikasi besar bagi keselamatan rakyat, citra dan masa depan Indonesia dalam mengelola dan mendayagunakan sumber daya kehutanan sebagai aset nasional yang terhitung vital bagi negara dan bangsa.

7) Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal (*Smuggling and Illicit Trade*).

Penyelundupan dan perdagangan ilegal merupakan bentuk ancaman lain, khususnya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Aktivitas ini terjadi, karena dihadapkan dengan garis perbatasan darat yang sangat panjang, keberadaan pos-pos pengamanan dan personel yang bertugas di lapangan masih menunjukkan ketidak seimbangan, yang menyebabkan tidak seluruh wilayah dapat terpantau atau diawasi secara penuh. Komoditas yang menjadi obyek penyelundupan dan perdagangan ilegal pada umumnya adalah bahan kebutuhan pokok. Masyarakat Indonesia yang tinggal di

sepanjang perbatasan yang lokasinya terpencil dan jauh dari sentra-sentra ekonomi kabupaten dan kecamatan, secara ekonomi memperoleh keuntungan dari aktivitas ini. Aktivitas ilegal ini marak terjadi di seluruh perbatasan darat Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Di wilayah perbatasan antara RI-Malaysia, penduduk Indonesia lebih sering melakukan aktifitas ekonomi di wilayah Malaysia, karena kondisi infrastruktur di Malaysia lebih baik jika di bandingkan dengan di wilayah Indonesia. Isu kemiskinan dan ketertinggalan merupakan masalah mendasar yang umum di jumpai di semua segmen wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat lebih rentan terhadap pengaruh dari luar, serta berpotensi menumbuhkan frontier dari negara tetangga ke wilayah Indonesia. Lebih jauh, dampak langsung dari adanya kemiskinan dan ketertinggalan di wilayah perbatasan adalah rapuhnya ketahanan wilayah dan semangat bela negara dalam diri masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan.

Sementara di perbatasan RI-Papua Nugini dan RI-Timor Leste, karena kesejahteraan penduduk Indonesia relatif lebih baik dibandingkan penduduk kedua negara tersebut, maka komoditas yang diselundupkan berasal dari/melalui Indonesia dan perluasan batas imajiner berasal dari Indonesia ke negara tetangga. Kondisi ini memberi keuntungan bagi penduduk di perbatasan, namun dikhawatirkan melekatnya pengaruh imajiner tersebut akan menimbulkan dampak bagi masyarakat perbatasan bila terjadi kerusuhan, konflik, dan perang saudara di negara tetangga, seperti aliran pengungsi dan memanasnya situasi keamanan di perbatasan.

8) Perdagangan Obat-obatan Terlarang (*Drugs Trafficking*).

Secara geografis Indonesia terletak di Asia Tenggara yang merupakan salah satu dari tiga wilayah penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia, bersama-sama dengan daerah “Bulan Sabit Emas” atau “*Golden Crescent*” (Afghanistan-Pakistan-Iran) dan Columbia, melalui keberadaan “Segitiga Emas” atau “*Golden Triangle*” di perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos, yang diperkirakan menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia.

Produk yang melimpah ini tentunya harus di pasarkan, dan Indonesia merupakan salah satu konsumen narkoba yang cukup besar. Perdagangan obat-obatan terlarang ini terjadi dengan alasan faktor ekonomi, dimana sebagian masyarakat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan dengan melakukan perdagangan narkoba ini mendatangkan untung yang sangat besar dalam waktu yang

singkat. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia merupakan daerah tujuan wisata dunia, yang banyak mendatangkan turis asing dari manca negara, yang tidak jarang membutuhkan narkoba sebagai pelengkap untuk bersenang-senang di Indonesia.

Masalah perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan sebuah fenomena yang dilandasi oleh berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang menjadikan negara-negara “seolah-olah” tanpa batas. Serupa dengan dua kegiatan penyelundupan yang sebelumnya, penyelundupan obat-obatan terlarang (*drugs*), juga menimbulkan kerugian dan dampak besar bagi Indonesia, yang sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa Indonesia. Maraknya aktivitas penyelundupan obat-obatan terlarang dan penggunaannya oleh generasi muda, berdampak terhadap melemahnya generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa. Bila tidak ditanggulangi maka dalam jangka panjang, dapat terjadi Indonesia dapat kehilangan satu generasi yang potensial membangun negara ini. Walaupun pemerintah telah meningkatkan pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan darat dan laut, aktivitas ini masih marak terjadi yang terlihat dari banyak kasus penggunaan obat-obatan terlarang di tanah air, yang ditangani oleh Polri.

9) Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada Tahun 1998, kasus perdagangan manusia di Indonesia mengalami peningkatan. Penyebab dari persoalan ini adalah, sebagai dampak krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia tersebut, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga harus gulung tikar, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana. Saat ini, pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja yang di butuhkan oleh masyarakat, akibatnya tingkat pengangguran mengalami peningkatan dan jumlah keluarga miskin bertambah, kondisi ini menjadi peluang terus berlangsungnya perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Kasus terjadinya perdagangan manusia di Indonesia sering tidak nyata di permukaan, karena sering tersamar dengan menggunakan usaha ilegal seperti perusahaan pengerah tenaga kerja (PJTKI). Sejumlah sektor pekerjaan non formal sangat rentan terhadap *human trafficking*, antara lain buruh migran, pembantu rumah tangga (PRT) dan pekerja sex komersial (PSK).

Dalam kondisi ini, wanita dan anak-anak sangat potensial menjadi sasaran perdagangan manusia dan tidak jarang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Kejahatan perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak, menimbulkan keprihatinan negara-negara di dunia karena telah mengakibatkan kerugian material dan sosial bagi beberapa negara (baik negara asal, negara transit maupun negara sasaran). Di kawasan Asia Tenggara, aktivitas ini meningkat frekuensinya akibat krisis ekonomi melanda beberapa negara di kawasan. Oleh karena itu, aktivitas perdagangan gelap manusia erat berkaitan dengan sindikat pencucian uang, penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang, serta bentuk-bentuk kejahatan lintas negara lainnya yang berdampak terganggunya mobilitas sumber-sumber keuangan negara.

10) **Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*).**

Seiring dengan kemajuan dan meningkatnya pemanfaatan teknologi informatika, maka Indonesia menghadapi bentuk ancaman baru berupa kejahatan dunia maya. Aktivitas ilegal ini dapat dilakukan oleh individu dan kelompok yang berdiri sendiri, maupun oleh negara tertentu untuk mengacaukan sistem informasi nasional dan komunikasi militer (TNI) dengan melakukan penyesatan informasi (dis-informasi) dan pembentukan opini yang menyudutkan pemerintah Indonesia dan TNI. Hingga kini, Indonesia belum memiliki perangkat/instrumen yang kuat dan efektif untuk menanggulangi kejahatan asimetris ini, termasuk dalam hal peraturan perundangan yang jelas dan mengikat. Padahal, dalam era pengiriman dan penyebaran informasi secara cepat dan mondial, *cyber crimes* menjadi sarana efektif untuk mempengaruhi opini publik di dalam dan luar negeri. Demikian pula, pemerintah belum melakukan pembantahan berita secara rutin terhadap isu-isu yang diangkat oleh kelompok separatis, seperti berita sepihak tentang kekerasan-kekerasan yang dilakukan TNI.

Penyelewengan penggunaan internet menjadi lebih besar dampaknya bila mengikuti perkembangan terakhir terkait digunakannya media ini sebagai wadah/sarana untuk menggalang dana, berkoordinasi, dan meniru metode aksi kekerasan oleh kelompok teroris domestik ataupun kelompok separatis di tanah air. Untuk itu, terhadap perkembangan kemajuan teknologi informasi dan bentuk-bentuk tindakan yang menggunakan media internet, baik yang sudah tergolong sebagai tindak kejahatan ataupun yang belum, harus terus dicermati dan dikembangkan kemampuan penanganannya oleh aparat keamanan, dan instansi yang berwenang.

11) **Pencucian Uang (*Money Laundering*).**

Tindak kejahatan pencucian uang dapat terjadi di negara manapun di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kemajuan

teknologi di bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi yang semakin cepat sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan pencucian uang (*money laundering*).

Seseorang atau organisasi pelaku tindak kejahatan dapat dengan mudah dan cepat mentransfer uang hasil kejahatannya hanya dengan menggunakan fasilitas internet perbankan atau perbankan elektronik (*e-banking*) ke suatu bank atau melakukan berbagai transaksi melalui internet (*e-commerce*) secara ilegal. Demikian mudahnya praktek kejahatan *money laundering* menandakan bahwa hampir tidak ada negara yang luput dari sasaran dan target kejahatan ini.

Dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia semakin disibukkan oleh masalah *money laundering*, yang muncul dan berkembang secara cepat menyusul resesi ekonomi dan politik yang melanda negara ini. Indonesia dinilai menjadi salah satu surga atau pusat dari kejahatan ini, yang sesungguhnya dikarenakan keterkaitan yang erat antara *money laundering* dengan kejahatan lintas negara dan berbagai tindak pidana lainnya.

Sejumlah pencucian uang di Indonesia disinyalir berasal dari praktek korupsi, perjudian, penjualan narkoba, *insider trading*, pemalsuan uang, dan aktivitas ilegal lain yang dilakukan tidak saja di Indonesia melainkan juga di berbagai negara di dunia. Pengalihan dana hasil kejahatan dari dalam ke luar negeri atau sebaliknya tidak hanya merugikan Indonesia dari segi ekonomi, melainkan juga dari segi politik. Kejahatan ini secara nyata memiliki dimensi internasional, terutama dengan besarnya desakan dan tuntutan negara-negara dan sejumlah organisasi internasional agar Indonesia serius menanggulanginya dan mengadopsi perangkat pencegahan yang efektif. Dengan disahkannya UU tentang pencucian uang, penilaian negatif terhadap Indonesia berkurang. Namun demikian, masih maraknya kejahatan lintas negara lain menyebabkan kejahatan *money laundering* diperkirakan tetap marak terjadi di dalam negara dan melalui Indonesia.

12) Bencana Alam (Natural Disaster).

Sebagai daerah yang terletak pada tiga lempeng (*plate*) yang selalu bergerak, Indonesia rentan terhadap bencana alam gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik yang terjadi di laut dapat mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami yang banyak membawa korban, seperti yang terjadi di Aceh dan Nias, dan tsunami juga melanda daerah di Pangandaran, di pantai selatan Pulau Jawa. Terjadinya gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang diikuti tidak lama kemudian dengan bencana banjir di sejumlah wilayah di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, memperlihatkan bahwa bencana alam merupakan permasalahan yang akan terus menerus

dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi di berbagai daerah adalah bencana yang secara tidak langsung diakibatkan oleh kerusakan lingkungan ekosistem hutan, baik karena faktor alamiah maupun karena perbuatan manusia seperti pembalakan kayu secara liar.

Bila penanganan bencana terhadap korban dan pengungsi, baik dalam konteks darurat, rehabilitasi maupun rekonstruksi, tidak memuaskan dan dianggap masyarakat sangat lambat, maka secara tidak langsung menimbulkan perasaan kekecewaan terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karenanya, dalam ketiga proses penanganan bencana tersebut, TNI memiliki peran besar dalam mengurangi penderitaan para korban.

Selain itu, dengan menguatnya kerja sama militer dalam rangka bantuan penanganan bencana alam yang melibatkan masyarakat internasional, seperti terlihat dalam kasus gempa dan tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta, menunjukkan keterbatasan kemampuan penanganan Indonesia dalam menghadapi bencana alam yang berskala besar.

13) Kerusakan Lingkungan Hidup.

Tekanan demografis yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai jenis sumber daya cenderung mendorong pemanfaatan sumber daya dengan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan menjadi sumber ancaman yang dalam jangka panjang akan semakin memperlemah Indonesia. Dampak fenomena perubahan iklim akan semakin menambah kompleksitas dalam penanganan kerusakan lingkungan di tanah air.

14) Ketergantungan Pangan.

Kondisi ketahanan pangan nasional yang mendapat tantangan akibat penambahan jumlah penduduk dan lemahnya strategi untuk meningkatkan produksi pangan akan menyebabkan Indonesia bergantung pada pasokan dari luar negeri. Kondisi ketergantungan pangan ini tidak hanya berdimensi sosial-ekonomi semata, melainkan dalam jangka panjang akan dapat merambah pada dimensi politik, baik dalam maupun luar negeri.

15) Ketergantungan Energi.

Masih rendahnya produksi minyak dan gas bumi yang tidak seimbang dengan kebutuhan domestik, memaksa Indonesia untuk terus menerus mengimpor sumber daya energi. Kondisi ini harus mampu diatasi karena dalam jangka panjang akan berdampak terhadap situasi ekonomi, politik dan keamanan nasional, khususnya yang berkaitan dengan upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat kelas bawah dan menengah keatas.

16) Penyakit/Hama baru.

Pemanasan global menyebabkan perubahan drastis suhu dan iklim dunia. Dalam kecenderungan demikian, diperkirakan sejumlah penyakit menular atau hama jenis baru akan bermunculan, sehingga menghadirkan gangguan terhadap dinamika dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia relatif lamban dalam upaya penelitian di bidang ini, sehingga respon dalam mengatasi masalahnya lebih banyak bersifat reaktif.

17) Radikalisme/Ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila.

Kemajuan teknologi yang memudahkan penyebaran informasi hingga nilai-nilai radikal. Ditengah-tengah kondisi menurunnya kualitas pendidikan warga dan rendahnya kesadaran terhadap Pancasila, Indonesia menghadapi gejala penguatan radikalisme dan ideologi-ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak terhadap degradasi sosial dan politik yang sangat mempengaruhi ketahanan nasional.

18) Konflik Vertikal.

Penguatan kewenangan daerah dalam era otonomi telah menyebabkan terjadinya sejumlah konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Kondisi ini akan terus terjadi apabila upaya mensinkronkan peraturan perundangan berlangsung lamban, dan pihak-pihak terkait lebih mengutamakan kepentingan sektoral. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan ancaman terhadap jalannya pemerintahan, khususnya di daerah, dan sangat berdampak terhadap laju pembangunan.

19) Ancaman Ketahanan Ekonomi.

Dominasi asing terhadap sektor perbankan dan industri nasional yang semakin menguat, dan berpotensi merambah sektor ekonomi vital lainnya, mengakibatkan terancam ketahanan ekonomi nasional. Diperlukan upaya penguatan keterlibatan pihak dalam negeri untuk mencegah semakin lemahnya perekonomian nasional dalam jangka panjang.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

SUBLAMPIRAN B

DATA REKAPITULASI

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TAHUN 2013

SELAMATKAN C. DARI LAMICRAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 ANGGARAN 2013 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGANGKUTAN PERHIMPATAN NEGARA TAHUN 2013

PERGESEKSIAN PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS KEMHAN DAN TNI TAHUN 2013

| NO | KODE | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2013 | PAGU INDIKATIF SEBELUM | PAGU INDIKATIF SEBELUM TASULATAS | PAGU INDIKATIF RNP | KEMHA | PRIORITAS M/B/HAYWEG |
|------|------|--|--|------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1. | 02 | Program Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan | | | | | | | |
| 1.01 | 02 | Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan | Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan | 20% | 18.541.927,60 | 20.738.676,74 | 20.738.676,74 | 20.738.676,74 | |
| 1.02 | 02 | Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan | Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan | 40% | 15.867.005,60 | 18.126.785,60 | 18.126.785,60 | 18.126.785,60 | |
| 1.03 | 02 | Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan | Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 1.04 | 02 | Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan | Peningkatan Sarpras Aparatur Kemhan | | 15.846.005,60 | 18.126.785,60 | 18.126.785,60 | 18.126.785,60 | |
| 2. | 04 | Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan | | | | | | | |
| 2.01 | 04 | Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan | Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan | 3 Pakej | 1.128.222,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | |
| 2.02 | 04 | Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan | Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 2.03 | 04 | Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan | Program Penelitian dan Pengembangan Kemhan | Religius dan Transparansi | 1.104.222,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 3. | 05 | Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI | | | | | | | |
| 3.01 | 05 | Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI | Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI | 1.000 | 115.000,00 | 113.251,07 | 113.251,07 | 113.251,07 | |
| 3.02 | 05 | Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI | Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI | | 2.500,00 | 112.251,07 | 112.251,07 | 112.251,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|---|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 4. | 06 | Program Strategi Pertahanan | | | 20.000,00 | 13.940,07 | 13.940,07 | 13.940,07 | |
| | 406 | Analisa Strategi | Pembinaan kemampuan intelektual, moral dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | 65% | 0.000,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | K/L LAKMIB |
| | 406 | Pembinaan keuletan, semangat, dan disiplin "indragiri" 501 | Pembinaan keuletan, semangat, disiplin, dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | 65% | 0.000,00 | 7.387,07 | 7.387,07 | 7.387,07 | K/L LAKMIB |
| 5. | 08 | Program Pengembangan Teknologi dan Tindakan Pertahanan | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
| | 408 | Pembinaan keuletan, semangat, disiplin, dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | Pembinaan keuletan, semangat, disiplin, dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | 10% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | K |
| 6. | 09 | Program Pertensi Pertahanan | | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | |
| | 409 | Pembinaan keuletan, semangat, disiplin, dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | Pembinaan keuletan, semangat, disiplin, dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | 10% | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | D |
| | 409 | Pembinaan keuletan, semangat, disiplin, dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | Pembinaan keuletan, semangat, disiplin, dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | 10% | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | D |
| | 409 | Pembinaan keuletan, semangat, disiplin, dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | Pembinaan keuletan, semangat, disiplin, dan keagamaan, dan keprajabatan yang akan mendukung keberhasilan regional dan global secara efektif dengan daya up to date dan akurat | 10% | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | D |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|---|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| B. | | | | | | | | | |
| 1. | 11 | MADES TNI Program Penggunaan Kekuatan kekutan pertahanan integratif | | | 1.119.480,00 | 1.119.688,71 | 1.119.683,71 | 1.119.683,71 | |
| | 115 | 03243P | Pasukan ekspedisi sebagai penyelenggara kegiatan | 0% | 600.000,00 | 613.225,11 | 615.020,11 | 615.020,11 | K |
| | 116 | Ops Cakrab dan Ops Tustik | Pasukan kualitas dan kualitas operasi kegiatan | 46% | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | K |
| | 117 | Operasi Integritas Strategi | Pemeriksaan kaitan dan kaitan dan kaitan dan pemeriksaan yang dilakukan | 46% | 30.000,00 | 35.355,00 | 35.355,00 | 35.355,00 | K |
| | 120 | Operasi pembinaan wilayah pemeriksaan | Pemeriksaan kaitan dan kaitan dan kaitan dengan pemeriksaan regional | 46% | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | K |
| 2. | 12 | Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Surplus Integratif | | | 464.480,00 | 384.955,00 | 384.955,00 | 384.955,00 | |
| | 125 | Pengadaan MEE | Pemeriksaan kemampuan dalam paket MEX dan bagian | 37% | 50.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | D |
| | 126 | Pengadaan Munisi Khusus | Pemeriksaan kemampuan analisis situasi | 37% | 52.000,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | D |
| | 128 | Pengadaan MKP | Pemeriksaan kemampuan dalam paket MEX dan bagian | 61% | 60.000,00 | 21.235,00 | 21.235,00 | 21.235,00 | D |
| | 132 | Pengadaan Alutsista Strategis Integratif | Pemeriksaan penerimaan MEE | 24% | 302.480,00 | 302.480,00 | 302.480,00 | 302.480,00 | K |
| 3. | 13 | Program Profesionalisme Prajurit Integratif | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | |
| | 136 | Latihan Pembinaan Logistik TIL | Pemeriksaan kemampuan dan kaitan kaitan bagian | 2% | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | D |
| | 141 | Latihan kaitan operasi | Pemeriksaan kemampuan dan kaitan kaitan bagian | 2% | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | K |
| | 148 | Pada kaitan Surplus profesionalisme kegiatan integratif | Pemeriksaan kaitan kaitan kaitan kaitan dengan kaitan kaitan kaitan kaitan kaitan | 10% | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | K |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| C. | 14 | TNI AD Program Duk Kesiapan Matri Darat | | | 2.592.000,00 57.000,00 | 2.668.285,42 81.999,71 | 2.768.285,42 81.999,71 | 2.668.285,42 81.999,71 | |
| L. | 444 | Pengembangan rencana dan pelaksanaan Matri Darat | Pemeriksaan kesiapan operasi program non personal materiil dan dokumen serta keselamatan dan keselamatan awak diri. | 10% | 27.000,00 | 38.080,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | K |
| | 454 | Pendidikan dan pengembangan perahu dan Matri Darat | Pendidikan dan pengembangan perahu dan Matri Darat | 100% | 20.000,00 | 25.914,7 | 25.914,71 | 25.914,71 | K/L/CAKUP |
| 2. | 15 | Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista/Surplus Matri Darat | | | 2.366.000,00 | 2.313.069,16 | 2.413.069,16 | 2.313.069,16 | |
| | 458 | Pengadaan/penggantian pesawat tempur | Pemeriksaan pengalihan dan penanabihan pesawat tempur | 2% | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | L |
| | 459 | Pengadaan/penggantian pesawat tempur (selanjutnya) | Pemeriksaan pengalihan dan penanabihan pesawat tempur | 2% | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | L |
| | 461 | Pengadaan/penggantian senjata dan Yurdi | Pemeriksaan pengalihan dan penanabihan senjata dan Yurdi | 4% | 500.000,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | L |
| | 462 | Pengadaan/penggantian Materiil Alutsista | Pemeriksaan pengalihan dan penanabihan materiil Alutsista | 2% | 55.000,00 | 107.500,00 | 95.000,00 | 135.000,00 | L |
| | 464 | Pengembangan latihan Surplus Matri Darat | Ketersediaan dan siap pakai latihan Surplus Matri Darat | 2% | 40.000,00 | 187.069,16 | 187.069,16 | 187.069,16 | L |
| | 465 | Pengadaan Alutsista Senjata Matri Darat | Pemeriksaan Alutsista Matri Darat | 25% | 1.790.000,00 | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 | K |
| 3. | 16 | Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matri Darat | | | 270.000,00 | 273.210,55 | 273.210,55 | 273.210,55 | |
| | 466 | Latihan Matri Darat | Pemeriksaan kesiapan dan keselamatan latihan Matri Darat | 48% | 270.000,00 | 273.210,55 | 273.210,55 | 273.210,55 | L |
| | 473 | Pemeriksaan Kesiapan dan keselamatan latihan Matri Darat | Pemeriksaan kesiapan dan keselamatan latihan Matri Darat | 1% | 30.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | L |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|---|--|-----|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| D. | | TNI AL | | | 1.347.000,00 | 1.848.000,00 | 675.000,00 | 1.177.500,00 | |
| 1. | 17 | Program dukungan kesigapan Matrik Laut | | | 58.000,00 | 34.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | |
| | 185 | Pengembangan Survei Hidro | Persentase kesigapan dan kelengkapan data dan informasi hidro oseanografi secara akurat, tepat waktu | 50% | 9.000,00 | 5.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | D |
| | 186 | Penerapan teknologi dan inovasi dalam pengembangan Matrik Laut | Persentase kesigapan dan kelengkapan data dan informasi teknologi secara akurat, tepat waktu | 75% | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | D |
| | 187 | Upholding Matrik Laut | Persentase kesigapan dan kelengkapan data dan informasi secara akurat, tepat waktu | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | D |
| 2. | 18 | Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta pengembangan fasilitas dan Sarpras Matrik Darat | | | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 438.000,00 | 993.500,00 | |
| | 187 | Pengembangan peralatan pendukung Matrik Laut | Persentase kesigapan dan pemeliharaan peralatan Matrik Laut | 12% | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | D |
| | 188 | Pengembangan peralatan pendukung Matrik Laut | Persentase kesigapan dan pemeliharaan peralatan Matrik Laut | 15% | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | D |
| | 189 | Pengembangan peralatan pendukung Matrik Laut | Persentase kesigapan dan pemeliharaan peralatan Matrik Laut | 30% | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 127.000,00 | D |
| | 190 | Pengembangan peralatan pendukung Matrik Laut | Persentase kesigapan dan pemeliharaan peralatan Matrik Laut | 35% | 950.000,00 | 950.000,00 | 300.000,00 | 594.200,00 | K |
| 3. | 19 | Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matrik Laut | | | 1.38.000,00 | 1.38.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | |
| | 190 | Peningkatan profesionalisme personel Matrik Laut | Persentase kesigapan dan pemeliharaan peralatan Matrik Laut | 65% | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | K |
| | 191 | Peningkatan profesionalisme personel Matrik Laut | Persentase kesigapan dan pemeliharaan peralatan Matrik Laut | 75% | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | K |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|-----|--|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| B. | | | | | | | | | |
| 1. | 20 | TRN AD Program dukungan kedisiplinan Mitra Makara | | | | | | | |
| | 526 | Liberalisasi Makara Utara | Penyediaan sarana dan prasarana: K. Bangunan | Teknik : | 2.039.000,00 | 2.039.726,15 | 3.041.726,15 | 2.039.726,15 | |
| | 527 | Penyediaan sarana dan prasarana: K. Bangunan | Penyediaan sarana dan prasarana: K. Bangunan | Teknik : | 59.000,00 | 59.726,15 | 59.726,15 | 39.726,15 | |
| | 529 | Penyediaan sarana dan prasarana: K. Bangunan | Penyediaan sarana dan prasarana: K. Bangunan | Teknik : | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | C |
| | | | | 06% | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | C |
| | | | | 06% | 9.000,00 | 9.726,15 | 9.726,15 | 6.726,15 | C |
| 2. | 21 | Program modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta pengembangan fasilitas dan Sarpras Mitra Utara | | | 2.600.000,00 | 2.000.000,00 | 3.602.000,00 | 2.600.000,00 | |
| | 540 | Penyediaan Alutsista dan Sarpras Mitra Utara | Penyediaan sarana dan prasarana: K. Bangunan | Teknik : | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | N |
| Jumlah | | | | | 25.719.407,60 | 26.014.322,02 | 28.395.744,02 | 27.944.022,02 | |

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

SUBLAMPIRAN C

PERGESERAN PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS
KEMHAN DAN TNI TAHUN 2013

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|------|---|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4. | 06 | Program Strategi Pertahanan | | | | | | | |
| | 086 | Awalita Strategi | Pertahanan sebagai profil strategis | 85% | 20.000,00 | 13.940,97 | 13.940,97 | 13.940,97 | K/L - KARNAS |
| | 1389 | Pertahanan sebagai profil strategis | Pertahanan sebagai profil strategis | 69% | 10.000,00 | 6.555,20 | 6.555,20 | 6.555,20 | K/L - KARNAS |
| 5. | 08 | Program Pengembangan Teknologi dan Industri pertahanan | | | | | | | |
| | 10 | Produksi Arsenik Industri dalam negeri | Pertahanan sebagai profil strategis | 17% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | N |
| 6. | 09 | Program Pertahanan Pertahanan | | | | | | | |
| | 1403 | Pertahanan sebagai profil strategis | Pertahanan sebagai profil strategis | 49% | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | B |
| | 1404 | Pertahanan sebagai profil strategis | Pertahanan sebagai profil strategis | 40% | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | B |
| | 1405 | Pertahanan sebagai profil strategis | Pertahanan sebagai profil strategis | 40% | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | B |
| | 1406 | Pertahanan sebagai profil strategis | Pertahanan sebagai profil strategis | 40% | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | B |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|---|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| B. | | MABES TNI | | | 1.192.480,00 | 1.169.633,71 | 1.169.633,71 | 1.169.633,71 | |
| 1. | 11 | Program Penggunaan Kekuatan | | | 668.000,00 | 713.678,71 | 713.678,71 | 713.678,71 | |
| | 415 | UPP/EP | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 10% | 668.000,00 | 668.000,00 | 668.000,00 | 668.000,00 | R |
| | 416 | Epa Cusdhan Ops Studen | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 10% | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | R |
| | 417 | Operasi Intelijen Siswa/2 | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 10% | 30.000,00 | 35.555,50 | 35.555,50 | 35.555,50 | R |
| | 420 | Spesial Perindag dan Layanan | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 10% | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | R |
| 2. | 13 | Modemial Alutsista/Mod Alutsista/Surpres Integratif | | | 464.480,00 | 384.955,00 | 384.955,00 | 384.955,00 | |
| | 425 | Pengantar MKK | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 17% | 55.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | D |
| | 426 | Pengantar Yurisdiksi | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 17% | 55.000,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | R |
| | 428 | Pengantar MKB | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 64% | 25.000,00 | 21.225,00 | 21.225,00 | 21.225,00 | B |
| | 432 | Pengantar Alutsista Senjata Integratif | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 24% | 362.480,00 | 302.460,00 | 302.460,00 | 302.460,00 | R |
| 3. | 13 | Program Profesionalisme Prajurit Integratif | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | |
| | 438 | Latihan Pendidikan Dasar TNI | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 21% | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | B |
| | 439 | Latihan Pendidikan Prajurit | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 21% | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | R |
| | 435 | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan | 10% | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | B |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|-----|--|--|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| C. 1. | 14 | TNI AD Program Duk Kesiapan Matri Darat Pengembangan kemampuan profesionalitas dan kesiapan matri darat | | | 2.598.000,00 57.000,00 | 2.668.265,42 81.999,71 | 2.768.265,42 81.999,71 | 2.668.265,42 81.999,71 | |
| | 141 | Peningkatan kemampuan profesionalitas dan kesiapan matri darat | Pemantapan kemampuan operasi pengemasan personal material dan balokman serta efektivitas dan efisiensi di dalam di | 13% | 16.000,00 | 26.380,00 | 56.000,00 | 26.000,00 | B |
| | 141 | Pendidikan dan penelaahan: peralihan Matri Darat | Pertanggung jawab operasi serta pengemasan di dalam Angkatan | Tak terd. | 20.000,00 | 25.216,71 | 25.016,71 | 25.016,71 | K/L-MAKEDG |
| 2. | 15 | Program Modernisasi Alutsista dan Jasa Alutsista/Sarpras Matri Darat Pengembangan kemampuan kesiapan dan kemampuan | | | 2.266.000,00 | 2.313.069,16 | 2.413.069,16 | 2.313.069,16 | |
| | 145 | Pengadaan/pengembangan sarana prasarana | Pembinaan dan pembinaan dalam | 21% | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | B |
| | 145 | Pengadaan/pengembangan sarana prasarana | Pembinaan dan pembinaan dalam | 21% | 26.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | B |
| | 146 | Pengadaan/pengembangan sarana prasarana | Pembinaan dan pembinaan dalam | 21% | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | B |
| | 146 | Pengadaan/pengembangan sarana prasarana | Pembinaan dan pembinaan dalam | 21% | 125.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | B |
| | 146 | Pengadaan/pengembangan sarana prasarana | Pembinaan dan pembinaan dalam | 21% | 110.000,00 | 187.062,16 | 187.062,16 | 187.062,16 | B |
| | 146 | Pengadaan/pengembangan sarana prasarana | Pembinaan dan pembinaan dalam | 23% | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.860.000,00 | 1.700.000,00 | B |
| 3. | 16 | Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matri Darat | | | 270.000,00 | 373.316,55 | 273.216,55 | 373.216,55 | |
| | 146 | Lain-lain, Matri Darat | Pembinaan dan pembinaan dalam | 39% | 250.000,00 | 253.316,55 | 353.216,55 | 353.216,55 | B |
| | 146 | Peningkatan Sarpras profesionalisme personel Matri Darat | Pembinaan dan pembinaan dalam | 11% | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | B |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------|-----------|--|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| E. | | 100 AD | | | | | | | |
| 1. | 20 | Program dukungan kesiapan Mitra Udara | | | | | | | |
| | 526 | Penyempurnaan Dokumen Kerja Sama | Partisipasi RSD dalam kerja sama pengujian | Tarif | 2.039.000,00 | 2.039.736,15 | 8.041.736,15 | 2.039.736,15 | |
| | 527 | Pengembangan dan peningkatan kualitas Mitra Usaha | Pemantauan kualitas dan kuantitas data real time dan pengujian secara langsung | 38% | 39.000,00 | 39.736,15 | 39.736,15 | 39.736,15 | II |
| | 528 | Peningkatan mutu Mitra Usaha | Pemantauan kualitas dan kuantitas produk sesuai standar persyaratan | 38% | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | III |
| | 529 | Peningkatan mutu Mitra Usaha | Pemantauan kualitas dan kuantitas produk sesuai standar persyaratan | 38% | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | IV |
| 2. | 21 | Program modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta pengembangan kualitas dan Surplus Mitra Udara | | | | | | | |
| | 530 | Pengadaan Alutsista Strategis Mitra Usaha | Pengadaan Alutsista Strategis Mitra Usaha | 38% | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.002.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | 531 | Pengadaan Alutsista Strategis Mitra Usaha | Pengadaan Alutsista Strategis Mitra Usaha | 38% | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.002.000,00 | 2.000.000,00 | VI |
| | | | JUMLAH | | 25.719.407,60 | 28.014.322,02 | 28.895.744,02 | 27.544.022,02 | |

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

SUBLAMPIRAN D**KOMPARASI ANGGARAN TAHUN 2012 DENGAN
RENCANA KEBUTUHAN DAN DUKUNGAN
ANGGARAN TAHUN 2013**

SILAHKAN DARI LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NO. 57 TAHUN 2010
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2012

KOMPARASI ANGGARAN TAHUN 2012 DENGAN RENCANA KEBUTUHAN DAN DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2013

| NO | PROGRAM | TAHUN 2012 | | | TAHUN 2013 | | | | |
|------|--|------------|--------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | DIPA | RENSIA BASELINE | PANPROGAR | INDIKATIF | TRJ LATERAL | PERPES NO 54 REP | REKUNJA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | KEMHAN | 19.002.11 | 3.810.32 | 19.141.71 | 22.475.60 | 22.475.60 | 22.475.60 | 22.475.60 | 22.475.60 |
| 1 | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UU Kemhan | 899,84 | 1.288,34 | 1.397,30 | 893,07 | 844,44 | 940,22 | 934,12 | 934,12 |
| 2 | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan | 15.568,22 | 194,35 | 14.138,38 | 15.236,79 | 18.247,42 | 18.247,42 | 18.247,42 | 18.247,42 |
| 3 | Pengembangan dan peningkatan kompetensi aparatur Kemhan | 21,68 | 17,31 | 27,05 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 |
| 4 | Penelitian dan pengembangan Kemhan | 140,41 | 21,55 | 1.201,07 | 1.136,23 | 1.134,01 | 1.134,23 | 1.134,01 | 1.134,01 |
| 5 | Penelitian dan Pelatikan Aparatur Kemhan | 157,38 | 100,65 | 170,89 | 154,48 | 152,07 | 152,07 | 152,07 | 152,07 |
| 6 | Strategi Pertahanan | 47,97 | 46,33 | 92,17 | 95,14 | 91,99 | 90,90 | 90,90 | 90,90 |
| 7 | Perencanaan Umum dan Penganggaran Perencanaan | 33,84 | 415,20 | 49,02 | 32,48 | 31,39 | 31,38 | 31,38 | 31,38 |
| 8 | Pengembangan teknologi dan industri pertahanan | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 9 | Polensi Perencanaan | 42,19 | 35,83 | 174,38 | 41,39 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 |
| 10 | Keluasan Perencanaan | 487,19 | 55,46 | 233,10 | 46,16 | 479,10 | 453,10 | 460,19 | 460,19 |
| II. | MAKES TNI | 6.023,66 | 7.583,85 | 9.563,60 | 5.900,43 | 5.900,43 | 5.900,43 | 5.900,43 | 5.900,43 |
| 23 | Pengembangan manajemen dan administrasi aparat | 3.175,25 | 3.163,20 | 3.627,35 | 3.111,89 | 3.111,89 | 3.111,89 | 3.111,89 | 3.111,89 |
| 11 | Penggunaan teknologi, penelitian, pengembangan | 1.738,79 | 1.842,95 | 2.265,12 | 1.697,34 | 1.780,12 | 1.790,12 | 1.790,12 | 1.790,12 |
| 12 | Maklumat Administrasi, Notifikasi, dan surat tugas | 541,42 | 2.328,02 | 5.330,65 | 781,43 | 689,93 | 689,93 | 689,93 | 689,93 |
| 13 | Proses manajemen Perencanaan, Penganggaran | 318,20 | 339,35 | 310,48 | 309,52 | 309,52 | 309,52 | 309,52 | 309,52 |
| III. | TNI AD | 30.297,10 | 26.093,35 | 63.690,57 | 30.851,68 | 30.851,67 | 30.851,67 | 30.851,67 | 30.851,67 |
| 24 | Pengembangan Manajemen dan Administrasi Makna Dasar | 26.294,47 | 16.035,02 | 35.847,56 | 27.045,29 | 27.082,41 | 27.082,41 | 27.082,41 | 27.082,41 |
| 14 | Pengembangan Kegiatan Makna Dasar | 777,11 | 3.510,19 | 3.117,01 | 455,39 | 427,80 | 427,80 | 427,80 | 427,80 |
| 15 | Modernisasi Administrasi dan Non Administrasi Makna Dasar | 2.514,06 | 5.786,71 | 21.552,53 | 2.459,99 | 2.478,91 | 2.478,91 | 2.478,91 | 2.478,91 |
| 16 | Pengembangan Profesionalisme Personal Makna Dasar | 911,16 | 757,15 | 5.133,18 | 891,01 | 962,42 | 962,42 | 962,42 | 962,42 |

| I | II | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| IV. | TNI AL | | 14.289,80 | 19.755,51 | 9.284,90 | 9.284,90 | 9.284,90 | 9.284,90 | 9.284,90 |
| 25 | Peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam operasional Matrik Laut | 6.712,30 | 4.027,61 | 7.770,29 | 6.815,98 | 6.815,98 | 6.815,98 | 6.815,98 | 6.815,98 |
| 17 | Peningkatan Kemampuan Matrik Laut | 1.078,82 | 1.967,12 | 1.283,10 | 763,86 | 763,86 | 763,86 | 763,86 | 763,86 |
| 18 | Maintenance Alutsista dan Unit Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sertifikasi Perawatan Negara Matrik Laut | 1.004,01 | 6.930,29 | 10.275,72 | 1.045,22 | 1.045,22 | 1.045,22 | 1.045,22 | 1.045,22 |
| 19 | Peningkatan Profesionalisme Personal Matrik Laut | 326,80 | 482,75 | 417,50 | 319,84 | 319,84 | 319,84 | 319,84 | 319,84 |
| V. | TNI AD | | | | | | | | |
| 26 | Peningkatan Kemampuan dan Unit Matrik Udara | 8.010,71 | 12.516,25 | 14.503,57 | 8.025,90 | 8.025,90 | 8.025,90 | 8.025,90 | 8.025,90 |
| 20 | Peningkatan Kemampuan Matrik Udara | 3.510,05 | 2.426,27 | 4.180,16 | 3.750,34 | 3.750,34 | 3.750,34 | 3.750,34 | 3.750,34 |
| 21 | Maintenance Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sertifikasi Matrik Udara | 3.400,45 | 9.124,53 | 9.420,59 | 3.463,11 | 3.463,11 | 3.463,11 | 3.463,11 | 3.463,11 |
| 22 | Peningkatan Profesionalisme Personal Matrik Udara | 280,81 | 213,91 | 299,84 | 274,85 | 274,85 | 274,85 | 274,85 | 274,85 |
| TOTAL (Jumlah I-II+III+IV) | | 72.538,51 | 64.292,37 | 126.654,96 | 76.538,50 | 76.538,50 | 76.538,50 | 76.538,50 | 76.538,50 |

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

SUBLAMPIRAN E DARI LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2013

APLIKASI RENJA HANNEG TAHUN ANGGARAN 2013

1. FORMULIR-1

- **VISI, MISI, SASARAN KEGIATAN DAN
DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS**

2. FORMULIR-2

- A. **UMUM**
- B. **HASIL/*OUTCOME* DAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)**
- C. **KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN**
 - 4) **INDIKATOR KINERJAKEGIATAN DAN TARGET**
 - 5) **SUMBER PENDANAAN**
 - 6) **PENDANAAN PHLN ATAU PDN TAHUN 2013**

3. FORMULIR-3

- **NEW INITIATIVES**

4. PENDUKUNG

- **KEMENTERIAN**
 - 1) **REKAPITULASI UNIT ORGANISASI**
 - 2) **REKAPITULASI PROGRAM**
 - 3) **RINCIAN KEGIATAN**

FORMULIR-1



FORMULIR 1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANAHAN

I. VISI

| No | Uraian Visi |
|----|---|
| 01 | Terdapatnya Pertanian Negara yang Tangguh |

II. MISI

| No | Uraian Misi |
|----|---|
| 01 | Meningkatkan Kualitas Produksi Pangan Melalui Peningkatan Produktivitas |

III. SASARAN STRATEGIS

| No | Uraian Sasaran Strategis |
|----|--|
| 01 | Setiap petani/petani muda mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas |
| 02 | Setiap petani/petani muda memiliki akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 03 | Pemerintah mempunyai kebijakan dan regulasi yang dapat meningkatkan produktivitas petani/petani muda |
| 04 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 05 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 06 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 07 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 08 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 09 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 10 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 11 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 12 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 13 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |
| 14 | Setiap petani/petani muda mempunyai akses yang layak dan bebas yang sesuai kebutuhan |

Formulir 1

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS [N/B/KL]

| Kode | Berkas/Keputusan/Satuan Kegiatan | Mekanisme/Strategi/Kegiatan (N/B/KL) | Prioritas (N/B/KL) | Tingkat Volume 2013 | Arah dan Volume | | | AUGUST 2013 |
|------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------|------|-------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dijumlahkan

| No. | Nama Kegiatan/Instansi/Tempat | Judul/Isi Materi/Topik/Program | Unit | Durasi | Penyaji/Instansi | | Tahun | | Alasan/Justifikasi |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|------|--------|------------------|----------|-------|------|--------------------|
| | | | | | Penyaji | Instansi | 2023 | 2024 | |
| 1. | 1.1. Kegiatan 1.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2. | 2.1. Kegiatan 2.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 3. | 3.1. Kegiatan 3.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 4. | 4.1. Kegiatan 4.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 5. | 5.1. Kegiatan 5.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 6. | 6.1. Kegiatan 6.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 7. | 7.1. Kegiatan 7.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 8. | 8.1. Kegiatan 8.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 9. | 9.1. Kegiatan 9.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 10. | 10.1. Kegiatan 10.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 11. | 11.1. Kegiatan 11.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 12. | 12.1. Kegiatan 12.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 13. | 13.1. Kegiatan 13.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 14. | 14.1. Kegiatan 14.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 15. | 15.1. Kegiatan 15.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 16. | 16.1. Kegiatan 16.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 17. | 17.1. Kegiatan 17.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 18. | 18.1. Kegiatan 18.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 19. | 19.1. Kegiatan 19.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20. | 20.1. Kegiatan 20.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 21. | 21.1. Kegiatan 21.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 22. | 22.1. Kegiatan 22.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 23. | 23.1. Kegiatan 23.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 24. | 24.1. Kegiatan 24.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 25. | 25.1. Kegiatan 25.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 26. | 26.1. Kegiatan 26.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 27. | 27.1. Kegiatan 27.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 28. | 28.1. Kegiatan 28.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 29. | 29.1. Kegiatan 29.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 30. | 30.1. Kegiatan 30.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 31. | 31.1. Kegiatan 31.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 32. | 32.1. Kegiatan 32.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 33. | 33.1. Kegiatan 33.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 34. | 34.1. Kegiatan 34.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 35. | 35.1. Kegiatan 35.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 36. | 36.1. Kegiatan 36.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 37. | 37.1. Kegiatan 37.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 38. | 38.1. Kegiatan 38.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 39. | 39.1. Kegiatan 39.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 40. | 40.1. Kegiatan 40.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 41. | 41.1. Kegiatan 41.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 42. | 42.1. Kegiatan 42.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 43. | 43.1. Kegiatan 43.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 44. | 44.1. Kegiatan 44.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 45. | 45.1. Kegiatan 45.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 46. | 46.1. Kegiatan 46.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 47. | 47.1. Kegiatan 47.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 48. | 48.1. Kegiatan 48.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 49. | 49.1. Kegiatan 49.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 50. | 50.1. Kegiatan 50.1.1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 51. | 51.1. Kegiatan 51.1.1. ... | ... | ... | ... | | | | | |

www.djpp.depkes.go.id

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KU)

| Kode | Tipe Kegiatan | Sub-Program | Indikator Kinerja Kegiatan (N/B/Durasi) | Sub-Program (N/B/Durasi) | Jenis Kegiatan | Volume 2013 | Pembelian 2013 (Volume) | | | NOMOR 2013 |
|------|---------------|-------------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 101 | 101.1 | 101.1.1 | 101.1.1.1 | 101.1.1.1.1 | 101.1.1.1.1.1 | 101.1.1.1.1.1 | 101.1.1.1.1.1 | 101.1.1.1.1.1 | 101.1.1.1.1.1 | 101.1.1.1.1.1 |
| 102 | 102.1 | 102.1.1 | 102.1.1.1 | 102.1.1.1.1 | 102.1.1.1.1.1 | 102.1.1.1.1.1 | 102.1.1.1.1.1 | 102.1.1.1.1.1 | 102.1.1.1.1.1 | 102.1.1.1.1.1 |
| 103 | 103.1 | 103.1.1 | 103.1.1.1 | 103.1.1.1.1 | 103.1.1.1.1.1 | 103.1.1.1.1.1 | 103.1.1.1.1.1 | 103.1.1.1.1.1 | 103.1.1.1.1.1 | 103.1.1.1.1.1 |
| 104 | 104.1 | 104.1.1 | 104.1.1.1 | 104.1.1.1.1 | 104.1.1.1.1.1 | 104.1.1.1.1.1 | 104.1.1.1.1.1 | 104.1.1.1.1.1 | 104.1.1.1.1.1 | 104.1.1.1.1.1 |
| 105 | 105.1 | 105.1.1 | 105.1.1.1 | 105.1.1.1.1 | 105.1.1.1.1.1 | 105.1.1.1.1.1 | 105.1.1.1.1.1 | 105.1.1.1.1.1 | 105.1.1.1.1.1 | 105.1.1.1.1.1 |
| 106 | 106.1 | 106.1.1 | 106.1.1.1 | 106.1.1.1.1 | 106.1.1.1.1.1 | 106.1.1.1.1.1 | 106.1.1.1.1.1 | 106.1.1.1.1.1 | 106.1.1.1.1.1 | 106.1.1.1.1.1 |
| 107 | 107.1 | 107.1.1 | 107.1.1.1 | 107.1.1.1.1 | 107.1.1.1.1.1 | 107.1.1.1.1.1 | 107.1.1.1.1.1 | 107.1.1.1.1.1 | 107.1.1.1.1.1 | 107.1.1.1.1.1 |
| 108 | 108.1 | 108.1.1 | 108.1.1.1 | 108.1.1.1.1 | 108.1.1.1.1.1 | 108.1.1.1.1.1 | 108.1.1.1.1.1 | 108.1.1.1.1.1 | 108.1.1.1.1.1 | 108.1.1.1.1.1 |
| 109 | 109.1 | 109.1.1 | 109.1.1.1 | 109.1.1.1.1 | 109.1.1.1.1.1 | 109.1.1.1.1.1 | 109.1.1.1.1.1 | 109.1.1.1.1.1 | 109.1.1.1.1.1 | 109.1.1.1.1.1 |
| 110 | 110.1 | 110.1.1 | 110.1.1.1 | 110.1.1.1.1 | 110.1.1.1.1.1 | 110.1.1.1.1.1 | 110.1.1.1.1.1 | 110.1.1.1.1.1 | 110.1.1.1.1.1 | 110.1.1.1.1.1 |
| 111 | 111.1 | 111.1.1 | 111.1.1.1 | 111.1.1.1.1 | 111.1.1.1.1.1 | 111.1.1.1.1.1 | 111.1.1.1.1.1 | 111.1.1.1.1.1 | 111.1.1.1.1.1 | 111.1.1.1.1.1 |
| 112 | 112.1 | 112.1.1 | 112.1.1.1 | 112.1.1.1.1 | 112.1.1.1.1.1 | 112.1.1.1.1.1 | 112.1.1.1.1.1 | 112.1.1.1.1.1 | 112.1.1.1.1.1 | 112.1.1.1.1.1 |
| 113 | 113.1 | 113.1.1 | 113.1.1.1 | 113.1.1.1.1 | 113.1.1.1.1.1 | 113.1.1.1.1.1 | 113.1.1.1.1.1 | 113.1.1.1.1.1 | 113.1.1.1.1.1 | 113.1.1.1.1.1 |
| 114 | 114.1 | 114.1.1 | 114.1.1.1 | 114.1.1.1.1 | 114.1.1.1.1.1 | 114.1.1.1.1.1 | 114.1.1.1.1.1 | 114.1.1.1.1.1 | 114.1.1.1.1.1 | 114.1.1.1.1.1 |
| 115 | 115.1 | 115.1.1 | 115.1.1.1 | 115.1.1.1.1 | 115.1.1.1.1.1 | 115.1.1.1.1.1 | 115.1.1.1.1.1 | 115.1.1.1.1.1 | 115.1.1.1.1.1 | 115.1.1.1.1.1 |
| 116 | 116.1 | 116.1.1 | 116.1.1.1 | 116.1.1.1.1 | 116.1.1.1.1.1 | 116.1.1.1.1.1 | 116.1.1.1.1.1 | 116.1.1.1.1.1 | 116.1.1.1.1.1 | 116.1.1.1.1.1 |
| 117 | 117.1 | 117.1.1 | 117.1.1.1 | 117.1.1.1.1 | 117.1.1.1.1.1 | 117.1.1.1.1.1 | 117.1.1.1.1.1 | 117.1.1.1.1.1 | 117.1.1.1.1.1 | 117.1.1.1.1.1 |
| 118 | 118.1 | 118.1.1 | 118.1.1.1 | 118.1.1.1.1 | 118.1.1.1.1.1 | 118.1.1.1.1.1 | 118.1.1.1.1.1 | 118.1.1.1.1.1 | 118.1.1.1.1.1 | 118.1.1.1.1.1 |
| 119 | 119.1 | 119.1.1 | 119.1.1.1 | 119.1.1.1.1 | 119.1.1.1.1.1 | 119.1.1.1.1.1 | 119.1.1.1.1.1 | 119.1.1.1.1.1 | 119.1.1.1.1.1 | 119.1.1.1.1.1 |
| 120 | 120.1 | 120.1.1 | 120.1.1.1 | 120.1.1.1.1 | 120.1.1.1.1.1 | 120.1.1.1.1.1 | 120.1.1.1.1.1 | 120.1.1.1.1.1 | 120.1.1.1.1.1 | 120.1.1.1.1.1 |

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

| No | Pencapaian Kegiatan/ Sasaran (Kardus) | Indikator Kinerja Utama (IKU) Output | Rencana Pencapaian (N/B/KL) | Tingkat Pencapaian 2011 | Pencapaian Target/Output | | | Alokasi 2012 |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 14 | 14.1. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.1.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit |
| 14.2 | 14.2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.2.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.2.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.2.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.2.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.2.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.2.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 14.2.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit |
| 15 | 15.1. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.1.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit |
| 15.2 | 15.2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.2.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.2.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.2.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.2.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.2.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.2.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 15.2.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit |
| 16 | 16.1. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.1.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit |
| 16.2 | 16.2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.2.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.2.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.2.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.2.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.2.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.2.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 16.2.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit |
| 17 | 17.1. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.1.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit |
| 17.2 | 17.2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.2.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.2.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.2.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.2.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.2.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.2.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit | 17.2.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah kunjungan ke rumah sakit |

www.djpp.depkumham.go.id

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

| Code | Program Name/Project/Region | Indicator/Activity/Category/Policy/Outcome | Weight (0-100) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | 2442 | 2443 | 2444 | 2445 | 2446 | 2447 | 2448 | 2449 | 2450 | 2451 | 2452 | 2453 | 2454 | 2455 | 2456 | 2457 | 2458 | 2459 | 2460 | 2461 | 2462 |
|------|-----------------------------|--|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|-----------------------------|--|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

FORMULIR-2
UO KEMHAN



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEVITRIM/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN RI
UNIT ORGANSISASI : Kementerian Kesehatan

| Kode | Program | Angka 2012 | | Usah Penderita Tahun 2013 (Juta Rp) | | Angka 2013 | | Rencana Kelembagaan/Rupiah | |
|--------------|--|---------------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------------|
| | | Rupiah | Angka | Rupiah | Angka | Rupiah | Angka | 2012 | 2013 |
| 01 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 998.800,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| 02 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| 03 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| 04 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| 05 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| 06 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| 07 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| 08 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| 09 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| 10 | Program Kesehatan Masyarakat (P2M) - Pencegahan Penyakit Menular | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 10 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| TOTAL | | 10.000.000,0 | 100 | 10.000.000,0 | 100 | 10.000.000,0 | 100 | 10.000.000,0 | 10.000.000,0 |

Angka 2012 : 10.000.000,0 ; 100 ; 10.000.000,0 ; 100 ; 10.000.000,0 ; 100 ; 10.000.000,0 ; 100 ; 10.000.000,0 ; 100



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKNJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga
2. Nama Unit Organisasi
3. Misi Unit Organisasi
4. Sasaran Strategis

KEMENTERIAN PERTANIAN

Kementerian Pertanian

| No | Misi |
|----|--|
| 01 | Kemampuan pangan |
| No | Mendukung Sasaran Strategis |
| 01 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Negara Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |
| 02 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Peternakan Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |
| 03 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Peternakan Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |
| 04 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Peternakan Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |
| 05 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Peternakan Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |
| 06 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Peternakan Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |
| 07 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Peternakan Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |
| 08 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Peternakan Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |
| 09 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Peternakan Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |
| 10 | Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Peternakan Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) |

5. Kode Program

012.01.01

6. Nama Program

Program Penguatan Manajemen dan Kebijakan Peternakan yang Berbasis Peternakan Berkelanjutan

7. Deskripsi Pokok Rancangan

| Pencapaian | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Prasanaan Keberhasilan | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rujukan | | 934.119,0 | | | |
| a. Pendampingan | | 0,0 | | | |
| b. Rujukan Pendampingan | | 934.119,0 | | | |
| 2. PHLN atau PDN | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 934.119,0 | 934.119,0 | 1.276.176,0 | 1.276.176,0 | 1.276.176,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KIU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (KIU) |
|--|---|
| 01. Kelembagaan Peternakan (Pengembangan Kelembagaan Negara Melalui Mekanisme Kolaborasi dan Keterkaitan Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta melalui Pusat Sektor) | 01. Persentase satuan kerja (SK) kabupaten/kota yang memiliki pelayanan publik online, komunikasi dan informasi digital, dan aksesibilitas layanan. |
| | 02. Persentase persentase pelayanan publik online yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi lainnya. |
| | 03. Persentase persentase pelayanan publik online yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi lainnya. |
| | 04. Persentase persentase pelayanan publik online yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi lainnya. |
| | 05. Persentase persentase pelayanan publik online yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi lainnya. |
| | 06. Persentase persentase pelayanan publik online yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi lainnya. |
| | 07. Persentase persentase pelayanan publik online yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi lainnya. |
| | 08. Persentase persentase pelayanan publik online yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi lainnya. |
| | 09. Persentase persentase pelayanan publik online yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi lainnya. |
| | 10. Persentase persentase pelayanan publik online yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi lainnya. |

Formulir 2-1

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---------------|--|
| | <p>01. Rencanan pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kualitas layanan ke pasien, keluarga, masyarakat, dan mitra kerja.</p> <p>02. Persentase rencana yang telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan sistem informasi kesehatan rumah sakit.</p> <p>03. Rasio biaya produksi per unit pelayanan yang efisien dan produktif dalam hal biaya modal, biaya operasi, dan biaya perawatan.</p> <p>04. Rasio biaya produksi per unit pelayanan yang efisien dan produktif dalam hal biaya modal, biaya operasi, dan biaya perawatan.</p> <p>05. Rasio biaya produksi per unit pelayanan yang efisien dan produktif dalam hal biaya modal, biaya operasi, dan biaya perawatan.</p> |

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS ILMU LAINNYA KEMENTERIAN PERTAHANAN

1. $\frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{2}$
 3. $\frac{1}{2}$
 4. $\frac{1}{2}$
 5. $\frac{1}{2}$
 6. $\frac{1}{2}$
 7. $\frac{1}{2}$
 8. $\frac{1}{2}$
 9. $\frac{1}{2}$
 10. $\frac{1}{2}$



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Name of Contributor(s) | KEMFET FARMER, SHAMBA |
| 2. Name of Organization | Government of Malawi |
| 3. Ministry/Department | No. <input type="text"/> |

| | |
|-----|--|
| No. | Misi |
| CI | Kemampuan Berprestasi |
| No. | Mendukung Sasaran Strategis |
| GI | Seluruh Rekan-rekan, Pemasok, Pengiriman dan Negara dan Difusi dan Persepsi. Data yang lebih baik dan lebih akurat secara langsung, Akurasi dan lebih akurat |
| II | Seluruh Rekan-rekan, Pemasok, Pengiriman dan Negara dan Difusi dan Persepsi. Data yang lebih baik dan lebih akurat secara langsung, Akurasi dan lebih akurat |

- | | |
|------------------------|---|
| 6. Kase Program | : 21.01.02 |
| 5. Nama Program | : Program Berpola: Sederhana, Program Operator Berpola: Sederhana |
| 7. Tanggal Uraa Revisi | |

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 5.484.164,0 | | | |
| a. Persampulng | | 1.352.958,0 | | | |
| b. Sub Persampulng | | 17.168,0 | | | |
| 2. PHN atau PON | | 12.710.324,0 | | | |
| JUMLAH | 18.558.222,0 | 18.267.440,0 | 12.710.324,0 | 12.710.324,0 | 12.710.324,0 |

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|--|
| 01. Terwujudnya strategi dan program peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi ternak | 01. Perencanaan dan pelaksanaan strategi pengembangan pembelajaran berbasis digital yang up to date dan efektif secara pedagogis, secara luas dan merata |
| | 02. Penguasaan penggunaan teknologi dan inovasi pembelajaran berbasis Artificial Intelligence dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan |
| | 03. Penguasaan penggunaan media dan sumber belajar digital yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan |
| | 04. Penguasaan sarana dan prasarana pembelajaran digital untuk mendukung pembelajaran |
| | 05. Penguasaan infrastruktur dan platform digital untuk mendukung layanan dan kualitas layanan pendidikan secara luas |
| | 06. Penguasaan pendekatan, strategi, kebijakan, dan kebijakan lain dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan |
| | 07. Penguasaan sistem manajemen mutu dan standar mutu pendidikan |

B. SUMBER PENDANAAN

1021 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER UMR PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERTAHANAN

| Kode | Kegiatan/Sasaran/Indikator | Jenis Denda | Salinan 2012 | Rupiah | PIM+PDV | PMB+BLU | Jumlah | Pembayaran | | | Catatan |
|------|----------------------------|-------------|--------------|--------|---------|---------|--------|------------|------|------|---------|
| | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Lampiran 1



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga

REPUBLIC OF INDONESIA

2. Nama Unit Organisasi

Kementerian Kesehatan

3. Misi Unit Organisasi

| No. | Misi |
|-----|-------------------|
| 01 | Promosi Kesehatan |

4. Sasaran Strategis

| No. | Mendukung Sasaran Strategis |
|-----|--|
| 01 | Self-management, Self-awareness, Perencanaan dan Kemandirian, Pelaksanaan, Realisasi dan Evaluasi Data yang akurat, Sistem Akutabilitas, Komitmen, Akuntabilitas, dan Bertanggung Jawab |
| 02 | Salah satu Sasaran Kerja Mendukung, yaitu: Informasi dan Komunikasi yang akurat, Data Terintegrasi, Data Mendukung, dan Jaringan yang kuat, Data yang Akutabilitas dan Bertanggung Jawab |

5. Sasar Program

01. RENCANA

6. Misi Program

01. Program RENCANA dan Pelaksanaan Akutabilitas, Akutabilitas, dan Bertanggung Jawab

7. Pencapaian Output Rencana

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Lanjutan Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 20.629,0 | | | |
| a. Pembiayaan | | 0,0 | | | |
| b. Biaya Pendamping | | 20.629,0 | | | |
| 2. PHN atau PDN | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 21.684,0 | 20.629,0 | 20.629,0 | 20.629,0 | 20.629,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|--|
| 01. Berakutabilitas dengan sistem akutabilitas dan bertanggung jawab | 01. Persentase jumlah unit organisasi yang memiliki sistem akutabilitas yang akurat, terintegrasi, dan bertanggung jawab 02. Persentase jumlah unit organisasi yang memiliki sistem akutabilitas yang akurat, terintegrasi, dan bertanggung jawab 03. Persentase jumlah unit organisasi yang memiliki sistem akutabilitas yang akurat, terintegrasi, dan bertanggung jawab 04. Persentase jumlah unit organisasi yang memiliki sistem akutabilitas yang akurat, terintegrasi, dan bertanggung jawab 05. Persentase jumlah unit organisasi yang memiliki sistem akutabilitas yang akurat, terintegrasi, dan bertanggung jawab 06. Persentase jumlah unit organisasi yang memiliki sistem akutabilitas yang akurat, terintegrasi, dan bertanggung jawab |

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

1041 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGUNJUKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

| Kode | Nama Kegiatan | Berkas Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | | | Prakiraan Target | | | Prioritas | Berkas Kegiatan | Pembagi Anggaran |
|------|--|---|-------------|------|------|------------------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 1.01 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 1.1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 1.02 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 1.2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 1.2.1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 1.2.2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 1.2.3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 1.03 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 1.3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 1.3.1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 1.3.2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 1.3.3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 1.04 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 1.4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 1.4.1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 1.4.2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |
| | | 1.4.3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1 |

Forma 112.1

B. SUMBER PENDANAAN

100. PROGRAM PRKUTAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

| Kode | Kegiatan/Sat. Kegiatan/Output | Jenis Akutif | Anggaran 2012 | | | Anggaran 2013 (dari RPKM) | | | Anggaran 2014 | | | Anggaran 2015 | | | Lokasi |
|------|--|--------------|---------------|----|----|---------------------------|----|----|---------------|----|----|---------------|----|----|--------|
| | | | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | |
| 1378 | Pembelian dan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1378 |
| 1379 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1379 |
| 1380 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1380 |
| 1381 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1381 |
| 1382 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1382 |
| 1383 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1383 |
| 1384 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1384 |
| 1385 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1385 |
| 1386 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1386 |
| 1387 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1387 |
| 1388 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1388 |
| 1389 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1389 |
| 1390 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1390 |
| 1391 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1391 |
| 1392 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1392 |
| 1393 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1393 |
| 1394 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1394 |
| 1395 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1395 |
| 1396 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1396 |
| 1397 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1397 |
| 1398 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1398 |
| 1399 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1399 |
| 1400 | Salah satu kegiatan pengembangan barang pertahanan | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 1400 |



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

1. **UPPER**

1. Name : Kementrian Perikanan
2. Name : UIN Cipanas
3. Nama : Alif Oyarani

ELDMARK, DAN TEBERMAN

Copyright © 2000 John Wiley & Sons, Inc.

| | |
|----|--|
| No | Musi |
| Id | komunikasi inggris |
| No | Mendukung Sasaran Strategis |
| 01 | Menjalin kemitraan yang produktif, pengumpulan dan terapan data dan informasi, penelitian Data yang dapat membantu dalam proses Akademi dan Penguasaan |
| 02 | Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga lain, Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga lain yang dapat membantu dalam proses Akademi dan Penguasaan |

5. Sex Program
6. Name Program
7. Birthday Date Program

61, 2002

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Praktisitas Kebutuhan | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Revisi | | 152.067,0 | | | |
| a. Pendampingan | | 0,0 | | | |
| b. Non Pendampingan | | 152.067,0 | | | |
| 2. PHN atau PDR | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 157.330,0 | 152.067,0 | 170.987,0 | 170.987,0 | 170.987,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|---|
| <p>01. Terlibat secara penuh dalam kegiatan pembelajaran (misalnya) dan pembelajaran, serta melakukan kegiatan PPL/ KKN secara optimal, mematuhi dan mengaiti tugas, nilai, dan etika sebagai mahasiswa yang profesional</p> | <p>01. Berencana, berkoordinasi, berkolaborasi, dan berdiskusi dengan kelompok, dan dengan pihak yang terkait untuk dapat melaksanakan tugas dan etika sebagai mahasiswa yang profesional</p> |
| | <p>02. Dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan dengan tepat, jujur, dan bertanggung jawab</p> |
| | <p>03. Dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan dengan tepat, jujur, dan bertanggung jawab</p> |
| | <p>04. Dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan dengan tepat, jujur, dan bertanggung jawab</p> |
| | <p>05. Dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan dengan tepat, jujur, dan bertanggung jawab</p> |

References

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
 A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
 (05) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPMAN/TNI

| Kode | Nama Kegiatan | Indikator Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | Pencapaian Target | | | Pemeriksaan | Dukungan | Pemeriksaan |
|------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.2 | 1.1.1.1.1.3 | 1.1.1.1.1.4 | 1.1.1.1.1.5 | 1.1.1.1.1.6 |

1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.2

1.1.1.1.1.3

1.1.1.1.1.4

1.1.1.1.1.5

1.1.1.1.1.6

B. SUMBER PENDANAAN

(05) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PULGIFIKASI HAMA/PESTISIDA

| Kode | Isi/uraian/Des. Kny/IKK/CS/put | Jenis C. put | Alokasi 2012 | Lap. dan Tgl. 2013 (Des. Ruzali) | | Jumlah | Prediksi (Des. Ruzali) | | Total |
|------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | |
| 1 | 100 MI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

622.970,00

Jumlah: 150.000,00 + 1.000.000,00 = 1.150.000,00

Keterangan: 1. Jumlah yang akan diterima dari pemerintah pusat

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

Kantor: 100



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama & Nomor an/Lombar : KEMENTERIAN PTF ALIHAN
2. Nama Unit Organisasi : Kementerian Perikanan
3. Misi Unit Organisasi : No

- #### 4. Generalization

- | | |
|-----------------------------|---|
| 5. Kode Program | : 01.01.06 |
| 6. Nama Program | : Program $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ dan α_4 |
| 7. Deskripsi (kata Ringkas) | |

| Pengadaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Praktikan Kemutakhiran | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 57.575,0 | | | |
| a. Pemangkal | | 0,0 | | | |
| b. Lain Pengangkal | | 57.575,0 | | | |
| 2. PHN atau FOM | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 57.908,0 | 57.575,0 | 54.797,0 | 26.497,0 | 26.497,0 |

1. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

[illegible]

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---------------|--|
| | 1. Persentase ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2012 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2013 3. Persentase ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2014 |

Form 12.1.1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
(JBC PROGRAM STRATEGIS PERTAHANAN)

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran (kegiatan)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | | | | Praharus Targat | | | Prioritas | Durasi | Indikator Kinerja |
|------|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | | | |
| 100 | Strategi Pertahanan | 100.1. Strategi Pertahanan | 100.1.1. Strategi Pertahanan | 100.1.2. Strategi Pertahanan | 100.1.3. Strategi Pertahanan | 100.1.4. Strategi Pertahanan | 100.1.5. Strategi Pertahanan | 100.1.6. Strategi Pertahanan | 100.1.7. Strategi Pertahanan | 100.1.8. Strategi Pertahanan | 100.1.9. Strategi Pertahanan | 100.1.10. Strategi Pertahanan |
| 101 | Program Militer Pertahanan | 101.1. Program Militer Pertahanan | 101.1.1. Program Militer Pertahanan | 101.1.2. Program Militer Pertahanan | 101.1.3. Program Militer Pertahanan | 101.1.4. Program Militer Pertahanan | 101.1.5. Program Militer Pertahanan | 101.1.6. Program Militer Pertahanan | 101.1.7. Program Militer Pertahanan | 101.1.8. Program Militer Pertahanan | 101.1.9. Program Militer Pertahanan | 101.1.10. Program Militer Pertahanan |
| 102 | Program Militer Pertahanan | 102.1. Program Militer Pertahanan | 102.1.1. Program Militer Pertahanan | 102.1.2. Program Militer Pertahanan | 102.1.3. Program Militer Pertahanan | 102.1.4. Program Militer Pertahanan | 102.1.5. Program Militer Pertahanan | 102.1.6. Program Militer Pertahanan | 102.1.7. Program Militer Pertahanan | 102.1.8. Program Militer Pertahanan | 102.1.9. Program Militer Pertahanan | 102.1.10. Program Militer Pertahanan |
| 103 | Program Militer Pertahanan | 103.1. Program Militer Pertahanan | 103.1.1. Program Militer Pertahanan | 103.1.2. Program Militer Pertahanan | 103.1.3. Program Militer Pertahanan | 103.1.4. Program Militer Pertahanan | 103.1.5. Program Militer Pertahanan | 103.1.6. Program Militer Pertahanan | 103.1.7. Program Militer Pertahanan | 103.1.8. Program Militer Pertahanan | 103.1.9. Program Militer Pertahanan | 103.1.10. Program Militer Pertahanan |

100.1.1. Strategi Pertahanan
100.1.2. Strategi Pertahanan
100.1.3. Strategi Pertahanan
100.1.4. Strategi Pertahanan
100.1.5. Strategi Pertahanan
100.1.6. Strategi Pertahanan
100.1.7. Strategi Pertahanan
100.1.8. Strategi Pertahanan
100.1.9. Strategi Pertahanan
100.1.10. Strategi Pertahanan

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM STRATEGIS PERTAHANAN

| Kode | Keg. dan/atau Sub. Keg./UR/Instansi | Revisi/Indikasi | Alokasi 2012 | Berkas | Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 PURNOMO YUSGIANTORO

**FORMULIR 2**

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2013

UNION

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Normal temperature and pulse range | - K. M. V. NUTTER AND BRETHERTON, 65/AM |
| 2. Normal unit conversion | - Management in Practice, 8/97 |
| 3. Normal heart rate range | No |

| No | Misi |
|----|------------------|
| 10 | Menjadi pemimpin |

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|--|
| 11 | Melakukan Penelitian, Pengembangan, dan Mendistribusikan Pengetahuan, Teknologi, dan Berprestasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Dunia |
| 12 | Melakukan Penelitian, Pengembangan, dan Mendistribusikan Pengetahuan, Teknologi, dan Berprestasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Dunia |

2. **Node Program** : <http://www.cse.cuhk.edu.hk/~csl/2540/2006/lectures/lec12/NodeProgram.htm>
3. **String Program** : <http://www.cse.cuhk.edu.hk/~csl/2540/2006/lectures/lec12/StringProgram.htm>

7. Pencapaian Dik. & M. = 4

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Jumlah Tahun 2013 | Proyeksi Kebutuhan | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 62.534,0 | | | |
| a. Pembiayaan | | 0,0 | | | |
| b. Non Pembiayaan | | 62.534,0 | | | |
| 2. PHN atau PDR | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 31.635,0 | 62.534,0 | 44.691,0 | 64.691,0 | 24.691,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|--|
| 31. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel | 31.1. Terselenggaranya proses pengambilan keputusan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 31.2. Berlangsungnya proses pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel 31.3. Berlangsungnya proses pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel 31.4. Berlangsungnya proses pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel 31.5. Berlangsungnya proses pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel |

A. SUMBER PENDANAAN

(107) PROGRAM PERENCANAAN UMUM DAN PENGANGGARAN PERTAHANAN

[illegible]

2.2.3.1

B. SUMBER PENUKARAN

(37) PROGRAM PERENCANAAN UMUM DAN PENGANGGARAN PER AIRRAN

| Kategori | Kategori (Sas. Kew. & Kew. Lain) | Jenis Outlay | Saluran 2012 | Bantuan Tahun 2013 (Juta Rupiah) | | Proyeksi (Jumlah) | | Lokasi |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| | | | | Revisi | PLN-2013 | 2014 | 2015 | |
| II | II | II | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 53.035,2 | 32.500,0 | 6,2 | 44.800,0 | 40.551,2 | 34.500,0 |

Keterangan: 1. Data 2012 adalah data aktual dan 2013 adalah data proyeksi.
 2. Data 2014 dan 2015 adalah data proyeksi.

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Bidang/Unit Organisasi : Kesehatan Ibu dan Anak

3. Misi Unit Organisasi :

| No | Misi |
|----|-------------|
| 01 | Keperawatan |

4. Sasaran Strategis :

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|--|
| 01 | Sasaran Program Pendidikan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Masyarakat |

5. Kode Program :

01.01.01

6. Nama Program :

Program Pendidikan Kesehatan Masyarakat

7. Penanggung Jawab R/SM :

| Perencanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2012 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 800.000,0 | | | |
| a. Pendanaan | | 0,0 | | | |
| b. R/SM Pendanaan | | 800.000,0 | | | |
| 2. PHN atau PDN | | 600.000,0 | | | |
| JUMLAH | 1.600.000,0 | 1.400.000,0 | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|---|
| 01. Meningkatkan jumlah produksi dan distribusi produk kesehatan bagi masyarakat | 01. Jumlah produksi dan distribusi produk kesehatan bagi masyarakat |
| 02. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan bagi masyarakat | 02. Jumlah tenaga kesehatan bagi masyarakat |

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(08) PROGRAM PENGUMUMANAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERHAJARAN

| Kode | Nama Kegiatan | Sub-an Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | Prakiraan Target | | | Pencapaian | Pencapaian Harian |
|------|---------------|--|-------------|------------------|------|------|------------|----------------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |

REVISI

Geometri, dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, kejuruan, pengetahuan, keterampilan, dan soft skill peserta didik, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi, ekonomi, dan lingkungan.



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Nama Unit Organisasi : Kementerian Kesehatan

3. Misi Unit Organisasi :

| No | Misi |
|----|----------------------|
| 1. | Memelihara kesehatan |

4. Sasaran Strategis :

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|--|
| 1. | Seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata |
| 2. | Struktur dan Proses Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Keluarga yang Berkualitas dan Berkeadilan |
| 3. | Praktik pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata |

5. Kode Program : 101.01.01

6. Nama Program : Program Riset Kesehatan Dasar

7. Pendanaan (Juta Rupiah) :

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rumlah | | 37.020,0 | | | |
| a. Pendamping | | 0,0 | | | |
| b. Non Pendamping | | 37.020,0 | | | |
| 2. PHN atau PUN | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 42.187,0 | 37.020,0 | 721.471,0 | 721.471,0 | 721.471,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|--|
| 01. Seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata | 01. Rasio persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata |
| 02. Seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata | 02. Rasio persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata |
| 03. Seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata | 03. Rasio persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata |
| 04. Seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata | 04. Rasio persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata |
| 05. Seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata | 05. Rasio persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata |
| 06. Seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata | 06. Rasio persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata |

Formulir 2-1



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

1. UNLUM

- ### 1. Name Ke reuter an'lemona

KRAFTMAN, D. AND G. R. ALLEN

- ## 2. Moving Unit: $\frac{1}{2}$ inch

conclusiones de la investigación

- S. Y. S. Lee - Chairman

| | |
|-------------------------|------|
| No. | Miss |
| 1. NAME OF THE MAGAZINE | |

- $$L = \frac{1}{2} \dot{\alpha}^2 \sin^2 \alpha + \frac{1}{2} (\dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2) \sin^2 \alpha$$

[illegible]

- ### 5. Kapsle Późna

0121-10

- S. Maria Prepp. 10

Angert, A., Eckhardt, A., & Dörflinger, A. (2010).

- A. Pengantar (10.000 Rp.)

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Praktikan Kehutanan | | |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rencan | | 460.358,0 | | | |
| a. Pembangunan | | 0,0 | | | |
| b. Managemen | | 460.358,0 | | | |
| 2. PHIN atau PDN | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 487.185,0 | 460.358,0 | 243.323,0 | 248.923,0 | 248.923,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Output | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|--|
| <p>30. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, termasuk melakukan inovasi pelayanan masyarakat.</p> | <p>31. Peningkatan jumlah, kualitas, dan pendanaan dan capaian implementasi capaian kinerja di bidang pelayanan masyarakat, termasuk tercapainya indikator implementasi standar</p> <p>32. Peningkatan jumlah, kualitas dan pendanaan dan capaian implementasi standar pelayanan masyarakat, termasuk tercapainya indikator implementasi standar</p> <p>33. Peningkatan jumlah, kualitas dan pendanaan dan capaian implementasi standar pelayanan masyarakat, termasuk tercapainya indikator implementasi standar</p> <p>34. Peningkatan jumlah, kualitas dan pendanaan dan capaian implementasi standar pelayanan masyarakat, termasuk tercapainya indikator implementasi standar</p> |

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
 A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
 100 PROGRAM KUKUTAN PERTANAKAN

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | Praktik Target | | | Prioritas | Dukung | Penanggung Jawab |
|------|------------------------------|--|-------------|----------------|------|------|-----------|--------|------------------|
| | | | | 2013 | 2015 | 2016 | | | |
| 100 | Kegiatan Subsektor Pertanian | 1. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 1.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| | | 2. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 2.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| | | 3. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 3.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 100 | Kegiatan Subsektor Pertanian | 4. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 4.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| | | 5. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 5.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| | | 6. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 6.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 100 | Kegiatan Subsektor Pertanian | 7. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 7.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| | | 8. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 8.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| | | 9. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 9.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 100 | Kegiatan Subsektor Pertanian | 10. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 10.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| | | 11. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 11.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| | | 12. Meningkatkan produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, dengan cara meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan kualitas benih, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. | 12.1 | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
 A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
 (10) PROGRAM KEGIATAN PETAHANNAN

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Pembinaan target | | | | Prioritas | Dana/anggaran | Pemerintah/Provinsi |
|------|---|--|------------------|------|------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | Satuan | | | |
| 1413 | Sukamukti Kecamatan Candi Kecamatan Candi Kabupaten Candi | 1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata alam Candi Kecamatan Candi Kabupaten Candi 2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata alam Candi Kecamatan Candi Kabupaten Candi | 100 | 100 | 100 | orang | 1 | 100 | Provinsi |
| | | 1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata alam Candi Kecamatan Candi Kabupaten Candi 2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata alam Candi Kecamatan Candi Kabupaten Candi | 100 | 100 | 100 | orang | 1 | 100 | Provinsi |

Keterangan:

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata alam Candi Kecamatan Candi Kabupaten Candi
 2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata alam Candi Kecamatan Candi Kabupaten Candi

B. SUMBER PENDANAAN

LEI: PROGRAM REKULTIVASI PERTANAHAN

| Kode | Keterangan/No. Kery. D/M/PP | Jumlah Duit | Alokasi 2012 | Kecamatan | Tahun 2013 (Juta Rupiah) | | Program Reklamasi | | Total |
|------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------|-------------------|------|-------|
| | | | | | PTN-SDY | PABP-SDY | 2014 | 2013 | |
| 1 | 02 | 11 | 131 | 11 | 46 | 11 | 11 | 11 | 11 |

MENTERI PERTAHANAN & KEPOLISIAN

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

11-11-12

FORMULIR-2
UO MABES TNI



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT ORGANISASI : KEMAS Bekerja



| Kode | Keterangan | Maksud/2013 | Usaha/Pendapatan Tahun 2013 (Pembelian) | | | Pembelian Kebutuhan Bekerja | | |
|--------------|---|---------------------|---|-------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Bulan | 2013/2013 | 2013/2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 11 | Program anggaran Kegiatan Persiapan Bekerja | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50,0 | 0,0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 12 | Program anggaran Kegiatan Persiapan Bekerja | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50,0 | 0,0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 13 | Program anggaran Kegiatan Persiapan Bekerja | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50,0 | 0,0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 14 | Program anggaran Kegiatan Persiapan Bekerja | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50,0 | 0,0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TOTAL | | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 50,0 | 0,0 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 |

Anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KEMAS Bekerja.



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

1. UMLUM

1. Nama Eksponen / Kelompok : STEFEN LUBIS, NIRMALASARI
2. Nama Instansi Organisasi : KEMENTERIAN
3. Nama Unit Organisasi :
4. Sektor dan Subsektor :  

| No | | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|----|---|
| 01 | 01 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 02 | 02 | Berikutnya, berkolaborasi dengan berbagai lembaga, lembaga internasional, lembaga nasional, lembaga internasional dan lembaga nasional untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 03 | 03 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 04 | 04 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 05 | 05 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 06 | 06 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 07 | 07 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 08 | 08 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 09 | 09 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 10 | 10 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |
| 11 | 11 | Selenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar, dilaksanakan secara daring dan tatap muka, dan menggunakan media digital untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf |

4. Name Program: _____

| Pendanaan (Rp triliun) | | | Prakiraan Revisi tahun | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. RUPIAH | | 1.789.174,5 | | | |
| a. Persempitan | | 0,0 | | | |
| b. Non Persempitan | | 1.789.174,5 | | | |
| 2. PHLN atau PDR | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 1.788.795,6 | 1.789.174,5 | 1.962.907,2 | 2.060.107,1 | 2.168.112,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | |
|---|---|
| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
| 01. Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas yang dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, berdasarkan komitmen dan tanggung jawab, di tingkat pelayanan dasar. | 01. Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan program R 02. Jumlah upaya kesehatan promotif dan preventif yang dilaksanakan |



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 2. Nama Unit Organisasi : Direktorat TNI
 3. Mekanisme Pengesahan :
 4. Sasaran Strategis :

| Mendukung Sasaran Strategis | |
|-----------------------------|---|
| 01 | Sistem kesehatan bangsa lebih maju dan bermutu, dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 02 | Sistem pelayanan kesehatan masyarakat lebih maju dan bermutu, dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 03 | Manajemen kesehatan lebih baik dan efektif, dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 04 | Sistem informasi kesehatan lebih maju dan bermutu, dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |

5. Kode Program : 019.11.12
 6. Nama Program : Pengembangan sistem kesehatan masyarakat
 7. Rencana Output Rencana :

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 689.947,2 | | | |
| a. Peningkatan | | 0,0 | | | |
| b. Non Peningkatan | | 689.947,2 | | | |
| 2. PHLN atau PDR | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 740.428,2 | 689.947,2 | 724.694,6 | 761.503,6 | 1.627.505,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|---|
| 01. Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat | 01. Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan masyarakat |

... .. NON-MUTISTA/ SARPRAS INILGATIF

Received 1997-09-10; accepted 1997-11-10.



UNIVERSITY

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Home Enterprise Identification | 12. FRITAX - 11/06/2015 |
| 2. Name of the Organisation | Marque Fritax |
| 3. Main Unit Organisation | |
| 4. Business Strategy | No |

| No | Mendukung Strategi |
|----|---|
| 15 | Beberapa inovasi karakter yang Mendasar pada budaya dan karakter yang merupakan dasar dalam budaya bangsa yang diadopsi dari budaya lain. |
| 16 | Beberapa inovasi karakter yang Mendasar pada budaya dan karakter yang merupakan dasar dalam budaya bangsa yang diadopsi dari budaya lain. |

- D. Keefe Program
 E. Kame Program
 F. Kame Program
 G. Kame Program

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2017 | Tahun Tahun 2018 | Praktirasi (kebutuhan) | | |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. RUPiah | | 389.520,5 | | | |
| a. Pendanaan | | 0,0 | | | |
| b. Kena Pendamping | | 389.520,5 | | | |
| c. PHK atau PDM | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 312.200,0 | 389.520,5 | 134.991,3 | 132.215,7 | 558.299,7 |

1. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Basis/Outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU) | |
|---|--|
| Basis/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
| 01. Mewujudkan terwujudnya suatu baik dalam pada masa ke depan dalam hal yang penting dan signifikan yang akan berdampak pada kemajuan bangsa | 01. Berkontribusi pada kemajuan bangsa |

B. SUMBER PENDANANGAN

[11] PROGRAM PROFESIONALISASI RAJULRI INTEGRASI

| Kode | No. Surat/No. Spes/Kes/Output | Jenis Output | Alokasi 2012 | Rencana | Usulan tahun 2013 (Data Suplai) | | Frekuensi Subsidia | | Lokasi |
|------|-------------------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------|----------|--------------------|------|--------|
| | | | | | 0-100% | 100-100% | 2013 | 2014 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Page 1 of 1



FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2013

1. INTRODUCTION

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 3. Badan Kementerian/ Lembaga | 1. KEMENTERIAN RI KEHUTANAN |
| 2. Kantor/ Unit Organisasi | 1. Dinas Regional |
| 3. Mitra Unit Organisasi | |
| 4. Status/ Statuses | 100 |

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|---|
| 03 | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Komunitas Kelurahan Sasralan dan T. Tamar Galis untuk Implementasi dan Sasaran Strategis ke-3 |
| 04 | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Komunitas Kelurahan Sasralan dan T. Tamar Galis untuk Implementasi dan Sasaran Strategis ke-3 |
| 05 | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Komunitas Kelurahan Sasralan dan T. Tamar Galis untuk Implementasi dan Sasaran Strategis ke-3 |
| 06 | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Komunitas Kelurahan Sasralan dan T. Tamar Galis untuk Implementasi dan Sasaran Strategis ke-3 |
| 07 | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Komunitas Kelurahan Sasralan dan T. Tamar Galis untuk Implementasi dan Sasaran Strategis ke-3 |
| 08 | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Komunitas Kelurahan Sasralan dan T. Tamar Galis untuk Implementasi dan Sasaran Strategis ke-3 |
| 09 | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Komunitas Kelurahan Sasralan dan T. Tamar Galis untuk Implementasi dan Sasaran Strategis ke-3 |
| 10 | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Komunitas Kelurahan Sasralan dan T. Tamar Galis untuk Implementasi dan Sasaran Strategis ke-3 |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 5. Korte Program | 01.12.1993 |
| 6. Name Program | Program Pengembangan dan Peningkatan Organisasi Inisiasi |
| 7. Perencanaan dan Pembiayaan | |

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Ketersediaan Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 3.111.841,6 | | | |
| a. Pembiayaan | | 0,0 | | | |
| b. Non Pembiayaan | | 3.111.841,6 | | | |
| 2. PHN Nasiona PDN | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 3.175.243,0 | 3.111.841,6 | 3.267.308,8 | 3.483.549,2 | 3.601.551,6 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Dokumen | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|---|
| <p>B) Terwujudnya kondisi lingkungan kampus dan sekitarnya yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan.</p> | <p>a) Terwujudnya kondisi lingkungan kampus dan sekitarnya yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan.</p> <p>b) Terwujudnya kondisi lingkungan kampus dan sekitarnya yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan.</p> |

FORMULIR-2
UO TNI AD



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
[REKAPITULASI PROGRAM I]

REVISI/UBAH/PEMBAH: KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT ORGANISASI : Menteri Besar TDA AD

| Kode | Program | Anggaran 2013 | | Usaha/Program Tahun 2013 (Jenis Kegiatan) | | Perkiraan Pelaksanaan (Rupiah) | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------|--------------------------------|------------|
| | | Saldo | Saldo | PHU-PTU | PHU-PTU | 2014 | 2015 |
| 10 | Program Bantuan Kesehatan Masyarakat | 477.000 | 477.000 | 0,0 | 0,0 | 477.000 | 0,0 |
| 11 | Program Bantuan Kesehatan Masyarakat | 1.514.000 | 1.514.000 | 0,0 | 0,0 | 1.514.000 | 0,0 |
| 12 | Program Bantuan Kesehatan Masyarakat | 1.113.000 | 1.113.000 | 0,0 | 0,0 | 1.113.000 | 0,0 |
| 13 | Program Bantuan Kesehatan Masyarakat | 25.000.000 | 25.000.000 | 0,0 | 0,0 | 25.000.000 | 0,0 |
| 14 | Program Bantuan Kesehatan Masyarakat | 30.851.671,8 | 30.851.671,8 | 0,0 | 0,0 | 30.851.671,8 | 0,0 |
| TOTAL | | 30.851.671,8 | 30.851.671,8 | 0,0 | 0,0 | 30.851.671,8 | 0,0 |

Selanjutnya, data ini akan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

L. URBAN

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Komandan/Lempang | : PUSKAS - LEMPAH PER KUALANG |
| 2. Nama Unit / Organisasi | : Dinas Logistik - A - AB |
| 3. Misi / Job Deskripsi | No. |

| No. | PMIS |
|-----|---|
| G1 | Menyampaikan pesan-pesan melalui media elektronik melalui siaran radio, televisi, dan surat kabar melalui siaran radio (PMIS) |
| G2 | Menyampaikan pesan-pesan melalui media elektronik melalui siaran radio, televisi, dan surat kabar melalui siaran radio (PMIS) |
| G3 | Menyampaikan pesan-pesan melalui media elektronik melalui siaran radio, televisi, dan surat kabar melalui siaran radio (PMIS) |
| G4 | Menyampaikan pesan-pesan melalui media elektronik melalui siaran radio, televisi, dan surat kabar melalui siaran radio (PMIS) |

- #### Absenteeism Statistics

| No | Mendukung Strategi |
|----|--|
| C1 | Setelah pertemuan, pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan akan disampaikan kepada guru dan staf yang akan melaksanakan di kelas. |
| C2 | Selanjutnya, Kepala Sekolah akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah lainnya. |
| C3 | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. |
| 1 | Kepala Sekolah akan melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah lainnya dan Kepala Sekolah lainnya akan melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah lainnya. |

5. Kodu Program : 01-27-19
 6. Name Program : Program To Calculate Square & Volume Of Sphere
 7. Pendapat/Daftar Rujukan :

| Pendapatan | Alokasi Tahun 2017 | Usulan tahun 2018 | Proyeksi Kebutuhan | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Bantuan | | 427.891,6 | | | |
| a. Pendampingan | | 0,0 | | | |
| b. Non Pendampingan | | 427.891,6 | | | |
| 2. PHM/Manajemen PUN | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 427.891,6 | 427.891,6 | 470.680,7 | 517.448,8 | 569.538,9 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|---|
| U1. Terpangkas tingkat beban kerja dan waktu proses pelayanan masyarakat sesuai standar kualitas dan kuantitas (SKQ) pelayanan. | U1. Efisiensi pelayanan publik melalui pemangkasan waktu. |

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
(14) PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA DARAT

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2015 | | | | Praktikan Target | | | | Prioritas | Dukungan | Penanggung Jawab |
|------|---|---|-------------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----------|----------|------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 1420 | Pengembangan dan Penguatan Matrik Darat | 1.1. Persentase peningkatan jumlah personel yang mengikuti pelatihan dan pendidikan di tingkat satuan kerja | 40% | 50% | 60% | 70% | 40% | 50% | 60% | 70% | 3 | | Manajemen |
| 1421 | Pengembangan dan Penguatan Matrik Darat | 1.2. Persentase peningkatan jumlah personel yang mengikuti pelatihan dan pendidikan di tingkat satuan kerja | 40% | 50% | 60% | 70% | 40% | 50% | 60% | 70% | 3 | | Manajemen |
| 1422 | Pengembangan dan Penguatan Matrik Darat | 1.3. Persentase peningkatan jumlah personel yang mengikuti pelatihan dan pendidikan di tingkat satuan kerja | 40% | 50% | 60% | 70% | 40% | 50% | 60% | 70% | 3 | | Manajemen |
| 1423 | Pengembangan dan Penguatan Matrik Darat | 1.4. Persentase peningkatan jumlah personel yang mengikuti pelatihan dan pendidikan di tingkat satuan kerja | 40% | 50% | 60% | 70% | 40% | 50% | 60% | 70% | 3 | | Manajemen |
| 1424 | Pengembangan dan Penguatan Matrik Darat | 1.5. Persentase peningkatan jumlah personel yang mengikuti pelatihan dan pendidikan di tingkat satuan kerja | 40% | 50% | 60% | 70% | 40% | 50% | 60% | 70% | 3 | | Manajemen |

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
 A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
 (N) PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MANUSIA DAUAT

| Kegiatan | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | Praktis Target | | | Dibagikan | Perencanaan 2013 |
|----------|---|--|-------------|----------------|------|------|-----------|------------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1.2.1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat | 1.1. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | | 1.2. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | | 1.3. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 1.2.2 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat | 2.1. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | | 2.2. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | | 2.3. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 1.2.3 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat | 3.1. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| | | 3.2. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| | | 3.3. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |

Salah satu indikator kinerja kegiatan (IKK) dan target yang akan dicapai oleh Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi

2. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi

3. Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas yang terakreditasi

(19) PROGHONN DUKUNGAN KESIAPIAN MATILDA PABAT

[illegible]

B. SUMBER PENDANAAN

134) PROGRAM DUKUNGAN KESIMPATAN MATRA DASAT

| 134) PROGRAM DUKUNGAN KESIAPIAN MATHRA DASAR | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|----------------------|----|------|
| Kode | Kegiatan/SSK/Regiok/Outsourcing | Jenis Cukai | Alokasi 2012 | Usulan Tahun 2013 (Data Realisasi) | | | | | Tercapaian Kebutuhan | | Tipe |
| | | | | Rupiah | PKA/PK | PKA/PK | Jumlah | 2014 | 2015 | | |
| 1341 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| 1342 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| 1343 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| 1344 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| 1345 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| 1346 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| 1347 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| 1348 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| 1349 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| 1350 | Pengembangan Sistem Informasi Peternakan Nasional Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | IT | 17.847,9 | 17.847,9 | 0,0 | 0,0 | 17.847,9 | 17.847,9 | 17.847,9 | IT | |
| TOTAL | | | | 427.851,6 | 0,0 | 0,0 | 427.851,6 | 427.851,6 | 427.851,6 | | |

Keterangan:

Keterangan: 134) Program Dukungan Kesimpatan Matra Dasar

Keterangan: 134) Program Dukungan Kesimpatan Matra Dasar

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

2012, No. 1045



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga

DEKRETORAT KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Nama Unit Organisasi

Korpus Buletin ITN/ITP

3. Visi Unit Organisasi

| No | Visi |
|----|---|
| 01 | Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 02 | Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan kesehatan masyarakat |
| 03 | Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan kesehatan masyarakat |
| 04 | Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan kesehatan masyarakat |

4. Sasaran Strategis

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|--|
| 01 | Seluruh potensi sumber daya kesehatan yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat |
| 02 | Seluruh potensi sumber daya kesehatan yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat |

5. Kode Program

1.1.2.2.1.1

6. Nama Program

Program Monev dan Akreditasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

7. Pendanaan (Rp. Miliar)

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Tasialar Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rutiah | | 2.478.929,7 | | | |
| a. Peningkatan | | 0,0 | | | |
| b. Biaya Pemeliharaan | | 2.478.929,7 | | | |
| 2. PHN atau PDN | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 2.517.069,5 | 2.478.929,7 | 2.726.839,7 | 2.969.517,1 | 3.239.968,8 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|--|
| 01. Tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan infeksi | 01. Persentase tatalaksana/pengobatan penyakit menular dan infeksi |



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

A. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Nama Unit Organisasi : Markas Besar TNI AD

3. Visi Unit Organisasi :

| No | Misi |
|----|---|
| 01 | Mengembangkan peran dan fungsi TNI AD dalam pembangunan nasional di bidang Pertahanan dan Keamanan (Pembelaan Tanah Air) TNI AD |
| 02 | Mengembangkan kemampuan daya juang TNI AD dalam menghadapi ancaman |
| 03 | Mendukung pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia |
| 04 | Mendukung pembangunan wilayah binaan TNI AD |

4. Sasaran strategis :

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|--|
| 01 | Gelombang pembangunan program pembangunan, pembangunan dan pembangunan hasil pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat |
| 02 | Pembangunan Pembangunan Nasional di Bidang Sosial, Kultur, Masyarakat, Kesehatan, Ilmu, Teknologi, dan Pembangunan Manusia yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif |

5. Kode Program : 012.22.01

6. Nama Program : Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Gizi Angkatan Darat

7. Pembiayaan (Rata-Rata) :

| Pendanaan | Anggaran Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Perkiraan Kebutuhan | | |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 662.417,7 | | | |
| a. Pendanaan | | 0,0 | | | |
| b. Non Pendanaan | | 662.417,7 | | | |
| 2. PHN atau PDN | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 911.753,5 | 662.417,7 | 948.673,5 | 1.041.543,7 | 1.147.897,5 |

B. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|---|
| 01. Meningkatnya kualitas gizi dan kesehatan masyarakat di lingkungan TNI Angkatan Darat | 1. Jumlah gizi pemenuhan gizi (gizi perantara) 2000-2400 kkal |

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN [IKK] DAN TARGET

1.46 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERSONEL MATRA DARAT

| Kode | Nama Kegiatan | Rencana Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | Pencapaian Target | | | Prioritas | Dokumen | Penanggung Jawab |
|--------|--|--|--------|------|------|-------------------|------|------|-----------|---------|------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| 1.46.1 | Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel | 1.46.1.1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | Kasubid PRA |
| 1.46.2 | Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel | 1.46.2.1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | Kasubid PRA |
| 1.46.3 | Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel | 1.46.3.1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | Kasubid PRA |

1.46.1.1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel

1.46.1.1.1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel

1.46.1.1.1.1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel

1.46.1.1.1.1.1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan personel



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga
2. Nama Unit/Divisi/Instansi
3. Misi dan Organisasi

KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Kerja: Dit. AP

| No | Misi |
|----|--|
| 01 | Mendukung terwujudnya nilai-nilai dan tujuan pembangunan dalam Operasi Militer Terpadu (OMPT) dan Operasi Militer Terpadu (OMST) |
| 02 | Mendukung terwujudnya nilai-nilai dan tujuan pembangunan dalam Operasi Militer Terpadu (OMPT) |
| 03 | Mendukung terwujudnya nilai-nilai dan tujuan pembangunan dalam Operasi Militer Terpadu (OMPT) |
| 04 | Mendukung terwujudnya nilai-nilai dan tujuan pembangunan dalam Operasi Militer Terpadu (OMPT) |

4. Sasaran Strategis

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|---|
| 01 | Mendukung terwujudnya nilai-nilai dan tujuan pembangunan dalam Operasi Militer Terpadu (OMPT) |
| 02 | Mendukung terwujudnya nilai-nilai dan tujuan pembangunan dalam Operasi Militer Terpadu (OMPT) |
| 03 | Mendukung terwujudnya nilai-nilai dan tujuan pembangunan dalam Operasi Militer Terpadu (OMPT) |

5. Kode Program

011.02.01

6. Nama Program

Pengembangan dan Manajemen Sistem Informasi Manajemen

7. Pendanaan (Rupiah)

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 27.062.498,2 | | | |
| a. Pengerangan | | 0,0 | | | |
| b. Biaya Pengerangan | | 27.062.498,2 | | | |
| 2. P-1N atau P-1M | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 26.384.100,4 | 27.062.498,2 | 29.790.649,0 | 32.760.713,0 | 36.046.685,3 |

II. HASIL/OUTPUT DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Output | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|--|
| 01. Hasil dari pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan | 01. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit 02. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit 03. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit 04. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit |

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(24) PROGRAM PENYLLINGCAHAAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA DARAT

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Tingkat 2015 | Pencapaian Target | | Prevalensi | Colokan | Pemangku Jawab |
|------|---|--|--------------|-------------------|------|------------|---------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1.20 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 1. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | M. P. H. H. H. H. |
| 1.21 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 2. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | M. P. H. H. H. H. |
| 1.22 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 3. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | M. P. H. H. H. H. |
| 1.23 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 4. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | M. P. H. H. H. H. |
| 1.24 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 5. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | M. P. H. H. H. H. |
| 1.25 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 6. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | M. P. H. H. H. H. |
| 1.26 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 7. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | M. P. H. H. H. H. |
| 1.27 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 8. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | M. P. H. H. H. H. |
| 1.28 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 9. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | M. P. H. H. H. H. |
| 1.29 | Pembinaan dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 10. Mengembangkan Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) dan Bina Desa (PBB) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | M. P. H. H. H. H. |

12/06/2012

B. SUMBER PENDANAAN

1241 PROGRAM PENYIANG PANGSAAN/VAJALIMEN DAN OPERASIONAL WATRA DASAR

| Kode | Kegiatan/Program/Proyek/Unit Kegiatan | Jenis Output | Anggaran 2012 | Dibayar Tahun 2011 (Rp) | | | Pembayaran | | | Saldo | | |
|------|---|--------------|---------------|-------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------------|------|------|
| | | | | Rupiah | Piutang | Piutang | Piutang | Piutang | Piutang | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1474 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 21.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.741.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1475 | Saluran air untuk saluran pembuangan air limbah di Desa Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1476 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1477 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1478 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1479 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1480 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1481 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1482 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1483 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1484 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1485 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1486 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1487 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1488 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1489 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1490 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1491 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1492 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1493 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1494 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1495 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1496 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1497 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1498 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1499 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | Pengembangan Perangkat Persepsi Watra Dasar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORMULIR-2
UO TNI AL



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga

KEMKES RI, KEMKES RI, KEMKES RI

2. Nama Unit Organisasi

Monev dan Bina

3. Misi Unit Organisasi

| No. | Misi |
|-----|--|
| 01 | Meningkatkan kualitas dan kemampuan "N. A. yang berdaya guna untuk meningkatkan kinerja" |
| 02 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan yang lebih baik |
| 03 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan yang lebih baik |
| 04 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan yang lebih baik |
| 05 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan yang lebih baik |
| 06 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan yang lebih baik |
| 07 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan yang lebih baik |

4. Sasaran Strategis

| No. | Mendukung Sasaran Strategis |
|-----|---|
| 01 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 02 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 03 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 04 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 05 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 06 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 07 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 08 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 09 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 10 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 11 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 12 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 13 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 14 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |
| 15 | Seluruh unit organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada dalam struktur organisasi |

5. Kode Program

101.20.10

6. Nama Program

Program Kerja yang ada dalam struktur organisasi

7. Pendanaan (Rp. Bilangan)

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Formulir 2.1.1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
 (1) PRODUKSI INDUSTRIAN KESUKSESAN DAN LAYU

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Tipe 2013 | Praktikan Target | | | Prioritas | Dukungan | Penanggung Jawab |
|------|-------------------------------|--|--------------|------------------|------|------|-----------|----------|---------------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| 1400 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.1 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |
| 1401 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.2 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |
| 1402 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.3 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |
| 1403 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.4 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |
| 1404 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.5 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |
| 1405 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.6 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |
| 1406 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.7 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |
| 1407 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.8 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |
| 1408 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.9 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |
| 1409 | Program Pengembangan Industri | 1. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 2. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul 3. Meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul | 14.10 | 100% | 100% | 100% | 3 | 100% | 100% |

Depdiknas
2012

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
1.4) PROGRAM DUKUNGAN KESADARAN MASYARAKAT

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | Prakiraan Target | | | Prioritas | Output | Penanggung Jawab |
|-------|--|---|-------------------------------------|------------------|------|------|-----------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| 1.4.1 | Pengembangan Program Kesiapan Masyarakat (KPM) dan Kesiapan Masyarakat (KSM) di Kabupaten Pangajene Arungene | 1.1. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM 1.2. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM 1.3. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM | 1.1. 100% 1.2. 100% 1.3. 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 1.1. 100% 1.2. 100% 1.3. 100% |
| 1.4.2 | Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya KPM dan KSM | 2.1. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM 2.2. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM 2.3. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM | 2.1. 100% 2.2. 100% 2.3. 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 2.1. 100% 2.2. 100% 2.3. 100% |
| 1.4.3 | Pengembangan dan pelaksanaan program KPM dan KSM | 3.1. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM 3.2. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM 3.3. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM | 3.1. 100% 3.2. 100% 3.3. 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 3.1. 100% 3.2. 100% 3.3. 100% |
| 1.4.4 | Pengembangan dan pelaksanaan program KPM dan KSM | 4.1. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM 4.2. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM 4.3. Jumlah masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan yang telah mengikuti kegiatan KPM dan KSM | 4.1. 100% 4.2. 100% 4.3. 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 4.1. 100% 4.2. 100% 4.3. 100% |

Penyuluhan

1.4.1) Pengembangan Program Kesiapan Masyarakat (KPM) dan Kesiapan Masyarakat (KSM) di Kabupaten Pangajene Arungene

Revisi 12.12.12



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Nama Unit Organisasi

KEMENTERIAN RI

3. Misi Unit Organisasi

| No | Misi |
|----|---|
| 01 | Meningkatkan dan memperkuat kemampuan belajar dan keterampilan tenaga kesehatan |
| 02 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan |
| 03 | Meningkatkan prestasi tenaga kesehatan dan profesionalitas |
| 04 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 05 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 06 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 07 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |

4. Sasaran Strategis

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|---|
| 01 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 02 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 03 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 04 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 05 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 06 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |
| 07 | Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |

5. Kebijakan Program

KEMENTERIAN

6. Nama Program

Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

7. Pendanaan (Rata-Rata)

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rutiah | | 1.385.221,5 | | | |
| a. Pendampingan | | 0,0 | | | |
| b. Penelitian dan Pengembangan | | 1.385.221,5 | | | |
| 2. PHLM atau PDR | | 0,0 | | | |
| JL. MILAH | 1.385.221,5 | 1.385.221,5 | 1.385.221,5 | 1.385.221,5 | 1.385.221,5 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|--|
| 01. Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat | 01. Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat |

Lampiran 2



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Nama Unit Organisasi

Unit Kerja Khusus

3. Misi Unit Organisasi

| No | Misi |
|----|--|
| 01 | Membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 02 | Melaksanakan kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 03 | Melaksanakan kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 04 | Melaksanakan kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 05 | Melaksanakan kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 06 | Melaksanakan kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 07 | Melaksanakan kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 08 | Melaksanakan kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan berkeadilan |

4. Sasaran Strategis

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|---|
| 01 | Mendukung Sasaran Strategis Kesehatan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 02 | Mendukung Sasaran Strategis Kesehatan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 03 | Mendukung Sasaran Strategis Kesehatan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 04 | Mendukung Sasaran Strategis Kesehatan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 05 | Mendukung Sasaran Strategis Kesehatan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 06 | Mendukung Sasaran Strategis Kesehatan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 07 | Mendukung Sasaran Strategis Kesehatan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |
| 08 | Mendukung Sasaran Strategis Kesehatan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |

5. Kode Program

012.2.1.1

6. Nama Program

Program Kesehatan Masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan

7. Pendanaan (Lulus Kupon)

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Praktik Kebiasaan | | |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. RUPIAH | | 319.817,3 | | | |
| a. Non Pendanaan | | 319.817,3 | | | |
| 2. PHLN atau PUN | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 326.708,0 | 319.817,3 | 319.817,3 | 319.817,3 | 319.817,3 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|--|
| 01. Kinerja program kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan | 01. Persentase cakupan kesehatan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan |

Halaman 2 dari 4



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKNJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN

2. Nama Unit Organisasi : Staf Ahli (KEMKES)

3. Minit/Unit Organisasi :

| No | Misi |
|----|---|
| 01 | Membina kesehatan masyarakat di lingkungan rumah |
| 02 | Mengembangkan kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja |
| 03 | Mengembangkan kesehatan masyarakat di lingkungan masyarakat |
| 04 | Mengembangkan kesehatan masyarakat di lingkungan masyarakat |
| 05 | Mengembangkan kesehatan masyarakat di lingkungan masyarakat |
| 06 | Mengembangkan kesehatan masyarakat di lingkungan masyarakat |
| 07 | Mengembangkan kesehatan masyarakat di lingkungan masyarakat |
| No | Mendukung Sasaran Strategis |
| 01 | Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat |
| 02 | Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat |
| 03 | Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat |
| 04 | Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat |
| 05 | Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat |
| 06 | Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat |
| 07 | Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat |

4. Sasaran Strategis :

5. Kode Program :

: 212.02.05

6. Nama Program :

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

7. Perencanaan Kegiatan :

| Pengeluaran | Alokasi Tahun 2012 | Estimasi Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rujukan | | 6.815.954,1 | | | |
| a. Rujukan | | 0,0 | | | |
| b. Non Rujukan | | 6.815.954,1 | | | |
| 2. PHN atau PDR | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 6.815.954,1 | 6.815.954,1 | 6.815.954,1 | 6.815.954,1 | 6.815.954,1 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|---|
| 01. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja | 01. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja |
| 02. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja | 02. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja |
| 03. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja | 03. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja |
| 04. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja | 04. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja |
| 05. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja | 05. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja |
| 06. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja | 06. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja |
| 07. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja | 07. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan di rumah, di luar rumah, dan di lingkungan kerja |

PELAKSIAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

1251 PROGRAM PENYULINGAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL WILAYAH LAUT

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | Pencapaian Target | | | Prioritas | Dokumen | Peningkatan Jawabs |
|------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 121 | Penyuluhan dan Pembinaan Kader | 1.1. Jumlah kader yang terlatih dan terampil 1.2. Jumlah kader yang terlatih dan terampil 1.3. Jumlah kader yang terlatih dan terampil | 1.1 1.2 1.3 | 1.1 1.2 1.3 | 1.1 1.2 1.3 | 1.1 1.2 1.3 | 1.1 1.2 1.3 | 1.1 1.2 1.3 | 1.1 1.2 1.3 |
| 122 | Penyuluhan dan Pembinaan Kader | 2.1. Jumlah kader yang terlatih dan terampil 2.2. Jumlah kader yang terlatih dan terampil 2.3. Jumlah kader yang terlatih dan terampil | 2.1 2.2 2.3 | 2.1 2.2 2.3 | 2.1 2.2 2.3 | 2.1 2.2 2.3 | 2.1 2.2 2.3 | 2.1 2.2 2.3 | 2.1 2.2 2.3 |
| 123 | Penyuluhan dan Pembinaan Kader | 3.1. Jumlah kader yang terlatih dan terampil 3.2. Jumlah kader yang terlatih dan terampil 3.3. Jumlah kader yang terlatih dan terampil | 3.1 3.2 3.3 | 3.1 3.2 3.3 | 3.1 3.2 3.3 | 3.1 3.2 3.3 | 3.1 3.2 3.3 | 3.1 3.2 3.3 | 3.1 3.2 3.3 |
| 124 | Penyuluhan dan Pembinaan Kader | 4.1. Jumlah kader yang terlatih dan terampil 4.2. Jumlah kader yang terlatih dan terampil 4.3. Jumlah kader yang terlatih dan terampil | 4.1 4.2 4.3 | 4.1 4.2 4.3 | 4.1 4.2 4.3 | 4.1 4.2 4.3 | 4.1 4.2 4.3 | 4.1 4.2 4.3 | 4.1 4.2 4.3 |

lampiran 2.1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

125) PROGRAM PENYULUHANSARAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA LAUT

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | Pencapaian Target | | | Prioritas | Daluwarsa | Pencapaian Jawa Barat |
|------|---|---|-------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 1. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 2. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 3. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 4. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 5. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 6. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 7. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 8. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 9. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |
| 125 | Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut | 10. Jumlah kegiatan penyuluhan dan saran manajemen dan operasional matra laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 100% |

Penyuluhan dan Saran Manajemen dan Operasional Matra Laut
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

5. SUMBER PENDANAAN

(25) PROGRAM PENTILINGSARAN KAWAJENAN DAN OPERASIONAL "MATERA LAU"

| Kode | Kegemukan/ke. peng/Mit/Output | Jenis Output | Alokasi 2012 | Kategori | Aspek Tuntutan 2011 (Lamp. Sas. 2011) | | Pemb. 2014 | | Pemb. 2015 | | Tgl. Pengesahan |
|------|-------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|------|------------|------|-----------------|
| | | | | | PINASTRI | PINASTRI | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 1 | 121 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,
PURNOMO YUSGANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

FORMULIR-2
UO TNI AU



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Nama Unit Organisasi : Direktorat Besar (DB) 3

3. Waktu Pelaksanaan : -

4. Sasaran Strategis :

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|---|
| 01 | Memelihara dan meningkatkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Berbasis Data yang Berkelanjutan Akutal, Sesuai Teknologi, Akutabilitas dan Terakreditasi |

5. Kode Program : 01.2.24.00

6. Nama Program : Penguatan Penguatan Kelembagaan Monev Nasional

7. Pembiayaan (Dana Bantuan)

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Prakiraan Keanjutan | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 462.000,0 | | | |
| a. Pembiayaan | | 0,0 | | | |
| b. Biaya Pembiayaan | | 462.000,0 | | | |
| 2. PHN atau PDN | | 0,0 | | | |
| SUMLAH | 558.495,6 | 462.000,0 | 591.375,0 | 591.375,0 | 591.375,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|--|
| 01. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan | 01. Penguatan Penguatan Kelembagaan Monev Nasional |

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
 A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
 120) PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATA UJARAN

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | Persentase Target | | | Prioritas | Indikator | Pembagian Jawa |
|------|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 1. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 2. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 3. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 4. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 5. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 6. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 7. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 8. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 9. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 120 | Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran | 10. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% |

120) Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran

Sasaran 120) Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran: Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial peserta pelatihan

Indikator 120) Program Dukungan Kesiapan Mata Ujuran: Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan

(20) PROGRAM DI KUNJIAN KLSIPAN NATIRA UDARA

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Nama Unit Organisasi : Biro Kerja Sama MIA

3. Misi Unit Organisasi :

4. Sasaran Strategis : **No. 1 Mendukung Sasaran Strategis**

01. Selenggarakan program pengujian, pembinaan, dan pengawasan pelayanan kesehatan, nasional dan internasional, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan kesehatan masyarakat

5. Kode Organisasi : 31.3.02.01

6. Nama Program : Program Medisinal dan Non Medisinal dan Obat Farmasi yang aman, efektif, terjangkau, berkualitas, dan inovatif

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Pembiayaan Kebutuhan | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 3.457.093,4 | | | |
| a. Pendamping | | 0,0 | | | |
| b. Non Pendamping | | 3.457.093,4 | | | |
| 2. PHK atau PDN | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 3.457.093,4 | 3.457.093,4 | 6.000.000,0 | 6.000.000,0 | 6.000.000,0 |

II. HASIL/OUTPUT DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|---|
| 01. Terlaksananya proses pelayanan pengujian, pembinaan, dan pengawasan pelayanan kesehatan, nasional dan internasional, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan kesehatan masyarakat | 01. Terlaksananya proses pelayanan pengujian, pembinaan, dan pengawasan pelayanan kesehatan, nasional dan internasional, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan kesehatan masyarakat |

RENJA-KL 2013



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

1. INTRODUCTION

1. Naima Kompolunfer / *Empang* : KEMENTERIAN KEHUTANAN
2. Naima Heli / *Jember* : PT. PERKASA PAPER INDONESIA
3. M. A. Laili / *Ungaran* :
4. Suciaryanti / *Surabaya* : **Na**

| No | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|---|
| 05 | Sistem informasi yang terintegrasi, terdistribusi, dan teraman yang dapat diakses secara otomatis oleh pengguna yang berkepentingan. Dengan demikian, informasi akan lebih akurat, lebih cepat, dan lebih aman. |
| 06 | Seluruh Sistem yang terintegrasi dan terdistribusi akan mendukung dan melindungi proses bisnis yang berjalan. |
| 07 | Operasional, Reliabilitas, Keamanan, Integritas, dan Ketersediaan Sistem yang akan mendukung proses bisnis yang berjalan. Dengan demikian, pengguna akan lebih puas dan loyal. |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 4. Kode Program | 1. 2013.11.22 |
| 6. Nama Program | 1. Program Pengajaran Pembelajaran dan Sosial Masyarakat |
| 7. Pendidikan / Ilmu Banihi | |

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Usulan Tahun 2013 | Prakiraan Kebutuhan | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 263.670,5 | | | |
| a. Pemasangan | | 0,0 | | | |
| b. Biaya Pemasangan | | 263.670,5 | | | |
| 2. POKN atau POKN | | 0,0 | | | |
| Jumlah | 290.800,0 | 263.670,5 | 302.332,0 | 302.332,0 | 302.332,0 |

11. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|---|
| 3) Terapannya prinsip-prinsip analisis material yang baik pada pekerjaan dan proses produksi | 3) Penerapan prinsip-prinsip yang benar dalam analisis dan pengolahan hasil |

B. SUMBER PENDANAAN

2021 PENGARAH PERINGKATAN PROFESIONALISME PERSONEL MATRA UDARA

[illegible]



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2. Nama Unit Organisasi : Markas Besar TNI-AD

3. Nama Unit Organisasi : 1

4. Sasaran Strategis :

| No | | Mendukung Sasaran Strategis |
|----|----|---|
| 02 | 02 | Perwujudan Pelembagaan, Pengembangan, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Berbasis Bukti dan Berkeadilan |
| 03 | 03 | Kemampuan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia |

5. Kode Program : 1001/0000

6. Nama Program : Program Pengembangan dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

7. Pendanaan (Juta Rupiah) :

| Pendanaan | Alokasi Tahun 2012 | Hasil Tahun 2013 | Proyeksi Kebutuhan | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1. Rupiah | | 3.743.125,0 | | | |
| a. Anggaran | | 0,0 | | | |
| b. Non-Anggaran | | 3.743.125,0 | | | |
| 2. PHLN atau PDB | | 0,0 | | | |
| JUMLAH | 3.710.030,2 | 3.743.125,0 | 3.125.357,0 | 4.125.357,0 | 4.125.357,0 |

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Hasil/Outcome | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|--|
| 01. Penguatan sistem kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan | 01. Kemampuan sistem kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan efektivitas kerja |

Formulir 2/13

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(26) PROGRAM PENYELINGGAHAN DAN RUMAH LAYAN OPERASIONAL, MATRA UDARA

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target 2013 | Prakiraan Target | | | Prioritas | Dibangun | Peningkat Jawab |
|------|---|--|-------------|------------------|------|------|-----------|----------|--------------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| 134 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 01. Meningkatkan keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 02. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 03. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |
| 135 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 04. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 05. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 06. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |
| 136 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 07. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 08. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 09. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |
| 137 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 10. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 11. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 12. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |
| 138 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 13. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 14. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 15. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |
| 139 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 16. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 17. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 18. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |
| 140 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 19. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 20. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 21. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |
| 141 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 22. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 23. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 24. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |
| 142 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 25. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 26. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 27. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |
| 143 | Pengembangan Fasilitas di Bandara Muliawatu | 28. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 29. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu 30. Fasilitas keselamatan penumpang dan barang di Bandara Muliawatu | 100% | 85% | 95% | 100% | 1 | 100% | 2012 |

Halaman 22

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

28) PROGRAM PENYELANGGARAN MANULVILIN DAN DISKUSIAN MATA UDARA

| Kode | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | Pencapaian Target | | | | Prioritas | Dinamika | Penanggung Jawab |
|------|---------------------------------------|--|--------|------|------|------|-------------------|------|------|------|-----------|----------|------------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| 1301 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |
| 1302 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |
| 1303 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |
| 1304 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |
| 1305 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |
| 1306 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |
| 1307 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |
| 1308 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |
| 1309 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |
| 1310 | Penyusunan dan Pelaksanaan Mata Udara | 1) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi 2) Melakukan diskusi dengan masyarakat di lokasi diskusi | 54% | 56% | 58% | 60% | 54% | 56% | 58% | 60% | 3 | ... | ... |

...

...

...

B. SUMBER PENDANAAN

1301 PROGRAM PENYLENGGARAAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA JADARA

| Kode | Kegiatan/Bag. Kerja/KK/Output | Jenis Output | Alokasi 2012 | Usulan Tahun 2013 (Lata Rutin) | | | Pencapaian Keterserapan | | Saldo |
|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------|--------------|-------------------------|------|-------|
| | | | | Bugdet | P.111000 | P.111000-001 | 2014 | 2015 | |
| 1301 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

1301000001

**PENDUKUNG
KEMENTERIAN**

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI UNIT ORGANISASI)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

| Kode | Unit Organisasi | Rencana 2012 | Jumlah Pendanaan Tahun 2013 (Rupiah) | | | No. Rincai Kebutuhan (Data Rujukan) | | |
|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Rupiah | PKM/BLU | Jumlah | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 1 | 1.006.113,0 | 9.113.305,0 | 18.333.350,9 | 0,0 | 22.500.800,0 | 21.000.000,0 | 13.133.728,0 |
| 2 | 2 | 5.000.671,8 | 5.000.483,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 4 | 9.204.537,1 | 9.204.537,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 5 | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | | 21.572.310,9 | 21.572.310,9 | 18.333.350,9 | 0,0 | 22.500.800,0 | 21.000.000,0 | 13.133.728,0 |

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENUA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2013
(REKAPITULASI PROGRAM)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PUK. ALIHAN

| No | Judul Program | Anggaran 2012 | Rencana | PHN/Program | Saluran Pendanaan Tahun 2013 (Luar Rangkap) | Persentase Pelaksanaan (dari RUPB) | | |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---|------------------------------------|------|------|
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Saluran Pendanaan Tahun 2013 (Luar Rangkap) | 948.400,00 | 948.400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 13.568.322,00 | 5.054.154,00 | 12.733.299,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 21.834,00 | 20.928,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 5.150,00 | 3.940,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 4.088,00 | 3.572,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 33.812,00 | 33.812,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 240.188,00 | 460.283,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 775.498,00 | 1.988.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 306.900,00 | 801.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 675.000,00 | 427.900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 511.000,00 | 2.478.119,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 511.000,00 | 948.400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di Kementerian PUK. ALIHAN | 3.078.800,00 | 6.157.600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[illegible]

